

**PEMBERITAAN KASUS PENUTUPAN
LOKALISASI PROSTITUSI DOLLY
(Analisis Framing pada Surat Kabar Republika dan
Kompas Edisi Juni 2014)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**

Jurusan komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Amelia Lutfiatin Nikmah

101211003

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405
Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Amelia Lutfiatin Nikmah

Nim : 101211003

Fak/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/ Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Pemberitaan Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly (Analisis Framing Pada Surat Kabar Republika dan Kompas Edisi Juni 2014)**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, 23 November 2015

Pembimbing,
Bidang Substansi Materi


Drs. H. Ahmad Hakim, M.A., Ph.D
NIP: 19600103 198803 1 002

Bidang Metodologi dan Tata Tulis


Maya Rini Handayani, M.Kom
NIP: 19760505 201101 2 007

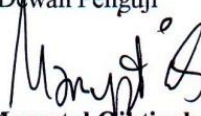
SKRIPSI
PEMBERITAAN KASUS PENUTUPAN
LOKALISASI PROSTITUSI DOLLY
(Analisis Framing Pada Surat Kabar Republika dan Kompas
Edisi Juni 2014)

Disusun Oleh:
Amelia Lutfiatin Nikmah
101211003

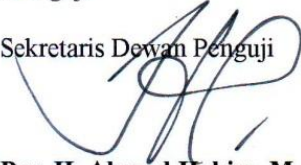
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 16 Desember 2015
dan dinyatakan telah lulus memenuhi Syarat

Susunan Dewan Penguji

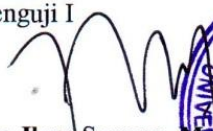
Ketua Dewan Penguji


Dra. Maryatul Qibtiyah, M.Pd
NIP. 19680113 199403 2 001


Sekretaris Dewan Penguji


Drs. H. Ahmad Hakim, M.A., Ph.D.
NIP. 19600103 198803 1 002

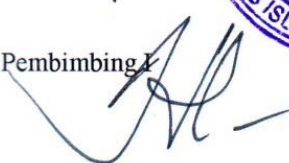
Anggota
Penguji I


Dr. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 19720410 200112 1 003

Penguji II


Muhammad Chodzirin, M.Kom
NIP. 19691024 200501 1 003

Pembimbing I


Drs. H. Ahmad Hakim, M.A., Ph.D
NIP. 19600103 198803 1 002

Pembimbing II



Maya Rini Handayani, M.Kom
NIP. 19760505 201101 2 007



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 24 November 2015



Amelia Lutfiatin Nikmah
NIM. 101211003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah AWT, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dimuka bumi ini. Sang Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Segala kuasa milikNya, yang telah memberikan hamba segala petunjuk untuk menjalani hidup di jalan yang benar dan diridloi.

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang diutus untuk menyebarkan Islam di dunia ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya serta diakui menjadi umatnya kelak di *yaumul Kiyamah*, amin.

Penulis yakin, tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul Pemberitaan Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly (Analisis Framing Pada Surat Kabar Republika dan Kompas Edisi Juni 2014) tidak mungkin selesai. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis meminta maaf sekiranya tidak dapat menyebut satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam proses penggarapan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. DR. H. Awwaluddin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Ahmad Hakim, M.A.,Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I Bid. Substansi Materi yang selalu sabar memberikan waktu serta nasihat di tahun-tahun pembelajaran bagi penulis serta memberikan pelajaran tentang arti penting semangat dan kesabaran dalam menuntut ilmu.
4. Maya Rini Handayani, M.Kom, selaku Dosen wali sekaligus Dosen Pembimbing II Bid. Metodologi dan Tata Tulis yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran tentang semangat dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi penulis serta senantiasa mendengarkan keluhan kesah penulis.
5. Dosen Fakultas Dakwah yang selama ini telah menjadi guru yang sabar mendidik mahasiswanya di bangku perkuliahan. Segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan administrasi.
6. Bapak Hartomo dan Ibu Biwati, orang tua yang senantiasa memberikan doa restu. Selalu mengajarkan arti penting sebuah keluarga dan persaudaraan. Orang tua yang mampu menghapus air mata anak-anaknya dengan doa di setiap detik dalam sholatnya.
7. Kakakku tersayang Anani'matul Fitria, terimakasih untuk semua nasihat-nasihat dan canda tawamu, karena tawamu telah menjadi semangat yang tak pernah padam untukku.
8. Teman-teman KPI A angkatan 2010 yang selalu senantiasa mendengarkan segala ocehan keluhan kesahku, mbak Ula, Mpok

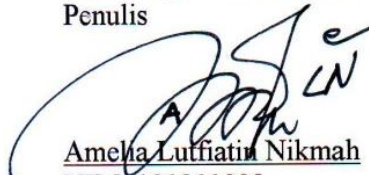
Fiqoh, Yaya, Dewi, Fitri, Nila, Tarti, Khoir, Iir kalian adalah sahabat-sahabat terhebat.

9. Anak-anak kos (Agung Saptono), Erly, Iqoh, Iva, Osy, Sicuk, Aini, Mbak Anik, Dedeh, mbak Riska, Dian, Syifa, Nurul, Naila dan teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah berperan dan membantu penulis hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Teriring doa dan harapan semoga amal baik dan jasa dari semua pihak tersebut di atas akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran bagi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Allahumma Amin.

Semarang, 24 November 2015

Penulis



Ameha Lutfiatin Nikmah
NIM. 101211003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk...

1. *Ibunda tercinta, Ibu terhebat di dunia, ibu yang di dalam setiap hela nafasnya adalah doa untuk anak-anaknya, terima kasih untuk dekap kasih sayang ibu yang tak pernah bisa tergantikan dengan apapun.*
2. *Ayahanda tercinta, ayah nomor satu di dunia, terima kasih atas segala nasihat semangat yang luar biasa yang ayah berikan.*
3. *Teteh tersayang Anani'matul Fitria dan kakak ipar Mizbahul Umam yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya.*

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا جَهْلَةً

فَتُصِيبُوهَا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”
(al Hujurat: 6) (Departemen Agama RI, 2006:516)

ABSTRAKSI

Amelia Lutfiatin Nikmah (101211003). Pemberitaan Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly (Analisis Framing Pada Surat Kabar Republika dan Kompas Edisi Juni 2014). Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: untuk mengetahui bagaimana surat kabar harian Republika dan Kompas memframing kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dalam pemberitaannya edisi Juni 2014.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, spesifiknya deskriptif dengan menggunakan pendekatan Framing oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dengan empat struktur besar yaitu: 1). Struktur Sintaksis: cara wartawan menyusun fakta, 2). Struktur Tematik: cara wartawan menulis fakta, 3). Struktur Skrip: cara wartawan mengisahkan fakta, 4). Struktur Retoris: cara wartawan menekankan fakta.

Framing adalah cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Penulis mengumpulkan data dengan metode dokumentasi dari surat kabar Republika dan Kompas dari tanggal 5, 6, 10, 13, 18, 20, dan 21 Juni 2014.

Hasil penelitian terhadap kedua surat kabar tersebut, terdapat perbedaan dalam membingkai tentang penutupan lokalisasi prostitusi Dolly di media massa, melalui berita yang ditampilkan kepada khalayak. Dilihat dari struktur Sintaksis, Republika selalu menampilkan berita tersebut di halaman *headline*, struktur Skrip (5W+1H) yang terdapat dalam pemberitaan di surat kabar harian Republika selalu lengkap, struktur Tematik menyangkut penyusunan kata dalam paragraf di surat kabar harian Republika seringkali tidak lengkap, sedangkan jika dilihat dari struktur Retoris, Republika gambar yang berupa karikatur atau foto dalam setiap pemberitaannya. Sedangkan dalam surat kabar harian Kompas tidak menampilkan halaman *headline* dari struktur Sintaksis dalam setiap pemberitaannya, Struktur Skrip (5W+1H) yang terdapat dalam pemberitaan di surat kabar Kompas tidak lengkap, jika dilihat dari struktur Tematik yang menyangkut penyusunan kata dalam paragraf di surat kabar harian Kompas selalu tersesun dengan lengkap. Sedangkan jika dilihat dari struktur Retoris, Kompas hanya menampilkan satu gambar dari tujuh pemberitaan yang ditampilkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAKSI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber dan Jenis Data	11
3. Definisi Operasional	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13

5. Teknik Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	24
 BAB II KERANGKA TEORI	
A. Media Massa	26
1. Pengertian Media Massa	26
2. Karakteristik Media Massa	28
3. Fungsi dan Peran Media Massa.....	29
B. Surat Kabar.....	33
1. Pengertian Surat Kabar	33
2. Karakteristik Surat Kabar.....	35
3. Fungsi Surat Kabar	38
C. Berita	40
1. Pengertian Berita.....	40
2. Jenis-jenis Berita.....	42
3. Unsur-unsur Nilai Berita.....	45
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Surat Kabar Republika.....	48
1. Sejarah dan Perkembangannya.....	48
2. Visi dan Misi.....	51
3. Struktur Redaksi Republika	55
B. Surat Kabar Kompas.....	58
1. Sejarah dan Perkembangannya.....	58
2. Visi dan Misi.....	61

3. Struktur Redaksi Kompas	64
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	
A. Analisis Framing Pada SKH Republika.....	69
B. Analisis Framing Pada SKH Kompas.....	95
C. Frame Pemberitaan Penutupan Dolly	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
C. Penutup.....	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kerangka Framing Menurut Pan dan Kosicki	17
Table 2. Pemberitaan Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly pada Surat Kabar Harian Republika dan Kompas	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Redaksi Surat Kabar Harian Republika	55
Gambar 2. Struktur Redaksi Surat Kabar Harian Kompas	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Republika, Kamis 5 Juni 2014
Lampiran 2.	Republika, Jum'at 6 Juni 2014
Lampiran 3.	Republika, Selasa 10 Juni 2014
Lampiran 4.	Republika, Jum'at 13 Juni 2014
Lampiran 5.	Republika, Rabu 18 Juni 2014
Lampiran 6.	Republika, Jum'at 20 Juni 2014
Lampiran 7.	Republika, Sabtu 21 Juni 2014
Lampiran 8.	Kompas, Kamis 5 Juni 2014
Lampiran 9.	Kompas, Jum'at 6 Juni 2014
Lampiran 10.	Kompas, Selasa 10 Juni 2014
Lampiran 11.	Kompas, Jum'at 13 Juni 2014
Lampiran 12.	Kompas, Rabu 18 Juni 2014
Lampiran 13.	Kompas, Jum'at 20 Juni 2014
Lampiran 14.	Kompas, Sabtu 21 Juni 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa atau dalam hal ini disebut pula media jurnalistik, merupakan alat bantu utama dalam proses komunikasi massa. Sebab komunikasi massa sendiri secara sederhana diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang menggunakan media. Menurut Bittner, (seperti yang dikutip Muhtadi, 1999: 73), komunikasi massa dipahami sebagai suatu komunikasi yang dilakukan melalui media kepada sejumlah orang yang tersebar di tempat-tempat yang tidak ditentukan. Jadi media massa menurutnya adalah suatu alat transmisi informasi, seperti koran atau surat kabar, majalah, buku, film, radio, dan televisi atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media itu.

Jurnalisme ini berkaitan dengan media cetak. Media massa cetak ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yakni surat kabar, majalah berita, majalah khusus, majalah perdagangan, majalah hobi, *newsletter*, dan lain-lain. Masing-masing jenis itu berbeda satu sama lain dalam penyajian tulisan dan rubriknya (Nurudin, 2009: 13). Dan disini penulis melakukan penelitian di media massa cetak yang berjenis surat kabar, yaitu surat kabar harian Republika dan Kompas.

Sesungguhnya tugas mulia media adalah menyampaikan kebenaran. Namun tugas menyampaikan kebenaran itu tidaklah

sederhana. Ada berbagai kepentingan yang “berbicara” yang pada gilirannya memberi bentuk pada kebenaran yang disampaikan. Selalu saja ada ketegangan diantara pihak yang memiliki kepentingan dan masyarakat umum sebagai konsumen berita (Sobur, 2006: viii).

Menurut Risnova yang mengutip Antonio Gramsci, mengatakan media adalah sebuah ruang dimana ideologi dipresentasikan. Ini berarti di satu sisi media dapat menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun disisi lain, media juga dapat menjadi alat ukur dalam membangun kultur dan ideologi tandingan. Hal ini berkaitan dengan cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh masing-masing pihak (Risnova, 2011: 4).

Surat kabar Republika dan Kompas sebagai salah satu alat untuk menyampaikan berita kepada khalayak. Berita dalam konteks komunikasi massa, lebih kepada usaha rekonstruksi atas peristiwa yang terjadi. Berita pada titik tertentu sangat mempengaruhi manusia merumuskan pandangannya tentang dunia. Pandangan tentang dunia adalah *frame* yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia dimaknai dalam *frame* tersebut. Tanpa adanya *frame* yang jelas, kejadian, peristiwa, dan pengalaman manusia akan terlihat kacau (ekawenats.blogspot.com, diakses 22 oktober 2014).

Bagaimana penyajian berita dalam memaknai realitas perihal pemberitaan penutupan lokalisasi prostitusi Dolly tersebut. Seorang jurnalis selalu mengatakan dirinya bertindak objektif, seimbang dan tidak berpihak pada kepentingan atas hak-hak masyarakat dalam mengetahui suatu kebenaran (Ngatmin, 2007: 7). Meskipun sikap independen dan objektif merupakan dua kata kunci yang menjadi pegangan setiap jurnalis, pada kenyataannya khalayak sering kali mendapat suguhan berita yang beraneka warna dan ragam dari sebuah peristiwa yang sama.

Berangkat dari peristiwa yang sama, media tertentu memberitakan dengan cara menyeleksi isu tertentu, dan cenderung menonjolkan isu tersebut, sedangkan media lain mengabaikan dan cenderung menghilangkan isu tersebut. Ini semua cukup menjadi bukti bahwa di balik independensi dan keobjektivitasan media massa memiliki keberpihakan.

Bertolak dari realitas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait framing pemberitaan. Penulis tertarik pada analisis framing karena dengan analisis framing rahasia di balik semua perbedaan di media massa dalam mengungkapkan fakta dapat terungkap. Dalam penelitian ini, analisis framing digunakan sebagai alternatif yang lebih kritis untuk melihat relitas lain di balik pemberitaan kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly di media massa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan

pendekatan model tersebut, teks-teks berita yang terkait dengan pemberitaan kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly pada surat kabar di Harian Republika dan Kompas edisi Juni 2014, dianalisis ke dalam empat struktur besar yaitu: (1) struktur sintaksis, (2) struktur skrip, (3) struktur tematik, (4) struktur retorik (Eriyanto, 2004: 255-256).

Kementrian Sosial (Kemensos) mencatat hingga kini masih ada 183 lokalisasi prostitusi yang tersebar di Indonesia. Salah satunya lokalisasi prostitusi Dolly yang berada di Surabaya. Tri Rismaharini (sebagaimana wawancara dengan Republika pada hari Kamis 22 Mei 2014) berjanji akan melakukan penutupan Dolly yang direncanakan pada tanggal 19 Juni 2014 sebelum bulan Ramadhan. Tri Rismaharini juga menegaskan bahwasanya warga yang hidupnya tergantung pada Dolly tetap akan mendapatkan penghasilan yang sama setiap bulannya pasca penutupan lokalisasi (http://www.scrapone.com/koran/republika_20150907.pdf, diakses 24 Mei 2014).

Rencana Risma menutup Lokalisasi Dolly tidak berjalan mulus dan mendapatkan tantangan. Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana adalah orang yang paling menentang keputusan itu. Padahal, Risma dan Wisnu merupakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang seharusnya memiliki visi dan misi yang sama, terutama dalam membangun Kota Surabaya agar menjadi kota yang bersih dari praktek prostitusi

(http://www.scrapone.com/koran/republika_20140605.pdf, diakses 24 Mei 2014).

Sebenarnya Risma tidak asal menutup Dolly. Risma sudah menyiapkan langkah untuk menyulap lokasi itu menjadi areal bisnis yang bisa menampung mereka yang nantinya akan tergusur. Dolly yang merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, akan dibeli oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan dialih fungsikan sebagai sentra Perdagangan Kaki Lima (PKL) dan stan-stan PKL yang dikhususkan untuk warga setempat. Risma juga merencanakan untuk memberikan program pelatihan usaha. Diharapkan, dengan pelatihan itu pekerja lokalisasi punya bekal untuk merintis pekerjaan baru dan meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Berdasarkan data dari DPRD Kota Surabaya, diperkirakan ada 52 wisma dengan lebih dari 1.000 PSK dan lebih dari 2.000 tamu yang memakai jasa PSK di lokalisasi Dolly (http://www.scrapone.com/koran/republika_20140605.pdf, diakses 24 Mei 2014).

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pemberitaan Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly dengan Analisis Framing pada Surat Kabar Harian Republika dan Kompas Edisi Juni 2014. Penelitian ini akan berupaya melihat bagaimana Harian Umum Republika dan Kompas membingkai berita tentang kasus penutupan lokalisasi Dolly.

Ketertarikan penulis untuk menganalisis terhadap media Kompas dan Republika dikarenakan kedua media tersebut memiliki latar belakang ideologi yang berbeda, sehingga dalam penyajian beritanya pun tidak sama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana surat kabar harian Republika dan Kompas memframing kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dalam pemberitaannya edisi Juni 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana surat kabar harian Republika dan Kompas memframing mengenai pemberitaan tentang kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dalam pemberitaannya edisi Juni 2014.

2. Manfaat penelitian yang bisa diperoleh dalam penelitian ini :

a. Bagi Peneliti

- 1) Melatih kemampuan berfikir dalam menganalisis pemberitaan yang ada pada media massa cetak.
- 2) Selain untuk memperoleh data, juga sebagai pendorong bagi peneliti untuk mempelajari dan memahami masalah-masalah yang ada dalam sudut pandang pemberitaan pada media surat kabar harian Republika dan Kompas.

- b. Bagi surat kabar harian Republika dan Kompas

Penelitian ini semoga dapat berguna bagi media yang diteliti, yaitu menjadi sebuah masukan yang berharga mengenai pemberitaan dan media diharapkan mengetahui kecenderungan-kecenderungan media massa dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa.

- c. Bagi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Semoga penelitian ini memberikan sumbangsih bagi ilmu komunikasi khususnya penelitian yang menggunakan metode analisis framing yang menjelaskan bahwa media massa mempunyai ideologi yang berbeda-beda pada setiap pemberitaannya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang disertakan dalam penelitian ini, dimaksudkan agar terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka yang disertakan pada bagian ini mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis framing. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya adalah:

1. Skripsi Noor Zaidah (Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo Semarang 2006) dengan judul “Analisis Framing terhadap Pemberitaan Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama di Surat Kabar Suara Merdeka edisi Nopember-Desember 2004”. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana surat kabar Suara Merdeka mengetahui kecenderungan dan konstruksi berita

tentang Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-31 yang dilihat dari perspektif dakwah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis Framing. Analisis yang digunakan Zaidah adalah analisis induktif. Analisis yang berangkat dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Hasil penelitian tersebut adalah Suara Merdeka cenderung melihat Muktamar ke-31 sebagai bentuk demokrasi warga NU untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU setiap lima tahun sekali. Jika dilihat dari perspektif dakwah, pemberitaan Suara Merdeka belum memenuhi kode etik Jurnalistik Islami. Kode etik jurnalistik Islami haruslah tidak memihak pada golongan tertentu dan setiap informasinya mengandung nilai kebenaran (tidak berbohong) juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta serta menghindari olok-olok, penghinaan, mengejek dan mencaci maki yang menimbulkan permusuhan

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Noor Zaidah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai subyeknya. Noor Zaidah menggunakan *Suara Merdeka* sebagai subyeknya, sedangkan penulis menggunakan *Republika* sebagai subyek penelitiannya.

2. Skripsi Marlina Ngatmin (Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007) dengan judul “Analisis Framing Kasus Poligami K.H Gymnastiar di Media

Kompas dan Republika,” dalam penelitian tersebut, Ngatmin menggunakan framing model Robert M. Entman yang menggunakan empat perangkat framing: *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Keempat perangkat tersebut, Ngatmin gunakan untuk mengetahui bagaimana kasus Poligami K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dikonstruksi oleh kedua harian nasional *Kompas* dan *Republika*.

Peneliti menarik kesimpulan bahwasannya harian Kompas membingkai berita poligami Aa Gym sebagai masalah sosial Islam, sebab Aa Gym sebagai sosok yang berpoligami, merupakan seorang *public figure* yang begitu dikagumi dan dicintai banyak jamaahnya. Namun, tindakannya berpoligami menuai banyak protes dari berbagai kalangan, terutama kaum ibu. Mereka menganggap pernikahan kedua Aa Gym merupakan contoh yang tidak baik bagi jamaahnya terutama bagi kaum lelaki.

Ngatmin melakukan penelitian tentang kasus poligami yang dilakukan oleh KH. Gymnastiar, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly. Bila dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marliana Ngatmin terletak pada obyeknya.

3. Skripsi M. Mahbub Al Basyari (Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009) dengan judul

”Framing Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji 2008/1429 H di Harian Kompas dan Republika Edisi Desember 2008” dalam skripsinya tersebut M. Mahbub Al Basyari membahas tentang *frame* dari kedua media massa Kompas dan Republika.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis framing model Robert Entman. Hasil penelitian terhadap surat kabar, terdapat perbedaan dalam membingkai tentang pelaksanaan ibadah Haji tahun 2008/1429 H di media massa, melalui berita yang ditampilkan kepada khalayak. Dengan *frame* berita, Kompas menilai bahwa pemberitaan yang disampaikan hanya melihat sudut pandang politik, berbeda dengan Republika yang melihat dari segi masalah kesejahteraan para calon jamaah haji.

Dari ketiga skripsi diatas, meskipun sama-sama memakai analisis framing, namun yang membedakannya adalah pada metode penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti serta item-item berita yang dianalisis.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Penelitian ini bersifat holistik (utuh) dan sistematis terkait secara keseluruhan tidak bertumpu pada pengukuran sebagai

penjelasan mengenai suatu gejala yang diperoleh para pelaku (sasaran penelitian) atau pelaku sendiri yang menafsirkan mengenai tindakannya (Moleong, 2002:3). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Framing. Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita (Eriyanto, 2004:68).

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lexy J. Moleong (2002:122) sumber data utama adalah penelitian kualitatif adalah “kata-kata” dan “tindakan”, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini datanya antara lain:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (Suryabrata, 1995:85). Disini peneliti mengambil berita pada surat kabar Republika dan Kompas yang terbit pada bulan Juni 2014. Alasan mengapa rentang waktu ini yang penulis pilih adalah karena penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2014, sehingga pemberitaan yang penulis teliti dalam kurun waktu Juni berarti pemberitaan sebelum dan sesudah penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dilaksanakan. Kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly hadir 7 kali di Surat Kabar

Republika dan Surat Kabar Kompas. Pada surat kabar Republika tanggal 5, 6, 10, 13, 18, 20, 21 Juni 2014 dan Kompas menyediakan halaman mengenai kasus ini dibagian *Headline* tanggal 5, 6, 10, 13, 18, 20, 21 Juni 2014.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik dari buku, jurnal, skripsi, tesis, surat kabar dan penelitian-penelitian lain.

3. Definisi Operasional

Berita pada penelitian ini hanya tertuju pada pengertian berita menurut jurnalistik, yaitu seperti didefinisikan oleh William J. Bleyer, berita adalah sesuatu yang aktual yang dipilih wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca, atau karena dapat menarik pembaca tersebut. Dengan demikian berita dalam penelitian ini hanya mencakup berita aktual atau berita lempang (*stright news*).

Berita lempang (*stright news*) yang diteliti dalam kajian ini khusus seputar pemberitaan penutupan lokalisasi prostitusi Dolly pada surat kabar harian Republika dan Kompas edisi Juni 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan penulis kumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 1998:236).

Data-data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi analisis framing yang digunakan. Data yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebutkan diatas.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, untuk dipaparkan dalam bentuk skripsi, penulis menggunakan pendekatan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Proses framing dalam tahapan paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tapi juga pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkan (sambil menyembunyikan sisi lain). Menurut Alex Sobur dalam bukunya yang berjudul Analisis Teks Media sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi objek

framing seorang wartawan. Ketiga bagian tersebut adalah (Sobur, 2006:173-174):

a. Judul Berita

Judul berita diframing dengan menggunakan teknik empati, yakni menciptakan “pribadi khayal” pada diri khalayak, sementara khalayak diangankan menempatkan diri sendiri seperti korban kekerasan atau keluarga dari korban kekerasan, sehingga mereka bias merasakan kepedihan yang luar biasa.

b. Fokus Berita

Fokus berita diframing dengan menggunakan teknik asosiasi, yaitu menggabungkan kebijakan aktual dengan fokus berita.

c. Penutup Berita

Penutup berita diframing dengan menggunakan teknik *packing*, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajaran yang dikandung berita. Khalayak tidak berdaya untuk membantah kebenaran yang direkonstruksi berita.

Menurut Eriyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media ada empat model analisis framing yang dikembangkan oleh para ahli. Model-model tersebut dikembangkan oleh Murray Edelman, Robert N. Entman, William A. Gamson serta Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Meskipun

ada banyak istilah dan definisi, namun dari berbagai model tersebut memiliki kesamaan. Analisis framing secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas serta menyajikan dan menampilkan kepada khalayak. Dengan cara dan teknik seperti apa suatu peristiwa ditekankan dan ditonjolkan, apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan atau bahkan disembunyikan dalam pemberitaan.

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. *Frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan narasumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. *Frame* berhubungan dengan makna. Maka bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.

Menurut Pan dan Kosicki, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. *Pertama*, dalam konsepsi psikologi. Dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. *Kedua*, konsepsi sosiologis. Di sini lebih melihat bagaimana konstruksi sosial atas realitas. *Frame* di sini dipahami sebagai proses

bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya (Eriyanto, 2004: 252-253).

Kedua konsep dipadukan oleh Pan dan Kosicki dengan konsep bahwa dalam mengkonstruksi realitas wartawan tidak hanya menggunakan konsepsi yang ada dalam pikirannya saja sebab dalam proses konstruksi itu akan melibatkan nilai sosial yang melekat pada diri wartawan. Nilai-nilai sosial yang tertanam itu akan mempengaruhi realitas itu dipahami. Selain itu dalam menulis dan mengkonstruksi berita wartawan tidak berhadapan dengan publik yang kosong. Bahkan ketika peristiwa ditulis dan kata mulai disusun, khalayak menjadi pertimbangan bagi wartawan. Hal ini karena wartawan bukan menulis untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dinikmati dan dipahami oleh pembaca. Berbagai perangkat bahasa serta simbol yang digunakan dalam menuliskan sebuah berita berpengaruh terhadap makna yang dihasilkan. Framing model Zhongdang Pan dan Kosicki terdiri dari empat struktur besar: 1) struktur sintaksis, 2) struktur skrip, 3) struktur tematik, 4) struktur retroris (Eriyanto, 2004: 255).

Keempat struktur besar tersebut dapat digambarkan ke dalam bentuk skema sebagai berikut (Eriyanto, 2004: 256):

Tabel 1
Kerangka Framing Menurut Pan dan Kosicki
Sumber: Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi,
dan Politik Media

No	Struktur	Perangkat <i>Framing</i>	Unit yang diamati
1.	SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.</i>
2.	SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5 W+1H
3.	TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
4.	RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik.

a. Sintaksis

Dalam pengertian umum, sintaksis adalah cara wartawan menyusun berita. Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati melalui bagan berita (*headline* yang dipilih, *lead* yang dipakai, latar informasi yang

dijadikan sandaran, sumber atau kutipan yang diambil, penutup merupakan satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Bagian tersebut tersusun kedalam bentuk yang tetap dan teratur sehingga membentuk skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta hendak disusun. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah struktur piramida terbalik. Sintaksis menunjukkan bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa (Eriyanto, 2004: 257).

Headline. Aspek sintaksis dari wacana berita dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi dan menunjukkan kecenderungan berita. Pembaca biasanya lebih mengingat *headline* dari pada bagian berita yang lain. *Headline* mempunyai fungsi framing yang kuat dengan mempengaruhi bagaimana realitas dimengerti dengan menekankan makna tertentu (Eriyanto, 2004: 257-258).

Lead. Merupakan pengantar sebelum masuk kedalam isi berita. *Lead* bisa menjadi penjelas atau perinci *headline* dan bisa juga menggambarkan latar berita. Fungsi *lead* dalam latar berita adalah memberikan sudut pandang berita dan menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan (Eriyanto, 2004: 258).

Latar. Merupakan berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan.

Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa (Eriyanto, 2004: 258).

Kutipan. Penulisan kutipan sumber bertujuan untuk membangun objektivitas. Kutipan pun dipakai untuk menjelaskan bahwa apa yang ditulis dalam berita bukan sekedar pendapat wartawan, melainkan pendapat dari narasumber yang mempunyai otoritas tertentu. Pengutipan sumber menjadi penanda framing dalam tiga hal. *Pertama*, mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Wartawan bisa jadi mempunyai pendapat tersendiri atas suatu peristiwa, pengutipan itu digunakan hanya untuk member bobot atas pendapat yang dibuat, bahwa pendapat itu tidak omong kosong tetapi didukung oleh ahli yang berkompeten. *Kedua*, menghubungkan poin tertentu yang dihubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. *Ketiga*, mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak menyimpang (Eriyanto, 2004: 259).

b. Skrip

Struktur berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan fakta kedalam berita. Dalam hal ini berita tampak seperti kisah dengan awal, adegan, klimaks sampai akhir. Bentuk umum skrip 5W+1H (*Who, What, Where, When, Why, dan How*) yang kelengkapannya dapat mempengaruhi makna berita. Bahkan wartawan mempunyai cara bercerita agar beritanya dapat menarik pembaca. Skrip member tekanan mana yang didahulukan dan mana yang disembunyikan (Eriyanto, 2004: 260-261).

c. Tematik

Bagi Pan dan Kosicki, berita mirip sebuah pengujian hipotesis: peristiwa diliput, sumber yang dikutip dan pernyataan yang diungkapkan, semuanya digunakan untuk memberi dukungan logis bagi hipotesis yang dibuat. Pengujian hipotesis ini bisa disamakan dengan struktur tematik berita yakni bagaimana fakta itu ditulis dan ditempatkan kedalam teks berita secara keseluruhan sehingga mendukung tema yang dimiliki wartawan.

Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat

yang membentuk teks secara keseluruhan (Eriyanto, 2004: 262).

Beberapa perangkat tematik adalah sebagai berikut:

- 1) *Koherensi*, yaitu menyangkut pertalian antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta berbeda dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seorang wartawan menghubungkannya. Ada beberapa macam koherensi. *Pertama*, koherensi sebab akibat, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai akibat atau sebab dari kalimat yang lain. Biasanya dihubungkan dengan kata penghubung “sebab” atau “karena”. *Kedua*, koherensi penjelas, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai penjelas dari kalimat yang lain. Biasanya ditandai dengan kata hubung “dan” atau “lalu”. *Ketiga*, koherensi pembeda, proposisi atau kalimat satu dipandang kebalikan atau lawan dari proposisi atau kalimat lain. Biasannya dihubungkan dengan kata penghubung “dibandingkan” atau “sedangkan” (Eriyanto: 2004: 263-264).

- 2) *Kata Ganti*, yaitu menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana. Bertujuan memanipulasi dengan menciptakan imajinasi (Eriyanto: 2004: 263).
- 3) *Bentuk Kalimat*, yaitu hal yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Dengan kausalitas dalam bahasa diwujudkan dalam subjek dan predikat (Eriyanto: 2004: 263).
- 4) *Detail*, yaitu yang berhubungan dengan pengendalian informasi yang dikemukakan komunikator. Informasi yang menguntungkan diri komunikator akan ditampilkan lebih besar. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan mendapat porsi yang lebih sedikit atau dihilangkan sama sekali (Eriyanto: 2004: 263).

d. Retoris

Struktur retorik dalam wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang ditonjolkan oleh wartawan. Berfungsi untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi-sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan pada suatu berita. Struktur retorik juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran (Eriyanto: 2004: 264).

Elemen struktur retorik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) *Leksikon*: merupakan pemilihan atau pemakaian kata-kata tertentu untuk menggambarkan peristiwa. Pemilihan ini tidak dilakukan secara kebetulan, tetapi secara ideologis untuk menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta (Eriyanto: 2004: 264).
 - 2) *Metaphor*: kiasan yang mempunyai persamaan sifat dengan benda atau hal yang bisa dinyatakan dengan kata atau frase. Dipakai tidak hanya untuk “ornamen” berita, tetapi juga untuk mendukung dan menekankan pesan utama yang disampaikan (Eriyanto: 2004: 265).
 - 3) *Grafis*: diwujudkan dalam bentuk variasi huruf (ukuran, warna dan efek), *caption*, grafik, gambar, tabel, foto dan data lainnya. Termasuk juga penempatan dan ukuran judul (dalam kolom). Elemen grafik memberikan efek kognitif dan menunjukkan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus difokuskan (Eriyanto: 2004: 266).
 - 4) *Gaya*: menunjukkan pada kemasan bahasa tertentu dalam penyampaian pesan untuk menimbulkan efek tertentu pada khalayak (Eriyanto: 2004: 266).
- Teori di atas penulis gunakan untuk menganalisis berita seputar kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi

Dolly di media massa. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui bagaimana surat kabar harian Republika dan Kompas memframing berita di media massa.

F. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini sistematis, penulis akan membagi penelitian ini menjadi lima bab. Setiap bab merepresentasikan isi dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dengan begitu akan tergambar secara jelas kemana arah dan tujuan penelitian ini. Sistematika skripsi ini yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pokok bahasan dalam bab ini adalah: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Pokok bahasan dalam bab ini media massa yaitu meliputi: pengertian media massa, karakteristik media massa, fungsi dan peran media massa. Surat kabar meliputi: pengertian surat kabar, karakteristik surat kabar, fungsi surat kabar dan Berita yang meliputi: pengertian berita, jenis-jenis berita dan unsur-unsur nilai berita.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi: profil surat kabar harian Republika dan Kompas, gambaran umum pemberitaan surat kabar harian Republika dan Kompas Tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMBERITAAN KASUS PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI DOLLY.

Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi: analisis framing pada surat kabar harian Republika dan Kompas, *frame* pemberitaan pada surat kabar harian Republika dan Kompas mengenai pemberitaan kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan saran berisi tentang tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG MEDIA MASSA, SURAT KABAR DAN BERITA

A. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Kata media berasal dari bahasa latin “*medius-medium*” (tunggal) “media” (jamak) yang secara harfiah berarti: (1) pertengahan, (2) perantara, (3) perhubungan, (4) pengantar, (5) alat jalur, (6) pusat (Kasman, 2010: 48).

Media adalah institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan untuk mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju (Kasman, 2010: 50).

Dalam abad modern seperti ini, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisah-pisahkan lagi dari kebutuhan komunikasi dan media massa sebagai sarana tercapainya komunikasi tersebut. Dalam kaitannya ini B. Aubrey Fisher memberikan istilah komunikasi bermedia. Menurutnya hal ini adalah untuk membedakan secara jelas antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa (Fisher, 1986: 170).

J.B. Wahyudi memberikan definisi media sebagai sarana untuk “menjual” informasi atau berita kepada konsumen yang dalam hal ini dapat berupa pembaca,

pendengar, maupun pemirsa, yang mana lazim disebut *audience* (Wahyudi, 1991: 55).

Dja'far H. Assegaf mengartikan (1983: 129) media massa sebagai sarana penghubung dengan masyarakat seperti surat kabar, majalah, buku, radio dan televisi. Drs. Jalaludin Rahmat, menyebutkan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media massa cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Rahmat, 1999: 189).

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, media massa digunakan dalam proses komunikasi yang dilakukan secara masal dengan menggunakan media teknologi komunikasi massa.

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang direpresentasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2004: 31). Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya media massa berada di dua posisi, dalam pengertian bahwa ia dapat memberikan pengaruh “positif” maupun “negatif”.

2. Karakteristik Media Massa

Untuk suksesnya komunikasi massa kini kita perlu mengetahui sedikit banyak ciri komunikasi itu, yang meliputi sifat-sifat unsur yang mencakupnya. Onong Uchjana Effendi (2006: 52), memberikan lima ciri-ciri diantaranya:

a. Sifat Komunikatif

Komunikasi ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar dan heterogen. Ciri khas dari komunikasi melalui media massa ini ialah pertama, bahwa jumlah yang besar itu hanya dalam periode waktu yang singkat saja. Kedua, komunikasi massa sifatnya heterogen. Selain itu komunikator tidak tahu apa pesan yang disampaikan menarik perhatian atau tidak.

b. Sifat Media

Sifat media massa adalah cepat. Artinya memungkinkan pesan yang disampaikan kepada begitu banyak orang dalam waktu yang cepat.

c. Sifat Pesan

Sifat pesan media massa lebih umum. Media massa merupakan sarana menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi massa bersifat umum, maka lingkungannya menjadi universal, mengakui segala hal dan dari berbagai tempat.

d. Sifat Melembaga

Karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka komunikator dalam media massa, seperti wartawan, sutradara, penyiar radio, penyiar TV adalah komunikator terlembaga. Media massa merupakan organisasi yang kompleks. Pesan-pesan yang sampai kepada khalayak adalah hasil kerja kolektif. Oleh karena itu, berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan berbagai faktor yang terdapat dalam organisasi media massa. Berita yang disusun oleh wartawan tidak akan sampai kepada pembaca kalau tidak dikerjakan oleh redaktur, lay out, juru cetak dan karyawan lain dalam organisasi surat kabar tersebut

e. Sifat Efek

Sikap komunikasi melalui media massa yang timbul pada komunikan bergantung pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Komunikasi tersebut bertujuan agar komunikan berubah sikap dan pandangannya, atau komunikan berubah tingkah lakunya.

3. Fungsi dan Peran Media Massa

Sebagaimana diketahui bahwa setiap institusi mempunyai fungsinya sendiri. Demikian pula dengan media massa. J.B. Wahyudi dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Jurnalistik* (1991: 91-93), memberikan

keterangannya berkaitan dengan fungsi media massa, walaupun pada hakekatnya jenis media massa yang satu dengan yang lain berbeda, namun pada prinsipnya media massa memiliki lima fungsi yang sama, antara lain:

a. *The surveillance of the environment*

Yakni mengamati lingkungan atau dengan kata lain perkataan berfungsi sebagai penyaji berita atau penerangan. Dalam hal ini media massa harus memberikan informasi yang objektif kepada pembaca mengenai apa yang terjadi di dunia. Dalam kaitan ini fungsi utama media massa adalah sebagai penyebar informasi atau pemberitaan kepada khalayak.

b. *The correlation of the parts of society in responding to the environment*

Artinya bahwa media massa berfungsi sebagai sarana pemberitaan yang ada dilingkungannya, juga mengadakan korelasi antara informasi yang diperoleh dengan kebutuhan khalayak sasaran, karenanya pemberitaan atau komunikasi lebih menekankan pada seleksi, evaluasi dan interpretasi.

c. *The transmission of the social heritage from one generation to the next.*

Sebagai penyalur aspirasi nilai-nilai atau warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Atau dengan kata lain perkataan sebagai penyampai seni budaya dan

penunjang pendidikan dapat dikatakan bahwa di negara-negara berkembang yang rakyatnya belum maju, komunikasi dalam banyak hal merupakan sarana pembelajaran.

d. *Entertainment* (Hiburan)

Radio, televisi, surat kabar maupun majalah mempunyai fungsi hiburan bagi khalayak. Radio dengan audionya yang banyak menyiarkan acara musik, sandiwara dan lain sebagainya. Televisi kekuatan audio visualnya mampu memberikan hiburan yang cukup lengkap, selain itu media massa ini merupakan sarana hiburan yang relatif murah.

e. *To sell goods for us* (Iklan)

Peran radio, televisi dan film mempunyai fungsi penyalur iklan yang efektif. Radio, yang menyalurkan pesan melalui audio (suara), tetapi mempunyai daya jangkau yang relatif besar. Televisi selain mempunyai daya jangkau yang relatif besar juga mempunyai daya rangsang yang sangat tinggi, karena audio visual sinkron dengan hidup. Film, karena disajikan dengan audio visual yang memiliki daya jangkau yang relatif kecil namun memiliki daya rangsang yang cukup tinggi.

Peran media massa di negara berkembang dan negara maju terdapat perbedaan. Di negara berkembang peran pers lebih menunjuk pada peran yang membangun untuk memberi

informasi, mendidik dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Rachmadi, 1990: 17).

Peran media massa adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat

Peran media massa adalah sebagai agen perubahan (*agent of change*), demikian kata Wilbur Schramm, letak peranannya adalah membantu menciptakan proses peralihan masyarakat tradisional ke modern. Media massa sebagai agen perubahan mempunyai tugas memperluas cakrawala pandangan, memusatkan perhatian khalayak dengan pesan-pesan yang ditulisnya, menumbuhkan aspirasi, menciptakan suasana membangun (Rachmadi, 1990: 17).

- b. Sebagai pembentuk pendapat umum

Peran media massa selain melakukan pemberitaan kepada masyarakat juga berperan dalam membentuk pendapat umum. Bahkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat. Hal ini didasarkan bahwa selain isi pesan media massa memuat berita atau uraian berita, lembaga media massa yang kesemuanya itu isi pesannya bersifat umum sehingga dapat menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Pro dan kontra inilah yang disebut sebagai pendapat umum (Rachmadi, 1990: 18).

B. Surat Kabar

1. Pengertian Surat Kabar

Media massa secara umum dibagi menjadi dua jenis yakni media cetak dan media elektronik (Darmanto, 2005: 66). Media massa cetak adalah media yang terdiri dari lembaran kertas yang tertulis dengan sejumlah kata, kalimat, gambar, dan wacana yang ditata rapi berisikan berbagai macam informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hiburan, tips, lapangan pekerjaan, bisnis, opini, promosi dan mengenai kejadian di dalam dan luar Negara. Contoh media massa cetak yaitu: surat kabar, majalah, tabloid, *Newsletter* dan buletin. Sarana komunikasi yang menggunakan peralatan elektronik sebagai perantara dalam menyampaikan informasi disebut media massa elektronik. Contoh media massa elektronik yaitu: televisi, radio, *handphone*, internet dan komputer (adexshare.blogspot.com, diakses 16 April 2015).

Surat kabar atau koran secara leksikal berarti lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom yang terbit setiap hari atau secara periodik (DEPDIKBUD, 1995: 525).

Kehidupan media cetak ditentukan oleh “kondisi dimana ia hidup”, yakni: “sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan”. Media massa cetak amatlah dekat dengan hal itu. Tiap presiden mempunyai kekuasaan tertentu. Di fase Soekarno yaitu Orde Lama dan di fase Soeharto yaitu

Orde Baru. Pada intinya setiap sistem politik akan merubah sistem pers, secara sekaligus dan serentak, sesuai yang dikehendaki kekuasaan (Santana, 2005: 85).

Deddy N. Hidayat (dalam Rahabeat, 2004: 167) menyebutkan bahwa perubahan diri pers menjelang lengsernya Soeharto bukanlah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, namun bagian dari proses panjang dinamika industri media di tanah air. Hal ini menandakan adanya hubungan yang erat antara industri pers dan kebijakan negara Orde Baru.

Perkembangan surat kabar menurut ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (dalam Santana, 2005: 87-88) bisa dilihat dari tiga fase, yaitu:

Fase pertama : fase para pelopor yang mengawali penerbitan surat kabar yang muncul secara sporadik dan secara gradual (berangsur-angsur) kemudian menjadi penerbitan yang regular, yang teratur waktu terbit dan materi pemberitaan serta khalayak pembacanya.

Fase kedua : pertumbuhan kemapanan jurnal-jurnal regular yang masih rentan terhadap berbagai tekanan masyarakat. Sistem otokrasi yang masih menguasai masyarakat membuat surat kabar kerap ditekan kebebasan menyampaikan laporan pemberitaannya. Penyensoran terhadap berbagai subyek materi informasinya kerap diterima surat kabar. Setiap pendirian surat kabar mesti memiliki izin (lisensi) dari berbagai pihak yang berkuasa. Semua itu

akhirnya mengurangi independensinya sebagai instrument media informasi. Ini bisa dilihat dari peristiwa 1 Oktober 1965 yang mana tentara di bawah kendali pemerintah melarang semua media cetak untuk terbit, tentara hanya memberi izin terbit kepada koran atau lembaga pemberitaan milik tentara.

Fase ketiga : masa penyensoran telah tiada namun berganti dengan berbagai bentuk pengendalian. Kebebasan pers memang telah didapat. Berbagai pemberitaan sudah leluasa disampaikan. Akan tetapi, sistem kapitalisasi industri masyarakat kerap jadi pengontrol. Ini dilakukan antara lain melalui pengenaan pajak, penyuapan, dan sanksi hukum yang dilakukan kepada berbagai media dan pelaku-pelakunya.

Berdasar itulah kemandirian surat kabar ditentukan masyarakat. Kebebasan pers diwarnai dengan kehidupan demokrasi.

2. Karakteristik Surat Kabar

Karakteristik surat kabar yaitu:

- a. Publisitas; surat kabar itu diperuntukkan untuk umum, karenanya berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum. Pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak yang tersebar di berbagai tempat, karena pesan tersebut penting untuk diketahui khalayak, atau menarik untuk khalayak pada umumnya. Dengan demikian semua aktivitas manusia

yang menyangkut kepentingan umum dan atau menarik untuk umum adalah layak untuk disebarluaskan.

- b. Universalitas; surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia.
- c. Aktualitas; merupakan kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak.
- d. Periodesitas; artinya pers (surat kabar) harus secara teratur, periodik, misalnya setiap hari, seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, atau tiga bulan sekali.
- e. Terdokumentasikan; dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa diantaranya dianggap penting oleh pihak-pihak tertentu untuk diarsipkan atau di buat kliping. Misalnya, karena berita atau artikel tersebut berkaitan dengan instansinya (Ardianto dan Erdinaya, 2004:104-106).

Di samping memiliki ciri khas, surat kabar juga mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Terekam, berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun dalam alinea, kalimat, dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf, yang dicetak pada kertas. Dengan demikian setiap peristiwa atau hal yang diberitakan

terekam dan dapat diulangkaji, bisa dijadi dokumentasi dan bisa dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu.

- b. Menimbulkan perangkat mental secara aktif, karena berita-berita yang dikomunikasikan kepada khalayak menggunakan bahasa dengan huruf yang tercetak “mati” di atas kertas, maka untuk dapat mengerti maknanya pembaca harus menggunakan perangkat mental secara aktif
- c. Pesan menyangkut kebutuhan komunikan, mengingat sifat surat kabar adalah satu arah (*one-way traffic communication*), maka pesan yang disampaikan harus dirancang untuk menarik perhatian pembaca dengan menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran sehingga dapat membangkitkan kebutuhan pribadi pembaca, dengan demikian pesan memberikan jalan untuk membangkitkan respon pembaca.
- d. Efek sesuai dengan tujuan, yang dirumuskan dengan pemberian informasi agar pembaca tahu, untuk membuat pembaca berubah sikap dan perilakunya serta untuk membuat pembaca meningkat intelektualitasnya. (Uchjana, 2006 : 155-157).

Demikianlah karakteristik dari surat kabar yang membedakan dengan media massa lainnya. Dari karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa media massa cetak (surat

kabar) harus selalu berpegang teguh pada identitas dirinya, karena dari karakteristik itulah lahir sebuah identitas.

3. Fungsi Surat kabar

Fungsi utama pers adalah melayani kebutuhan informasi masyarakat. Dalam keadaan ini, pers mempunyai dua posisi, yaitu sebagai media komunikasi dan lembaga sosial. Sebagai media komunikasi, pers merupakan perpanjangan tangan dan perluasan kemampuan jasmani dan rohani manusia, sehingga ia harus senantiasa mengikuti kemajuan teknologi komunikasi. Sedangkan sebagai lembaga sosial, pers merupakan bagian integral dari masyarakat, sehingga ia dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang terdapat dalam satu sistem sosial. Pengaruh paling utama pers menurut Pamela J. Shoemaker sebagaimana dikutip Fisher (1986 : 70) adalah pembentukan peta kognitif tentang dunia ini.

Sebagai lembaga sosial, pers sering dirumuskan sebagai sub sistem dari sistem sosial. Karena itu, pers selalu tergantung dan berkaitan erat dengan masyarakat di tempat pers itu berada. Salah satu implikasinya adalah pers harus beroperasi sesuai dengan kehendak masyarakat di tempat pers itu berada. Kehendak masyarakat ini, bisa dilihat dari keyakinan mereka tentang hakekat manusia, hakekat masyarakat dan negara, hubungan manusia dengan negara, serta hakekat pengetahuan dan kebenaran. (Fisher, 1986 : 71)

Terdapat empat fungsi utama surat kabar (pers) yang berlaku universal. Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap negara di dunia yang menganut paham demokrasi, yakni :

- a. Fungsi menyampaikan informasi (*to inform*). Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang pertama.
- b. Fungsi mendidik (*to educate*). Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung ilmu pengetahuan sehingga khalayak bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana dan berita.
- c. Fungsi menghibur (*to entertain*). Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar atau majalah untuk mengumbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, karikatur, tidak jarang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*) dan kadang-kadang tajuk rencana.
- d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*). Fungsi mempengaruhi yang menyebabkan surat kabar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar ini terdapat tajuk rencana dan artikel (Sumadiria, 2005: 32-34).

Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru mempunyai misimenyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat mencerdaskan rakyat Indonesia. Dari empat fungsi diatas, fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya (Ardianto, 2004: 104).

C. Berita

1. Pengertian Berita

Secara sosiologis berita adalah semua hal yang terjadi di dunia, seperti yang dilukiskan oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, namun tidak semua fakta merupakan berita. Berita hanya orang-orang, tetapi tidak semua orang bisa dijadikan berita (Sumadiria, 2005: 63).

Berita berasal dari bahasa *Sansekerta*, yaitu *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *write*, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita (Djuroto, 2002: 46). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta (2006 : 144) “berita” berarti kabar atau, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan

Balai Pustaka (1994 : 123), arti berita diperjelaskan menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Para ilmuwan, penulis dan pakar komunikasi memberikan definisi yang berbeda-beda tentang istilah berita, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang dikutip oleh Djuroto dari Dr. Williard C. Bleyer (dalam Djuroto, 2002: 47), bahwa berita adalah sesuatu yang aktual yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca.
- b. Pendapat lain dikemukakan oleh Dean M. Lyle Spencer sebagaimana dikutip Djuroto (2002: 47) mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.
- c. Dja'far H. Assegaf mendefinisikan berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa (baru), yang dipilih oleh staf redaksi atau harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, karena luar biasa, pentingnya, akibatnya, atau karena ia mencakup segi-segi humor, emosi dan ketegangan (Djuroto, 2005: 7).
- d. Berita menurut Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media

berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on line* internet (Sumadiria, 2005 : 65).

Setelah merujuk kepada definisi-definisi diatas, meskipun berbeda-beda namun terdapat kesamaan yang mengikat pada berita, yaitu: menarik perhatian, luar biasa dan termasa (baru). Karena itu, dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta, menarik perhatian banyak orang, termasa (baru) yang dipilih oleh wartawan untuk disebarkan melalui media berkala seperti surat kabar, televisi, radio dan media *online*.

Untuk membuat berita, paling tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu 1), Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran tinggal sebagian saja. 2), Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap. Dalam menulis berita, dikenal semboyan “Satu masalah dalam satu berita”. Artinya, suatu berita harus dikupas dari satu masalah saja (*monofacta*) dan bukan banyak masalah (*multifacta*) karena akan menimbulkan kesukaran penafsiran, yang menyebabkan berita tidak sempurna (Djuroto, 2002 : 47-48).

2. Jenis-Jenis Berita

Dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *Elementary*, *Intermediate*, dan *Advance*. Berita *Elementary* mencakup berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*), dan berita menyeluruh (*comprehensive news report*).

Berita *Intermediate* meliputi laporan berita interpretatif (*interpretative news report*), dan laporan karangan khas (*feature story report*), sedangkan berita *Advance* meliputi berita laporan mendalam (*depth reporting*), laporan penyelidikan (*investigative reporting*) dan penulisan tajuk rencana (*editorial writing*) (Sumadiria, 2005: 69).

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa jenis berita tersebut:

a. *Straight news report*

Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya, jenis berita ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what*, *who*, *when*, *where*, *why*, dan *how* (5W+1H). Misalnya pemberitaan tentang seminar.

b. *Depth news report*

Depth new report merupakan yang sedikit berbeda dengan *straight news report*. Reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.

c. *Comprehensive news report*

Comprehensive news report merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari

berbagai aspek. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas.

d. *Interpretative report*

Berita interpretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Laporan interpretatif biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa.

e. *Feature story*

Dalam berita berbentuk *feature*, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya, tidak begitu menyajikan informasi yang penting untuk pembacanya. Penulis *feature* menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya (*style*) penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

f. *Depth reporting*

Depth reporting merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejenuhan pembaca.

g. *Investigative reporting*

Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Namun demikian, dalam laporan investigasi, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.

h. *Editorial writing*

Editorial writing merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum (Sumadiria, 2005 : 69-71).

3. Unsur-Unsur Nilai Berita

Setiap kejadian atau peristiwa tidak bisa dijadikan berita jurnalistik. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dalam masyarakat dapat diberitakan oleh surat kabar. Ini disebut sebagai kriteria layak berita, yaitu layak tidaknya suatu kejadian dalam masyarakat diberitakan oleh pers atau bernilainya kejadian tersebut bagi pers. Hal yang menjadikan suatu kejadian atau peristiwa sebagai layak berita adalah adanya unsur penting dan menarik dalam kejadian tersebut. Apa yang penting dan menarik pembaca haruslah terdapat dalam sebuah berita. Karena itu unsur-unsur yang dapat menarik perhatian pembaca disebutkan sebagai unsur nilai berita (Assegaf, 1983: 25-35)

Unsur-unsur nilai berita (*News Value*) yang dipakai dalam memilih berita adalah sebagai berikut:

- a. Aktualitas (*Timeliness*), yakni aktual atau terkini. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (*news*) yakni sesuatu yang baru (*new*).
- b. Nyata (*faktual*), yaitu informasi tentang segala fakta (*fact*) bukan fiksi atau karangan. Dalam pengertian ini juga terkandung pengertian bahwa sebuah berita harus mempunyai informasi tentang sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- c. Penting (*Significance*), artinya penting bagi banyak orang. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan pemerintah, kenaikan harga, dan lain-lain.
- d. Luas (*magnitude*), yaitu seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi khalayak. Contoh : Berita tentang kenaikan harga BBM lebih luas pengaruhnya terhadap seluruh masyarakat Indonesia ketimbang berita tentang gempa bumi di Jawa Tengah.
- e. Kedekatan (*proximity*) ; Stieler dan Lippmann (dalam Kusumaningrat, 2005 :62) menyebutkan bahwa maksudnya adalah kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik seperti yang disebutkan Stieler dan Lippmann, tetapi juga

kedekatan emosional. Contoh : Bagi warga Jawa Barat, berita tentang gempa bumi di Bandung lebih menarik ketimbang berita tentang gempa bumi di Surabaya.

- f. Keterkenalan (*prominence*) ; berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, tersohor, selebriti, figur publik. Orang-orang penting, orang-orang terkemuka, dimana pun selalu membuat berita.
- g. Akibat (*impact*) ; berita adalah sesuatu yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat.
- h. Human *Interest* ; dalam berita, hendaknya terkandung unsur yang menarik empati, simpati, atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya.
- i. Konflik (*conflict*) ; berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan, merupakan sumber berita yang tak pernah kering dan tak akan pernah habis (Kusumaningrat, 2005:61-66).

Sebuah berita dapat menampilkan sebuah nilai berita dan dapat pula merangkum beberapa nilai berita dalam satu tulisan yang menjadi layak berita.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Surat Kabar Republika

1. Sejarah dan Perkembangannya

Surat kabar harian Republika dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa pembaca Republika mewakili golongan umat Muslim di Indonesia atau biasa juga disebut sebagai “Koran Hijau”. Berdasarkan pengamatan, harian Republika yang pantas mewakili masyarakat pembaca karena dilihat dari populasi penduduk orang Muslim di Indonesia menjadi penganut terbesar (Kasman, 2010:168).

Republika muncul dengan latar belakang sosial politik dimana politik Islam yang diwakili oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Nama Republika sendiri berasal dari ide Presiden kedua di Indonesia yaitu Soeharto yang disampaikannya saat beberapa pengurus ICMI melaporkan rencana pendirian harian tersebut (Rakhmat, 1998:101-102).

Suf Kasman dalam bukunya yang berjudul *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia* (2010:169) menjelaskan, kelahiran Republika diawali dengan diselenggarakannya seminar tentang pers Islam oleh ICMI pada tanggal 28 November 1991. Seminar ini merekomendasikan agar muncul media Islam yang cukup kuat baik dari segi pengaruh sosial politik maupun dari aspek bisnis untuk mengatasi

ketimpangan pers Islam sebelumnya. Harapan itu menjadi kenyataan dengan lahirnya Surat Kabar Harian Republika pada 4 Januari 1993.

Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemaslahatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta (Republika, 2015:6).

Republika mencoba untuk mengedepankan misi Islam dalam sebuah negara yang sangat *state centered* (yang sangat sentralistik/otoriter). Dalam konteks jurnalisme, Republika menerapkan kaidah pemberitaan yang profesional tanpa meninggalkan misi keislaman. Islam ditampilkan secara *sublim* (mulia) dan *subtil* (lembut) dalam berita-beritanya yang diibaratkan nafas, tidak terlihat namun terasa. Artinya, Republika mencoba untuk menampilkan Islam secara substansial dalam sajian isi beritanya dan berusaha agar produknya tidak hanya ditujukan untuk mendukung partai politik atau orang saleh belaka tetapi untuk orang-orang yang belum mantap imannya. Berdasarkan landasan itulah Republika mrmuat secara teratur artikel-artikel mengenai seni, televisi, sastra dan *trend mode* yang menarik bagi Muslim yang menjadi pembacanya (Kasman, 2010:169-170).

Dari segi teknologi, Republika mencoba menerapkan teknologi surat kabar terkini. Diantaranya dengan menerapkan teknologi Cetak Jarak Jauh (CJJ) mulai diterapkan Republika pada bulan Mei 1997 di Solo. Republika juga menjadi pelopor media cetak yang mengembangkan media *online* bernama *Republika online* alamat webnya yaitu www.republika.co.id.

Surat kabar Republika hadir setiap hari di tengah pembacanya dengan empat komponen isi, yaitu *news slection* (berita harian), suplemen koran daerah, suplemen tentang tokoh-tokoh Islam dan gerakan Islam (contohnya laporan tentang Soekarno, Muhammad Hatta, Hamka, Muhammad Natsir dan sebagainya) dan suplemen berciri layanan publik seperti Pendidikan, Medika, Otomotif, Dialog Jum'at dan Belanja.

Untuk berita harian (*news slection*), Republika menyajikannya dalam rubrik-rubrik seperti: *Hikmah*, *Rehat (pojok)*, *Ekonomi Bisnis*, *Tajuk*, *Opini*, *Suara Publika*, *Olahraga*, *Internasional*, *Nasional*, *Iptek* dan *Resonansi*. Citra sebagai koran Komunitas Islam berusaha ditampilkan tulisan dan berita yang ditulis dalam perspektif Islam dan kaum Muslimin (Kasman, 2010:174). Rubrik yang menjadi ciri khas “keislaman” Republika setiap terbit adalah rubrik *Hikmah*.

Meskipun usia harian Republika masih seumur jagung, dimana penerbitan perdana terbit pada tanggal 4 Januari 1993 namun tetap mampu bersaing serta merebut

pangsa pasar. Dari segi prospek dan potensi pembacanya, pelanggan harian Republika cukup luas dan telah menyebar keseluruh kota-kota di tanah air, sehingga *image* bahwa harian umum Republika sebagai surat kabar pembawa aspirasi umat Islam cukup jelas dan kental, hal ini dibuktikan dengan besarnya pelanggan Republika adalah umat Islam mencapai 99% dan motivasi berlangganan untuk memajukan surat kabar yang menyalurkan aspirasi keagamaan (Kasman, 2010:174-175).

“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan motto harian Republika yang didasarkan pada kehendak untuk mewujudkan media massa yang mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas. Adanya tujuan yang ingin dicapai searah dengan tujuan dan cita-cita program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang terbentuk pada tanggal 7 Desember 1990. Adanya tujuan dan cita-cita ICMI maka pada tanggal 17 Agustus 1992 dibentuklah Yayasan Abdi Bangsa dengan mengarahkan pada tiga program pokok, (1) pengembangan *Islamic Center*, (2) pengembangan CIDES (*Center for Information and Development Studies*), (3) penerbitan Harian umum Republika (Kasman, 2010:175-176).

2. Visi dan Misi

a. Visi Republika

Adapun visi dan misi Harian Republika adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Harian Republika sebagai koran umat Islam yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan Bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *Rahmatan Lil Alamin*”.
[http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar,2015\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar,2015)).

Visi: Sikap Umum: (1) menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*; (2) membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat; (3) mengkritisi tanpa menyakiti; (4) mencerdaskan, mendidik, dan mencerahkan; (5) berwawasan kebangsaan (Kasman, 2010:141).

b. Misi Republika

Politik:

- 1) Mengembangkan demokrasi;
- 2) Optimalisasi peran lembaga-lembaga Negara;
- 3) Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat;
- 4) Mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik;
- 5) Penghargaan terhadap hak-hak sipil;
- 6) Mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih.

Ekonomi:

- 1) Mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi;
- 2) Mempromosikan profesionalisme;

- 3) Berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dan pengaruh globalisasi;
- 4) Pemerataan sumber-sumber daya ekonomi;
- 5) Mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis;
- 6) Mengembangkan ekonomi syariah;
- 7) Berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi (UMKMK).

Budaya:

- 1) Kritis-apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat;
- 2) Mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan, dan mempertajam kepekaan nurani;
- 3) Menolak bentuk-bentuk kebudayaan/kesenian yang menolak moral, akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan;
- 4) Menolak pornografi dan pornoaksi.

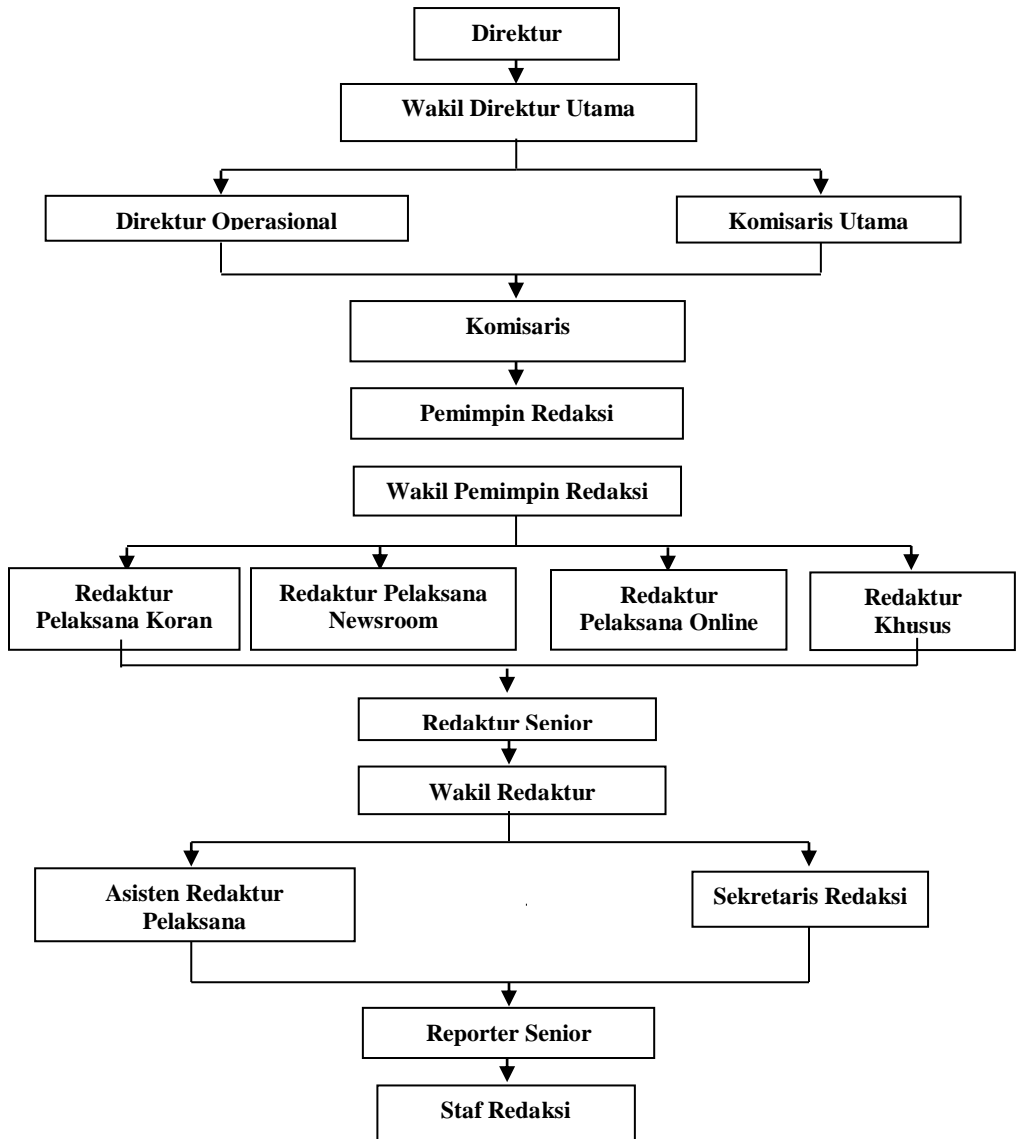
Agama:

- 1) Mensyiarkan Islam;
- 2) Mempromosikan semangat toleransi;
- 3) Mewujudkan “Islam *rahmatan lil alamin*” dalam segala bidang kehidupan;
- 4) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat.

Hukum:

- 1) Mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum;
- 2) Menjunjung tinggi supremasi hukum;
- 3) Mengembangkan mekanisme *checks and balances* pemerintah-masyarakat;
- 4) Menjunjung tinggi HAM;
- 5) Mendorong pemberantasan KKN secara tuntas (Kasman, 2010:141-142).

3. Struktur Redaksi Republika



Gambar 1

Struktur Redaksi Surat Kabar Harian Republika

Keterangan:

Direktur Utama

Erick Thohir

Wakil Direktur Utama

Maria Rahardjo Djarot

Direktur Operasional

Arys Hilman Nugraha

Komisaris Utama

Adi Sasono

Komisaris

R Harry Zulnardy, Adrian Syarkawi, Rudi Setia Laksmana

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Nasihin Masha

Wakil Pemimpin Redaksi

Irfan Junaidi

Redaktur Pelaksana Koran

Subroto

Redaktur Pelaksana Newsroom

Elba Damhuri

Redaktur Pelaksana Online

Maman Sudiaman

Redaktur Khusus

Ikhwanul Kiram Mashuri

Redaktur Senior

Agung P Vazza

Wakil Redaktur Pelaksana

Firkah Fansuri, Nur Hasan Murtiaji, Kumara Dewata Sari

Asisten Redaktur Pelaksana

Heri Ruslan, Johar Arief, Priyantono Oemar, Joko Sadewo,

Wulan Tunjung Palupi, Stevy Maradona, EH Ismail

Sekretaris Redaksi

Hamidah Sagaf

Reporter Senior

Harur Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami,

Selamat Ginting, Siwi Tri Puji Budiwiwati, Rakhmat Hadi

Sucipto.

Staf Redaksi

Alwi Shahab, Syahrudin El-Fikri, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Anjar Fahmianto, Asep K Nurzaman, Budi Raharjo, Chairul Akhmad, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Endro Yuanto, Ferry Kisihandi, Fitriyanti Zamzami, Heri Purwata, Indra Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, Khoirul Azwar, Nashih Nasrullah, Natalia Endah Hapsari, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Musiron, Ratna Puspita, Reiny Dwinanda, R Hiru Muhammad, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Yeyen Rostiyani, Yogi Ardhi Cahyadi, Zaky Al Hamzah, Edwin Dwi Putranto, Abdullah Sammy, Agus Raharjo, Ahmad Islamy Jamil, Amri Amrullah, Ani Nursalikhah, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Bowo Pribadi, Citra Listya Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan, Desy Susilawati, Djoko Suceno, Dwi Murdaningsih, Dyah Ratna Meta Novia, Edi Setyoko, Eko Widiyanto, Erdy Nasrul, Erik Purnama Putra, Esthi Maharani, Fernan Rahadi, Friska Yolandha, Ichsan Emerald Alamsyah, Indah Wulandari, Irfan Fitrat Pribadi, Lilis Sri Handayani, Mansyur Fakihi, Mohammad Akbar, Muhammad Akbar Wijaya, Muhammad Fachruddin, Mutia Ramadhani, M Hafil, Nani Ridarineni, Nur Aini, Qommara Rostanti, Rusdy Nurdiansyah, Satya Festiani, Setyanavidita Livikacansera, Yulianingsih, Tahta Aidilla, Agung Supriyanto, Wihdan Hidayat, Bambang Noroyono, Gita Amanda Jatnikawati, Adi Wicaksono, Angga Indrawan, M Iqbal, Satria Kartika Yudha, Ira Sasmita, Rizky Jaramaya, Aldian Wahyu Ramadhan, Gilang Akbar Prambadi, Rr Laeny Sulistyawati, Nora Azizah, Aghia Khumaesi, Lida Puspaningtyas, Dessy Suciati Saputri, Ratna Ajeng Tejomukti, Reja Irfa Widodo, Wahyu Syahputra, Fuji Pratiwi, Andi Muhammad Ikhbal, Halimatus Sa'diah, Mas Alamil Huda, Sadly Rahman, Agung Sasongko, Hazliansyah, Yudha Manggala Priana Putra, M Amin Madani, Julkifli Marbun, Niken Paramita Wulandari, Fian Firatmaja, Maspril Aries(Palembang), Ahmad Baraas(Bali).

Alamat Redaksi: JL. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Telepon: 021.7803747(Hunting), 021.79184744(Iklan), Fax: 021.780 0649, 7983623 (Redaksi),

021.7981169 (Iklan), 021.79198442 (Sirkulasi dan Berlangganan).

Email Redaksi Republika: sekretariat@republika.co.id.

Alamat Perwakilan: Republika Jawa Barat: JL. Mangga No. 37 Bandung 40114, **Telepon:** 002.87243363-65, **Fax:** 002 727 1384

Republika DIY-Jateng & Jatim: JL. Perahu No. 4, Kota Baru, Yogyakarta, **Telepon:** 0274. 544.972, 566028, **Fax:** 0274. 541.582

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, **Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar:** Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2012 (Republika, edisi 10 Maret 2015).

B. Surat Kabar Kompas

1. Sejarah dan Perkembanganya

Surat kabar harian Kompas terbit pertama kali pada hari senin tanggal 28 Juni 1965. Harian ini diterbitkan oleh sejumlah wartawan yang pada saat itu telah cukup sukses menerbitkan majalah bulanan Intisari, mereka adalah Auyong Peng Koen atau Petrus Kanisius Ojong (P.K. Ojong) dan Jakob Oetama. Surat kabar Kompas dalam sejarah pers Indonesia menduduki tempat yang unik, karena Kompas hidup dalam tiga periode yang berlainan, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi (Kasman, 2010:146).

Akhmad Zaini Abar yang dikutip oleh Darmanto (2005:60), mengatakan bahwa pada pemerintahan di masa akhir 1960-an adalah periode terburuk bagi sejarah pers di Indonesia. Penguasa memandang pers semata-mata dari sudut kemampuannya dalam memobilisasi massa dan opini publik.

Pers seakan-akan dilihat seperti senapan yang siap menembakkan peluru (informasi) kearah massa atau khalayak yang tidak berdaya. Pers dianggap sebagai alat “revolusi” yang besar pengaruhnya untuk menggerakkan atau meradikalisasi massa untuk menyelesaikan sebuah revolusi.

Hadirnya surat kabar harian Kompas tidak lepas kaitannya dengan kelompok dan aktivis Katolik. Pada awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani (1922-1965) selaku Menteri/Panglima TNI-AD menelepon rekannya yang sekabinet, Drs. Frans Seda. Ia mendapatkan ide menerbitkan koran untuk membangkitkan semangat republik bagi rakyat juga tentara untuk melawan pers komunis (Kasman, 2010:152).

Frans Seda yang menjabat sebagai ketua partai Katolik sekaligus Menteri Perkebunan dengan di dukung oleh PK Ojong seorang editor mingguan *Star Weekly* tahun 1950-an dan Jakob Oetama editor pada Mingguan Katolik Penabur bekerja sama menerbitkan koran bernama “Bentara Rakyat”. Menjelang tebit Presiden Soekarno menganjurkan untuk memakai nama Kompas yang artinya petunjuk arah (Irwanto, 2012).

Maka jadilah nama harian Kompas hingga saat ini, sementara nama Yayasan Bentara Rakyat sebagai penerbit harian Kompas. Para pendiri Yayasan Bentara Rakyat adalah para pemimpin organisasi Katolik seperti: Partai Katolik,

Wanita Katolik, PMKRI, dan PK. Ojong. Pengurus yayasan terdiri dari Ketua: I.J. Kasimo, Wakil Ketua: Drs. Frans Seda, Penulis I: F.C. Palaunsuka, Penulis II: Jakob Oetama, dan Bendahara: PK. Ojong (Kasman, 2010:153).

Walaupun restu dari Presiden Soekarno, berkat dari Mgr. Soegijapranoto, dan bantuan pimpinan Angkatan Darat, proses izin terbit mengalami kesulitan. PKI dan kaki tangannya menguasai aparat, khususnya Departemen Penerangan Pusat dan Daerah. Tahap demi tahap rintangan dapat diatasi, pusat memberi izin prinsip namun harus dikonfirmasi ke Daerah Militer V Jaya. Persyaratan terakhir untuk dapat terbit, harus ada bukti 3.000 (tiga ribu) orang pelanggan. Frans Seda punya inisiatif mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, anggota-anggota koperasi Kopra Primer di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur. dalam waktu singkat daftar 3.000 pelanggan lengkap dengan alamat dan tanda tangan terkumpul. Bagian perizinan Poskodam V Jaya menyerah dan mengeluarkan izin terbit. Pers PKI yang melihat kehadiran Kompas bereaksi keras, bahkan mulai menghasut masyarakat dengan menggantikan Kompas sebagai “Komando Pastor” (Kasman, 2010:153).

Meskipun Kompas dilahirkan oleh kalangan Katolik, tetapi Kompas tidak memosisikan diri sebagai surat kabar yang beraroma agama Katolik. Kompas bersifat terbuka dan

independen dengan segmen pembacanya yaitu kelas menengah, karena koran di Indonesia lebih banyak menandai kelas sosial seseorang. Kompas edisi pertama dicetak oleh PN Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Tepat 28 Juni 1965, Kompas lahir dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Berita utama di halaman satu berjudul “KAA II Ditunda Empat Bulan” sementara pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri “Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil” (<http://www.mosco.or.id/sejarah-harian-kompas-sebagai-pers-partai-katolik/>).

2. Visi dan Misi

a. Visi Kompas

“Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”

Dalam kiprahnya di industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui prinsip persatuan dalam perbedaan dengan menghormati individu demi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Secara spesifik prinsip tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka.

- 2) Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, golongan, dan ekonomi.
- 3) Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok.
- 4) Kompas merupakan koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa.
- 5) Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang kembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan(Kasman, 2010:160).

b. Misi Kompas

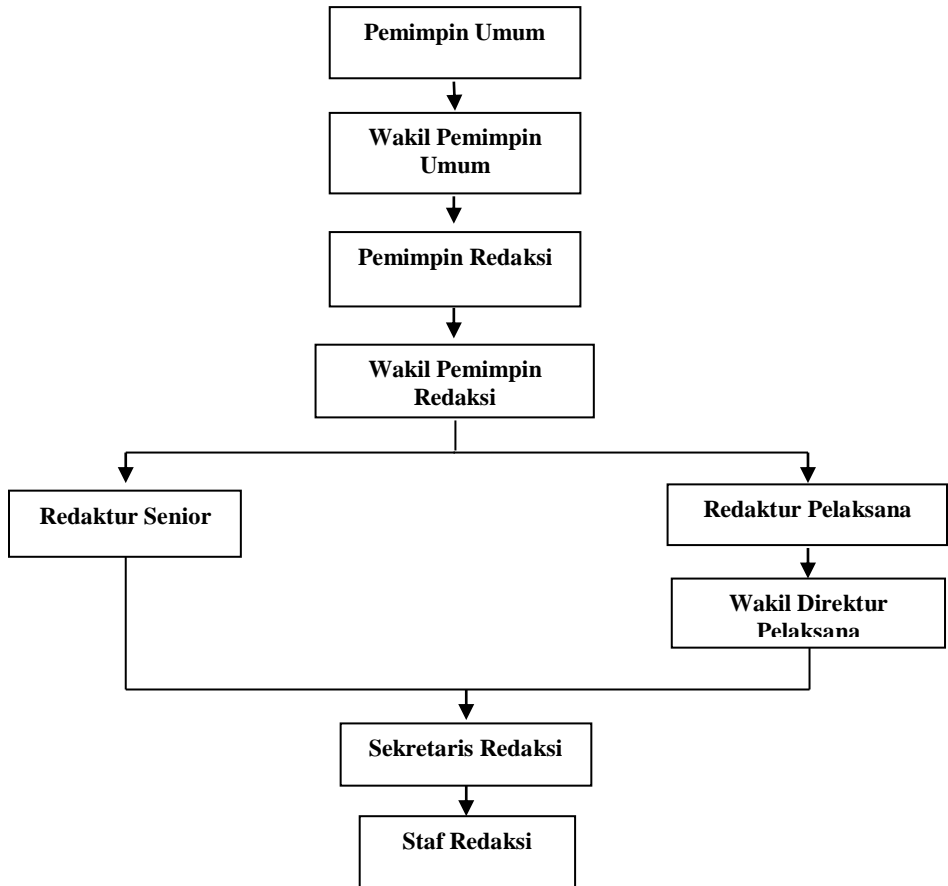
“Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (*Trend Setter*) dengan menyediakan dan menyebarkan informasi terpercaya”.

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dijabarkan dalam 4 sasaran operasional.

- 1) Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri-ciri yaitu: cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna;

- 2) Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dalam gaya yang kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan;
- 3) Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha menempatkan persoalan dengan penuh pertimbangan namun tetap kritis dan teguh pada prinsip;
- 4) Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan (Kasman, 2010:160-161).

3. Struktur Redaksi Kompas



Gambar 2
Struktur Redaksi Surat Kabar Harian Kompas

Keterangan:**Pemimpin Umum**

Jakob Oetama

Wakil Pemimpin Umum

Lilik Oetama, Rikard Bagun

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Budiman Tanuredjo

Wakil Pemimpin Redaksi

Trias Kuncahyono, Ninuk Mardiana Pambudy, James

Luhulima

Redaktur Senior

St. Sularto

Redaktur Pelaksana

Mohammad Bakir

Wakil Redaktur Pelaksana

Bambang Sigap Sumantri, Try Harijono, Subur Tjahjono,

Suttha Darmasaputra

Sekretaris Redaksi

Rusdi Amral, Mohammad Nasir

Staf Redaksi

Myrna Ratna M, Johnny T. Gunardi, Sri Hartati Samhadi, Banu Astoro, Suhartono, P. Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, A. Maryoto, Nasru Alam Aziz, Dahono Fitrianto, Gesit Ariyanto, Marcellus Hernowo, Johannes Waskita Utama Wisnu Nugroho, Indira Permana Sari S, S J. Osdar, Bre Redana, Maria Hartiningsih, Retno Bintari, Rene L. Pattiradjawane, Hariadi Saptono, Chris Pudjiastuti, Simon Saragih, Muhammad Subhan, A.F. Eko Warjono, Yesayas Oktavianus, Pieter P. Gero, Nugroho S. Yudho, Agnes Aristiarini, M. Supriyadi, Agus Hermawan, Frans Sartono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kusumaputra, Agus Mulyadi, Tjahja Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Ferry Santoso, Yovita Arika, Nasrullah Nara, Sonya Hellen Sinombor, Jannes Eudes Wawa, Imam Prihadiyoko, Adi Prinantyo, Danu Kusworo,

Yulia Saphthiani, Dewi Indriastuti, Antonius Tomy Trinugroho, Evy Rachmawati, Budi Suwarna, Hamzirwan, Neli Triana, Ilham Khoiri, Gunawan Setiadi, Diah Marsidi, Budiarto Shambazy, Hendry Ch. Bangun, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Brigitta Isworo Laksmi, AW Subarkah, Soelastri, Ratih P. Sudarsono, Pepih Nugroho, Arbain Rambey, Salomo Simanungkalit, C. Windoro A. T, Rakaryan Sukarjaputra, Eddy Hasby, Alif Ichwan, Clara Wresti, Korano Nicolash, L.M.S, Pascal S. Bin Sadju, Elok Dyah Messwati, Joice Tauris Santi, Ida Setyorini, Buyung Wijaya Kusuma, Pingkan Elita Dundu, Edha Caroline Pattisina, Osa Triyatna, Agus Susanto, Lusiana Indiasari, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivvaty, Luki Aulia, Iwan Setiyawan, Maria Susy Berindra A, Nur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Amir Sodikin, B. Josie Susilo Hardiato, Gatot Widakdo, Lasti Kurnia, M. Yuniadhi Agung Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Hermas Effendi Prabowo, Ester Lince Napitupulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathoni, Cyprianus Anto Saptowalyono, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Emilius Caesar Alexey, Ahmad Arif, Brigita Maria Lukita, Haryo Damardono, M. Zaid Wahyudi, Helena Francisca Nababan, Raditya Helabumi Jayakarna, Francisca Romana Ninik, Ambrosius Harto, Demitrius Wisnu Widianoro, Aryo Wisanggeni Genthong, C. Wahyu Haryo P, R. Benny Dwi Koestanto, Madina Nusrat, Sri Rejeki, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyambodo, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Ingki Rinaldi, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Ichwan Susanto, Aswin Rizal Harahap, Agustinus Handoko, Fx. Laksana Agung Saputra, M. Hilmi Faiq, Mukhamad Kurniawan, Yulfianus Harjono, Adhtya Ramadhan, Antonius Ponco Anggoro, Nina Susilo, Didit Putra Erlangga Rahardjo, Wawan Hadi Prabowo, Hendra Agus Setyawan, Antony Lee, Albertus Hendriyo Widi Ismanto, Mawar Kusuma Wulan Kuncoro Manik, Aris Prasetyo, Aloysius Budi Kurniawan, Harry Susilo.

Biro Kairo: Mustafa Abdurahman, **Biro Bandung:** Dedi Muhtadi, **Samuel Oktora**, Cornelius Helmy Herlambang,

Biro Sukabumi: Rony Ariyanto Nugroho, **Biro Cirebon:** Rini Kustiasih, **Biro Banten:** Dwi Bayu Radius, **Biro Semarang:** Winarto Herusansono, Amanda Putri Nugrahanti, P. Raditya Mahendra Yasa, **Biro Tegal:** Siwi Nurbiajanti, **Biro Purwokerto:** Gregorius Magnus Finesso, **Biro Solo:** Erwin Edhi Prasetya, **Biro Yogyakarta:** Thomas Pudjo Widijanto, Ferganata Indra Riatmoko, **Biro Magelang:** Regina Rukmorini, **Biro Surabaya:** Agnes Swetta Pandia, Dody Wisnu Pribadi, Bahana Patria Gupta, Dominicus Herpin Dewanto Putro, **Biro Lamongan:** Adi Sucipto, **Biro Malang:** Dahlia Irawati, Defri Werdiono, **Biro Sidoarjo:** Runik Sri Astuti, **Biro Jember:** Syamsul Hadi, **Biro Bayuwangi:** Siwi Yunita Cahyaningrum, **Biro Denpasar:** Cokorda Yudistira, Ayu Sulistyowati, **Biro Mataram:** Khaerul Anwar, **Biro Kupang:** Frans Sarong, Kornelis Kewa Ama, **Biro Manado:** Jean Rizal

KANTOR REDAKSI: JL. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 **TELEPON:** 534 7710/ 20/30, 530 2200 **FAX:** 548 6085/ 548 3581 **ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN)** P.O.BOX 4612 JAKARTA 12046, **ALAMAT KAWAT:** Kompas Jakarta **PENERBIT:** PT. Kompas Media Nusantara **SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS:** SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/ A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkamtibda No. 103/PC/1969 Tanggal 21 Januari 1969 **ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR:** No. 37/1965/11/A/2002 **PERCETAKAN:** PT Gramedia ISSN 0215-207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN (Kompas, Edisi 6 Maret 2015).

Pada penelitian ini penulis telah mengumpulkan berita-berita dari surat kabar harian Republika dan Kompas mulai tanggal 5 Juni-21 Juni 2014. Dibawah ini adalah tabel analisis Framing pada surat kabar harian Republika dan Kompas Edisi Juni 2014.

Tabel 2
Pemberitaan Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly
pada Surat Kabar Harian Republika dan Kompas

SURAT KABAR	EDISI	JUDUL BERITA
REPUBLIKA	5 Juni 2014	Warga Asli Sepakat Dolly di Tutup
	6 Juni 2014	Risma: Mayoritas Warga Dukung Dolly di Tutup
	10 Juni 2014	Warga Asli Dolly di Intimidasi
	13 Juni 2014	Jangan Ada Konflik di Dolly
	18 Juni 2014	Lokalisasi Dolly di Tutup
	20 Juni 2014	Dolly di Tutup, PSK Tetap Buka Praktik
	21 Juni 2014	Deklarasi Penutupan Dolly di Nilai Mandul
KOMPAS	5 Juni 2014	Cegah HIV, Penutupan Dolly di Percepat
	6 Juni 2014	Penghuni Dolly Mengadu ke Presiden
	10 Juni 2014	Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha
	13 Juni 2014	Komnas HAM: Dialog Perlu Ditingkatkan
	18 Juni 2014	Polisi Jamin Keamanan Penutupan Dolly
	20 Juni 2014	Uang Kompensasi Dibagikan Penutupan Dolly Tetap Ditolak
	21 Juni 2014	Proses Rehabilitasi Bekas Lokalisasi Butuh Waktu

BAB IV

ANALISA DATA PENELITIAN

Analisis framing adalah upaya media untuk menonjolkan pemaknaan atau penafsiran atas suatu peristiwa. Analisis framing dengan menggunakan model yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki lebih menekankan pada wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan yang dikonstruksikan. Analisis dilakukan ketika penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan secara strategis dari sisi kata, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik dan perangkat lain memperjelas sebuah berita (Eriyanto, 2002: 254). Proses menganalisis berita menggunakan analisis framing yang mempunyai empat perangkat framing yaitu, struktur sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Keempat struktur ini peneliti gunakan dalam menganalisa berita dari Surat Kabar Harian Republika dan Surat Kabar Harian Kompas.

Adapun berita-berita di surat kabar Kompas dan Republika mengenai penutupan lokalisasi prostitusi Dolly sebanyak 7 berita, masing-masing dimuat pada tanggal 5, 6, 10, 13, 18, 20 dan 21 Juni 2014.

A. Analisis Framing Pemberitaan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly di Surat Kabar Harian Republika.

1. Pertama, berita dengan judul: Warga Asli Sepakat Dolly Ditutup, terbit pada hari Kamis, 5 Juni 2014.

Adapun teks berita pertama adalah sebagai berikut:

SURABAYA-Warga asli sekitar lokalisasi prostitusi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, sepakat apabila lokalisasi tersebut ditutup secara permanen. Lilik Rumiati, warga di lokalisasi yang tinggal di Putat Jaya Barat, mengatakan, warga asli di sekitar lokalisasi menyepakati rencana Pemerintah Kota Surabaya menutup Dolly pada 18 Juni 2014.

“Suara tidak setuju Dolly ditutup justru datang dari pekerja seks komersial (PSK) dan mucikarnya,” kata Lilik saat ditemui *Republika* di Surabaya, Rabu (4/6).

Menurut Lilik, PSK dan mucikari itu beralasan, jika prostitusi Dolly ditutup, tidak ada penghasilan yang masuk ke kantong mereka, warga menilai, para PSK dan itu orang malas yang hanya bisa berpikir bisa memperoleh uang dengan keberadaan Dolly. “Padahal, keberadaan Dolly sangat merugikan masyarakat sekitar.”

Adanya Dolly membuat kawasan sekitar tidak aman. Tak hanya itu, para istri yang memiliki suami dan tinggal disana merasa takut kalau suaminya terbuai keberadaan PSK. Hal lain yang membuat khawatir kaum ibu adalah anak-anak kecil biasa melihat aktivitas mereka. Anak-anak yang terbiasa melihat pergaulan bebas di sekitar mereka akhirnya mulai berani merokok, minum minuman keras, sampai melakukan seks bebas ketika beranjak dewasa. “Kami juga khawatir PSK yang terkena HIV/AIDS menularkan penyakitnya kepada warga. Karena, sudah ada beberapa warga yang tertular virus HIV/AIDS,” kata Lilik.

Lilik sebenarnya ingin segera pindah dari kawasan tersebut. Namun, rumahnya tidak kunjung dibeli orang. Mau tidak mau, Lilik harus hidup dikawasan itu selama 42 tahun dan memendam perasaan keberatannya terkait eksistensi Dolly. Untuk itu, warga asli mendukung penuh rencana Wali Kota

Surabaya Tri Rismaharini yang memberikan kepastian penutupan Dolly pada 18 Juni 2014.

Hingga kemarin, aktivitas di lokalisasi Dolly-Jarak tidak ada yang berubah dari hari-hari sebelumnya. Pada malam hari-hari sebelumnya. Pada malam hari, suasana Dolly dipenuhi lampu dan cahaya gemerlap yang menerangi para perempuan berdandan menor. Para PSK tetap bekerja dan memamerkan keseksian tubuhnya dengan duduk-duduk dibalik jendela transparan wisma.

Sebagian PSK ada yang duduk di luar wisma sambil merokok dengan pakaian minim, seperti tank top dan celana pendek. Beberapa laki-laki hidung belang hilir mudik memasuki wisma, gemerlap dunia malam juga terjadi di cafe, panti pijat, hingga tempat karaoke di sepanjang lokalisasi. Tempat parkir yang disediakan terlihat penuh.

Pada waktu yang sama, banyak anak-anak pelajar (SD, SMP, SMA) dan remaja yang lalu-lalang melewati lokalisasi Dolly-Jarak. Di beberapa wisma terpasang spanduk merah yang berisi penolakan penutupan Dolly. Umumnya, spanduk bertuliskan kalimat 'Harga Mati Tolak Penutupan Lokalisasi'.

Humas Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly Slamet Sugiono menegaskan, para pekerja Dolly tetap menolak rencana penutupan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu. Penutupan lokalisasi menyangkut urusan perut dan bisa membunuh perekonomian pekerja. Dia mengklaim, dampak penutupan Dolly bisa meluas dan tidak hanya menimpa PSK dan mucikari, tapi juga berimbas kepada warga sekitar. "Kalau Pemkot Surabaya tetap menutup Dolly, kami siap bertarung habis-habisan menolak penutupan," ujar Slamet.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Awi Setiyono menegaskan, kepolisian akan melakukan pengawalan terhadap rencana Pemkot Surabaya menutup Dolly. "Pasukan akan

disiapkan dari Polrestabes Surabaya dibantu dari Polda Jawa Timur. Polrestabes Surabaya selalu mengawal kegiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Polda Jatim tentunya akan *back up* kewilayahan,” terang Awi.

Wali Kota Surabaya, kata Awi, sedang melakukan audiensi dengan Kapolrestabes Surabaya tentang rencana penutupan Dolly. Kepolisian pun berjanji akan mengamankan dan menyiapkan pasukan tambahan mengantisipasi huru-hara.

Saat penutupan nanti, kata Awi, polisi hanya bertugas melakukan pengawalan. Saat ini kepolisian dan Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya persuasif terhadap warga yang masih menolak penutupan Dolly. “Kita ingin jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi,” ujar Awi.

Dari struktur sintaksis, akan dilihat *frame* dari surat kabar Republika. Judul yang digunakan oleh Republika ialah: “Warga Asli Sepakat Dolly Ditutup”. Teks berita ini akan menunjukkan tingkat kemenonjolan yang tinggi karena berita ini merupakan berita *headline*. Secara detail teks berita Republika mendeskripsikan bahwa ada pro dan kontra mengenai penutupan lokasi Dolly, dikarenakan khawatir dengan anak-anak yang ada di sekitar lokasi. Sedangkan para PSK cenderung menolak dikarenakan jika Dolly ditutup maka tidak ada penghasilan yang masuk ke kantong para PSK dan mucikari.

Dari perangkat analisis skrip, yaitu bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta bagian berita ini ialah terjadinya pro dan kontra mengenai penutupan lokasi, Front Pekerja

Lokalisasi (FPL) menegaskan bahwa para PSK tetap menolak penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Tapi pemerintah kota Surabaya tetap melakukan penutupan dengan dijaga ketat oleh kepolisian dan Pemkot kota Surabaya. Dari unsur-unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah: *who* (warga asli Dolly), *What* (prokontra), *Why* (penghasilan PSK berkurang).

Dari sudut tematik yaitu cara wartawan menulis fakta, disini terdapat dua tema dalam teks berita tersebut. Pertama, terjadinya pertentangan dalam penutupan lokalisasi Dolly yaitu dari pihak warga asli Dolly dan para PSK beserta mucikarinya. Kedua, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) melakukan audiensi dengan Kapolrestabes Surabaya dengan dijaga oleh pihak kepolisian.

Sedangkan jika dilihat dari sudut retorik, yaitu bagaimana cara wartawan menekankan fakta, disini bisa terlihat dari pernyataan Kepala Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Awi Setiyono.

“Pasukan akan disiapkan dari Polrestabes Surabaya dibantu dari Polda Jawa Timur. Polrestabes Surabaya selalu mengawal kegiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Polda Jatim tentunya akan *back up* kewilayahan”

Penekanan dapat disimak pada pemilihan kata/leksikon yang diambil dari berita tersebut ialah kata “*back up*” disini menceritakan kepada khalayak bahwa Polda

Jatim akan mendukung Pemerintah Kota Surabaya pada saat penutupan Dolly.

2. Kedua, berita dengan judul: Risma: Mayoritas Warga Dukong Dolly di Tutup, edisi Jum'at 6 Juni 2014.

Adapun berita yang kedua adalah sebagai berikut:

JAKARTA-Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakini mayoritas masyarakat Surabaya mendukung kebijakannya untuk menutup kawasan lokalisasi prostitusi Dolly. Risma menegaskan, tak akan mundur rencananya menutup lokalisasi itu pada 18 Juni mendatang.

“Warga di Surabaya banyak yang *support*, bahkan warga disekitar situ,” kata Risma, di kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Kamis (5/6). Menurutnya, penutupan lokalisasi itu memang bukan perkara mudah. Namun, ia langkah itu bukan hal yang mustahil dilakukan.

Risma beralasan, tujuan penutupan ini tak lain menyelamatkan masa depan para pekerja seks komersial (PSK) dan anak-anak yang ada disekitar lokalisasi. Secara aturan, pemerintah bisa saja sepihak menutup kawasan itu. Namun, akan lebih baik jika kebijakan pemerintah mendapat dukungan tanpa melalui jalan kekerasan. “*nggak* apa-apa, saya *kan* harus menyelamatkan yang lebih besar lagi. Masa depan Bangsa ini harus diselamatkan,” katanya.

Sejumlah PSK lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak, Kota Surabaya, pada Kamis (5/6), menulis surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno mengatakan, para PSK sebenarnya berencana ke Jakarta guna bertemu SBY.

Mereka ingin menyampaikan langsung kepada SBY selaku pemimpin negara supaya tidak

menutup lokalisasi prostitusi Dolly pada 18 Juni 2014. Para PSK Dolly, kata Suyitno, hanyalah rakyat kecil yang ingin menghidupi anak dan keluarganya. “Tetapi, kalau ribuan PSK ke Jakarta, berapa biaya yang harus kami siapkan?” kata Suyitno, kepada *Republika*.

Suyitno mengklaim ada 1.400 PSK yang menulis surat untuk SBY. Sebagian besar isi surat PSK berisi curahan hati mereka menjelang penutupan Dolly. “Isi suratnya bebas, apa yang menjadi unek-unek para PSK, termasuk penolakan penutupan Dolly,” ujarnya.

Surat-surat itu rencananya akan diantar langsung oleh pengurus FPL ke Istana Negara, pada Senin (9/6). Jika isi surat itu nantinya tidak digubris SBY, FPL memastikan akan tetap menolak penutupan salah satu lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu.

Bahkan kalau Dolly benar-benar ditutup, FPL berniat menempuh alur hukum. “Kami akan menuntut jajaran pemerintah yang mendukung penutupan Dolly, seperti Risma dan Gubernur Jatim Soekarwo kemeja hijau. Ini negara hukum dan kami sudah siapkan kuasa hukum,” kata Suyitno.

Pantauan *Republika*, aksi menulis surat untuk SBY dilakukan para PSK sekitar pukul 10.00 WIB di jalan gang Dolly. Ribuan PSK dengan mengenakan masker, penutup wajah, dan kaca mata duduk berbaris menulis di atas kertas putih HVS ukuran A4. Aksi tulis surat berakhir sekitar pukul 11.00.

Sosiolog dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uninsa) Surabaya Husnul Muttaqin mengatakan, keberadaan lokalisasi prostitusi Dolly telah mengorbankan banyak pihak, yaitu warga di Dolly, masyarakat luas, hingga PSK Dolly itu sendiri.

Sebenarnya, kata Husnul, rencana pemerintah menutup Dolly tidak datang tiba-tiba. Dia ingat, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memang ingin

menutup bisnis haram itu sejak 2010. Saat itu, pemerintah berupaya melakukan penutupan dengan cara manusiawi. Hasilnya, beberapa wisma di Dolly berhasil ditutup.

Bahkan, ada mucikari yang bertobat dan kemudian bergabung dalam Ikatan Dai Area Lokalisasi (Idiali). Tak hanya itu, beberapa PSK dengan suka rela berhenti dari pekerjaannya dan memilih pulang ke kampung halamannya. “Artinya, semua penutupan itu ada proses sosialisasinya dan sudah ada hasilnya. Jadi bukan mendadak,” kata Husnul, kemarin.

Eksistensi prostitusi Dolly dinilainya mengorbankan banyak pihak. Husnul mengatakan, anak-anak sekirat Dolly bisa terpengaruh dampak buruk Dolly karena terbiasa melihat aktivitas seksual di tempat itu. Masyarakat juga menjadi korban karena khawatir keluarganya memakai jasa prostitusi Dolly.

Dalam struktur sintaksis dalam pandangan Republika akan terlihat bahwa, Republika menurunkan berita dengan judul “Risma: Mayoritas Warga Dukung Dolly Ditutup” judul tersebut mengindikasikan bahwa khalayak diajak untuk setuju dan mendukung Risma. Perangkat sintaksis lain dari berita tersebut ialah latar. Latar tersebut adalah Tri Rismaharini akan tetap melangsungkan penutupan lokalisasi dengan dukungan penuh dari warga asli yang berada di gang Dolly, yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan lokalisasi tersebut. Niat Risma tersebut mendapat tentangan dari para PSK, yang akan mengadu kepada SBY agar tidak mendukung penutupan lokalisasi yang menjadi tempat mereka memperoleh rupiah sehari-hari. Secara detail teks pada berita tersebut

menunjukkan adanya pro kontra antara warga asli Dolly, PSK dan Pemerintah Kota Surabaya.

Sedangkan dari struktur skrip, secara umum Republika mengisahkan bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendapatkan dukungan penuh dari warga sekitar lokalisasi. Dengan tujuan tak lain untuk menyelamatkan masa depan para Pekerja Seks Komersial (PSK) dan anak-anak di sekitar lokalisasi. Dari berita tersebut terdapat unsur-unsur berita yaitu: *who* (Tri Rismaharini), *what* (warga support Risma), *why* (menyelamatkan masa depan anak bangsa), *where* (Surabaya), *when* (18 Juni mendatang).

Sedangkan pada struktur tematik, yaitu bagaimana cara wartawan menulis fakta. Tema yang terdapat dalam berita tersebut adalah terjadinya penolakan dari PSK dalam menentang pelaksanaan penutupan Dolly, penentangan tersebut dilakukan dengan cara menulis surat di kertas HVS yang dilakukan oleh PSK di sepanjang jalan gang Dolly yang kemudian akan ditunjukkan kepada Presiden SBY. Dari aspek retorik ada penekanan tertentu yaitu, melalui judul berita yang ditulis tebal dan terdapat pada halaman pertama, sehingga ini menunjukkan adanya kemenonjolan pada berita tersebut.

3. Ketiga, berita dengan judul: Warga Asli Dolly di Intimidasi, terbit edisi Selasa, 10 Juni 2014

Adapun berita ketiga yaitu sebagai berikut:

SURABAYA- Kekerasan berupa pemukulan dan intimidasi kerap dialami warga asli Dolly. Hal

tersebut terjadi karena warga asli dan anak-anak yang tinggal di kompleks lokalisasi prostitusi Dolly-Jarak, Surabaya, mendukung tempat itu ditutup. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan, warga asli yang mendukung penutupan kerap diintimidasi dan bahkan dipukul.

Menurutnya Dolly akan tetap ditutup sesuai jadwal, yaitu 18 Juni 2014. Dia menjelaskan, ada dua landasan hukum yang kuat mengapa Dolly harus ditutup. Pertama, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 mengenai larangan atau tempat tinggal difungsikan sebagai tempat asusila dan sebagai tempat pemikatan melakukan tindak asusila.

Kedua, yaitu Undang-Undang Perdagangan Manusia (*Human trafficking*). Sebagai aparat pemerintah, Risma menegaskan harus menegakkan aturan tersebut. Risma mengaku mendapatkan banyak dukungan untuk menutup Dolly. Mayoritas warga asli Dolly pun mendukung agar kompleks prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu ditutup secara permanen.

Namun, dia menyayangkan adanya pihak yang kerap mengintimidasi bahkan main aksi pukul terhadap warga asli Dolly. “*Kan* tidak adil seperti itu, karena warga bisa saja berubah pikiran dan mendukung penutupan namun diintimidasi,” kata Risma, Senin (9/6).

Sayangnya, Risma tidak menyebut siapa pihak yang mengintimidasi warga. Risma mengaku sudah menyampaikan fakta adanya intimidasi warga itu kepada pihak keamanan. Kini, pihak keamanan siap memberikan keamanan.

Tak hanya warga, Risma juga menceritakan bahwa ia banyak mendapat kiriman surat dari anak-anak yang tinggal dilokalisasi. Anak-anak tidak berdosa itu mengucapkan terima kasih kepada Risma karena pada akhirnya tempat prostitusi itu ditutup.

Anak-anak itu juga berterima kasih akhirnya bisa belajar setelah Dolly benar-benar ditutup.

Terkait aksi tulis surat yang dilakukan para pekerja seks komersial (PSK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Risma tidak mempermasalahkannya.

Menurutnya, tidak hanya mucikari dan pemilik wisma yang memiliki hak. “Anak-anak yang tinggal di Dolly juga punya hak dan saya bisa juga dilaporkan ke Komnas HAM,” ujarnya.

Untuk menutup Dolly, Pemkot Surabaya menyiapkan anggaran yang tidak main-main. Sedikitnya, Rp 25,5 miliar anggaran disiapkan untuk penutupan Dolly. Dana tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, wisma-wisma yang ada di Dolly akan dibeli Pemkot Surabaya dan segera dialihfungsikan. Kalau tempatnya luas, kata Risma, akan dibuat menjadi taman sentra pedagang kaki lima (PKL). Sehingga, para PKL yang berjualan di Dolly tetap bisa berjualan dikawasan tersebut. “Jika luas wisma kecil, akan dijadikan perpustakaan dan pusat pembelajaran teknologi informasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya Zayin Chudlori membenarkan bahwa para warga maupun PSK Dolly yang mendukung penutupan mendapat tekanan. Hal itu terungkap saat pihaknya mengumpulkan 16 warga dan PSK Ahad (8/6) lalu. Hasinya, kata dia, mereka semua ingin berubah.

Namun, para PSK maupun warga yang ingin bertobat itu mendapat tentangan. “Mereka diintimidasi, bahkan ada yang diancam tidak boleh menerima bantuan,” ujarnya.

Dari frame surat kabar Republika, jika dianalisis melalui struktur retorik (bagaimana wartawan menyusun fakta) yang akan menimbulkan makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Judul yang dipergunakan oleh Republika adalah “Warga Asli Dolly Diintimidasi” judul ini menjadi *headline* serta diperkuat dengan *lead* sebagai berikut: “Walikota Surabaya tetap menutup Dolly pada 18 Juni 2014”

Sebagaimana ditulis dalam surat kabar Republika, kepala berita atau *lead* seperti itu memberikan sudut pandang bahwa Dolly akan tetap ditutup bagaimanapun keadaannya. Dalam analisis sintaksis ditemukan pemakaian latar yang mengulas tentang warga asli Dolly yang mendukung penutupan lokalisasi mengalami kekerasan berupa pemukulan dan intimidasi oleh pihak-pihak yang kontra terhadap penutupan lokalisasi Dolly.

Struktur skrip akan dibahas bagaimana wartawan mengisahkan fakta dalam berita secara keseluruhan. Berita ini mengisahkan tentang warga Dolly yang mendukung atas ditutupnya lokalisasi kerap mendapatkan kekerasan dan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak menyetujui kalau lokalisasi Dolly tetap ditutup. Unsur berita yang ada dalam teks berita diatas adalah *who* (warga asli Dolly), *what* (warga diintimidasi), *why* (mendukung Dolly ditutup), *where* (Dolly-Jarak Surabaya).

Ada beberapa tema yang mendukung *frame* koran Republika. Pertama, Tri Rismaharini tetap akan menutup lokalisasi prostitusi Dolly pada tanggal 18 Juni 2014, meskipun Risma mengetahui bahwa warga Dolly yang mendukung penutupan tersebut kerap mendapat kekerasan dan intimidasi oleh pihak-pihak yang menolak penutupan lokalisasi tersebut. Hal ini di lihat dari wawancara dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Tema ini juga didukung oleh latar informasi yang menyatakan bahwa ada dua landasan hukum yang kuat mengapa Dolly harus ditutup. Pertama, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 mengenai larangan atau tempat tinggal difungsikan sebagai tempat pemikatan melakukan tindak asusila. Kedua, yaitu Undang-Undang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*). Tema ini dapat diamati dari wawancara dengan Tri Rismaharini.

Dari aspek retorik yaitu bagaimana cara wartawan menekankan fakta, *frame* Republika ditekankan melalui elemen grafis. Disini judul dibuat dengan ukuran besar dan bercetak tebal, bagian ini menunjukkan kepada khalayak betapa pentingnya bagian tersebut.

4. Keempat, berita dengan judul: Jangan Ada Konflik di Dolly, terbit edisi Jum'at 13 Juni 2014

Adapun berita keempat adalah sebagai berikut:

SURABAYA-Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah kota

Surabaya mengkaji ulang rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang. Hal tersebut karena masih adanya warga yang menolak.

“Kalau sampai ada kekerasan, pihak kepolisian juga terlibat dalam pelanggaran HAM itu. Makanya, kalau ada konflik kita tidak mau,” kata Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi saat menghadiri mimbar bebas di gang Dolly Surabaya, Kamis (12/6).

Menurutnya, Komnas HAM menemukan berbagai indikasi adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah. Namun, hasil investigasi tersebut masih belum final.

Intinya, lanjut dia, Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM, yang lebih menyudutkan kondisi perekonomian bagi perempuan PSK maupun warga terdampak. Sebab, hingga kini janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga belum dirasakan warga.

Dianto mengatakan, akan menemui Wali Kota Surabaya untuk mengonfirmasi terkait beberapa data temuan investigasi. Seluruh laporan tersebut akan disampaikan ke pemerintah. Dia mengatakan, setidaknya ada sebuah fakta yang harus diketahui jika penutupan dilakukan.

Rencana pembangunan, misalnya, tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah meskipun tujuannya baik. Dia khawatir jika penutupan Dolly tetap dipaksakan, akan terjadi kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM.

Lebih jauh, dia menyebut masalah prostitusi yang terjadi di suatu daerah sebenarnya adalah permasalahan hilir bukan hulu. Menurutnya, jika negara mampu memberikan yang layak bagi warganya, prostitusi itu akan hilang dengan sendirinya.

Karena itu, Dianto berharap pemerintah tidak bersikap semena-mena tanpa menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. “Saya menghormati semua pendapat karena negara ini adalah negara demokrasi. Yang terpenting, jangan samapai ada saling menghujat, tidak ada pemaksaan di negara ini HAM harus ditegakkan,” tegasnya.

Dianto, mengatakan Pemkot Surabaya harusnya mencontoh penutupan lokalisasi di Bandung Jawa Barat, yang berjalan lancar tanpa adanya gejolak. Dia menilai, jika penutupan lokalisasi Dolly bermasalah, artinya pemkot tidak memiliki manajemen penutupan yang baik. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya dialog antara pemerintah dengan warga di Dolly.

“Padahal, pemerintah seharusnya manajemen yang baik dan terencana. Sehingga, Dolly dapat ditutup dengan bijaksana,” katanya.

Sementara itu, berbagai aspirasi dan bentuk kekecewaan juga disuarakan oleh perwakilan PSK di dua lokalisasi. Meski pihak panitia telah menyediakan kursi bagi Gubernur, Wali Kota, maupun Kepala Dinsos Kota Surabaya, namun kursi tersebut kosong.

“Diundang seperti ini taidak mau hadir. Tapi penutupan terus diwujudkan, tolong sampaikan ke Wali Kota jangan seenaknya sendiri,” kata Novi, salah seorang pekerja seks komersial (PSK).

PSK lainnya, Santi mengatakan, keberadaannya di Dolly tidak main-main yaitu mencari nafkah untuk diri sendiri, anak, dan keluarga. Untuk itu, ia menolak keras rencana penutupan Dolly meski diberi janji kompensasi.

Dari analisis sintaksis yaitu bagaimana cara wartawan menyusun fakta yang akan menimbulkan makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Judul yang dipakai oleh

Republika adalah “Jangan Ada Konflik Di Dolly”. Teks dalam berita tersebut akan menunjukkan tingkat kemenonjolan yang tinggi karena berita tersebut termasuk berita *headline*. Elemen lain yang ada dalam struktur tersebut ialah *lead*. Dalam berita tersebut *lead* yang dipakai adalah “Komnas HAM meminta penutupan Dolly dikaji ulang”. Perangkat lain yang dipakai adalah latar, latar yang dipakai dalam teks berita tersebut ialah berupa kutipan wartawan dari Komisioner Komnas HAM, Diantio Bachriadi. Ia melihat adanya indikasi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah yang lebih menyudutkan kondisi perekonomian perempuan PSK.

Dari perangkat skrip, bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta, dalam bagian berita itu ialah mengenai rencana penutupan Dolly tersebut harusnya disepakati dengan para penghuni Dolly, jangan sampai ada saling menghujat yang dikhawatirkan jika penutupan Dolly tetap dilaksanakan akan terjadi kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Dari berita diatas unsur berita yang terdapat dalam teks berita tersebut adalah *who* (warga Dolly), *what* (dugaan pelanggaran HAM), *where* (Dolly, Surabaya), *when* (18 Juni mendatang), *why* (penutupan Dolly), dan *how* (antara Walikota Surabaya dan warga Dolly). Secara umum unsur berita telah terdapat dalam berita tersebut dan disajikan secara lengkap.

Sedangkan dari struktur tematik, berita itu membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Tema

dalam pemberitaan tersebut adalah adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terhadap PSK di Dolly. Tema ini disusun secara detail yang lengkap dan panjang lebar, yang merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada khalayak.

Frame Republika jika dianalisis menggunakan struktur retorik. Aspek retorik tertentu untuk menekankan makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat yaitu dalam aspek grafis, *frame* Republika menampilkan judul dengan tulisan yang bercetak tebal dan besar. Makna yang ingin disampaikan dalam judul berita tersebut ialah mendukung gagasan yang ingin ditonjolkan.

5. Kelima, berita dengan judul: Lokalisasi Dolly di Tutup, terbit edisi Rabu 18 Juni 2014

Adapun berita kelima yaitu sebagai berikut:

SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Menolak mundur dari rencana penutupan dan alih fungsi lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak. Deklarasi penutupan lokalisasi tetap akan dilaksanakan pada Rabu (18/6). “Ya, sudah pasti itu. Deklarasi untuk penutupannya diadakan besok (hari ini), Rabu (18/6) malam,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fikser, Selasa (17/6).

Dia menerangkan, deklarasi penutupan Dolly akan digelar di Islamic Center Surabaya. Acara deklarasi akan dihadiri oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam deklarasi itu, Fikser menjelaskan, pihak kementerian Sosial (Kemensos) akan

memberikan bantuan dana secara simbolis kepada wakil dari pekerja seks komersial (PSK) dan warga terdampak penutupan.

Menurut Fikser, setelah deklarasi penutupan itu, Pemkot Surabaya tidak menjamin kegiatan prostitusi di Dolly langsung sepenuhnya berhenti. Namun, pemkot akan mulai mengikis praktik lokalisasi tersebut dengan cara memutus rantai ketergantungan nafkah warga Dolly dengan cara mengalihkan bisnis dan profesinya.

Untuk para PSK, kata Fikser, Pemkot Surabaya memberikan dua pilihan. Pilihan itu adalah tetap memiliki izin tinggal di Dolly dan Jarak, tapi beralih profesi atau pulang ke kampung halamannya. Fikser menegaskan, pemulangan PSK ke kampung halaman dilakukan bukan atas pemaksaan, tapi jika si PSK meminta. “Prioritas kami adalah warga. Warga yang mencari nafkah hidup dari aktivitas prostitusi,” tutur dia.

Salah seorang warga sepuh di Gang Dolly, yang dikenal sebagai Abah Petruk mengatakan, tidak ada istilah penutupan aktivitas prostitusi di Dolly dan Jarak. Alasannya, kata dia, dua tempat lokalisasi itu memang tak satu kali pun pernah resmi dibuka. Petruk yang sejak 1965-an tinggal dikawasan itu menyarankan, Risma tetap dengan rencana mengalihfungsikan Dolly dan Jarak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya juga meminta agar Pemkot Surabaya tetap menutup lokalisasi Dolly. Ketua DPRD Muhammad Machmud mengatakan, suara bulat dukungan DPRD siap memberikan amunisi pembelaan jika Risma mendapat perlawanan. “Harus ditutup. Targetnya memang harus ditutup. Itu sesuai dengan rencana semua badan pemerintahan,” kata Machmud.

Rencana penutupan dan alih fungsi Dolly dan Jarak terus mendapat perlawanan. Pada Selasa (17/6),

sejumlah pemuda dan warga, serta para pelaku bisnis prostitusi melakukan aksi penolakan penutupan di depan Islamic Center Surabaya. “*Nggak* ada yang mau tutup, Mas. Siapa yang mau tutup? Kami akan melawan,” kata Andre, salah satu anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL).

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah mempersiapkan pengamanan untuk rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada Rabu (18/6). Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihaknya akan mem-*back up* seluruh kegiatan pengamanan tersebut.

Awi menuturkan, Polda Jatim telah menyiapkan sekitar 986 personel, dengan pelaksana lapangan dilakukan oleh Polrestabes Surabaya. Petugas yang akan terlibat dalam pengamanan, menurut dia, terdiri atas gabungan polda Jatim Sekitar 415 personel, 231 personel polrestabes, 120 personel polsek di seluruh kota Surabaya, dan 130 personel TNI. “Untuk kebaikan bersama, kami berada di tengah (netral) untuk memantau kegiatan pemerintahan,” tutur dia.

Dari analisis sintaksis, *frame* koran Republika menulis berita dengan judul “Lokalisasi Dolly Ditutup” judul berita tersebut menjadi *headline* serta diperkuat dengan *lead* sebagai berikut:

“Polda Jatim mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan proses penutupan lokalisasi Dolly”

Bentuk *lead* seperti diatas menunjukkan sudut pandang bahwa penutupan lokalisasi Dolly oleh Walikota Surabaya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Surabaya. Perangkat sintaksis lain yaitu latar. Latar dalam

berita tersebut mengulas bahwa deklarasi penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak tetap akan dilaksanakan pada Rabu 18 Juni 2014 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Bagaimana Republika mengisahkan fakta, ini dapat diperhatikan melalui alur berita yang dikisahkan melalui perangkat analisis skrip. Secara keseluruhan teks berita ini mengisahkan tentang deklarasi penutupan lokalisasi yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 Juni 2014 yang dihadiri oleh Humas Pemkot Surabaya (Muhammad Fiksen), Menteri Sosial (Salim Segaf Al Jufri) dan Walikota Surabaya (Tri Rismaharini). Deklarasi tersebut akan digelar di *Islamic Center* Surabaya.

Dari unsur berita yang terkandung dalam berita tersebut adalah *who* (Pemkot Surabaya), *what* (Deklarasi penutupan lokalisasi), *where* (*Islamic Center* Surabaya) dan *when* (Rabu, 18 Juni 2014). Dari sudut pandang Republika sendiri berita tersebut terdiri atas dua tema. Pertama, Pemkot Surabaya beserta Menteri Sosial akan ikut serta dalam deklarasi penutupan lokalisasi Dolly di gedung *Islamic Center* pada 18 Juni. Ini dapat dilihat dari berita yang mengungkapkan secara detail langkah yang dilakukan oleh Walikota Surabaya dan Pemkot Surabaya dalam rencana penutupan lokalisasi Dolly.

Kedua, Pemkot Surabaya tidak menjamin lokalisasi Dolly sepenuhnya berhenti. Namun sedikit demi sedikit akan

memutus rantai ketergantungan nafkah warga Dolly dengan mengalihkan bisnis dan profesinya.

Frame Republika dengan struktur retorik, cara wartawan menekankan fakta. Berita tersebut ditekankan dalam bentuk elemen grafis. Disini judul dibuat dengan ukuran besar dan bercetak tebal disertai dengan gambar sketsa wajah Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Bagian yang ditonjolkan ini menekankan kepada khalayak akan pentingnya bagian tersebut.

6. Keenam, berita dengan judul: Dolly Ditutup, PSK Tetap Buka Praktik, terbit edisi Jum'at 20 Juni 2014

Adapun berita keenam adalah sebagai berikut:

SURABAYA-sehari pasca deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di kota Surabaya, Jawa Timur, aktivitas prostitusi di dua daerah tersebut masih bergeliat. Para pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan pemilik wisma mengabaikan komitmen pemerintah Kota Surabaya yang secara formal sudah menutup lokalisasi pelacuran terbesar di Asia Tenggara itu.

Mereka melakukan kegiatan seperti biasa seakan tak pernah ada keputusan penutupan lokalisasi. Amin, pengurus wisma dan bar terbesar di Gang Dolly, mengatakan, kesepakatan warga dan para pekerja tetap membolehkan kegiatan menjual diri para PSK. Penghuni dan PSK Dolly akan tetap menolak segala macam upaya Pemkot Surabaya menghilangkan mata pencaharian mereka.

“Kita tetap buka sajalah. Wisma-wisma yang lain lihat saja, pada buka semua *toh*,” kata Amin kepada *Republika*, Kamis (19/6) malam. Upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menutup Dolly dan

Jarak akan berujung kepada kesia-siaan. Apalagi, sehari setelah deklarasi penutupan Dolly dan Jarak bersama Menteri Sosial dan Salim Segaf Al Jufri, tidak ada razia atau upaya penerbitan hukum terhadap PSK yang praktik di Dolly dan Jarak.

Anggota Fornt Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly-Jarak, Andre, menyatakan penghuni tetap akan melawan apa pun kebijakan pemerintah untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak. Andre yang juga pengurus lima wisma di Dolly mengaku tak jera jika ada pengusuran wisma.

Berdasarkan pantauan *Republika*, Kamis (19/6) malam, aktivitas di Dolly dan Jarak memang masih normal. Meski tak seramai biasanya, aktivitas PSK tetap mencolok disepanjang jalan Jarak dan juga Gang Dolly.

Kondisi ini berbeda dibandingkan pada Rabu (18/6) malam. Saat pendeklarasian penutupan Dolly dan Jarak itu, tak satupun pemilik wisma dan PSK mengoperasikan bisnis prostitusinya. Bahkan, pemilik warung kopi dan rokok (giras) pun tidak buka.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, Pemkot memberi batas waktu lima hari bagi para penghunidan pemilik usaha prostitusi di Dolly-Jarak untuk mengubah haluan nafkah hidup mereka.

Dari struktur sintaksis yaitu bagaimana cara wartawan menyusun. Judul yang dipakai oleh *Republika* adalah “Dolly Ditutup, PSK Tetap Buka Praktik”. Teks berita ini akan menunjukkan tingkat kemenonjolan yang tinggi karena berita tersebut ini menjadi berita *headline*.

Frame *Republika* ini juga didukung dengan bagaimana *Republika* mengisahkan suatu fakta (Scrip). Berita ini

mengisahkan tentang bahwa paska penutupan lokalisasi Dolly yang telah dilaksanakan pada 18 Juni tidak digubris oleh para PSK, mucikari dan pemilik wisma, mereka tetap beraktivitas seperti malam-malam biasanya dan tidak ada razia ataupun upaya penertiban hukum terhadap PSK yang tetap membuka praktik Dolly dan Jarak.

Dari sudut tematik, yaitu cara wartawan menulis fakta. Tema yang tersusun adalah tentang para PSK yang masih membuka praktik prostitusi dengan mengabaikan keputusan deklarasi penutupan lokalisasi tersebut. Sedangkan dari struktur retorik yaitu bagaimana cara wartawan menekankan fakta, disini bisa dilihat dengan pemakaian elemen grafis yang berupa judul, judul yang dibuat dengan bercetak tebal yang terdapat pada halaman pertama di Harian Republika. Hal tersebut menandakan bahwa ada perhatian khusus pada bagian tersebut.

7. Ketujuh, berita dengan judul: Deklarasi Penutupan Dolly Dinilai Mandul, terbit pada hari Sabtu 21 Juni 2014

Adapun berita ketujuh yaitu sebagai berikut:

SURABAYA-Deklarasi penutupan lokalisasi prostitusi Dolly dan Jarak di Surabaya, Jawa Timur, dinilai mandul. Ketua DPRD Kota Surabaya Muhammad Machmud mengatakan, deklarasi terbukti tak mampu menghentikan aktivitas prostitusi di Gang Dolly dan Jarak.

Para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari tetap menjalankan praktik bisnis pelacuran bersama pemilik wisma. “Mestinya sudah tidak boleh

ada lagi praktik prostitusi di Dolly dan Jarak. Itu *kan* sudah dideklarasikan bersama penutupannya. Kalau masih ada, ya berarti deklarasinya mandul *dong*,” kata Machmud kepada *Republika*, Jumat (20/6).

Machmud yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, DPRD akan terus memantau langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pasca deklarasi penutupan Dolly yang dihadiri langsung Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Wali Kota Surabaya menegaskan, riwayat Dolly dan Jarak sejatinya sudah tamat. Dengan deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada Rabu (18/6) malam, Surabaya sudah bebas dari lokalisasi.

Pemkot Surabaya, kata Risma, memberi batas waktu lima hari bagi penghuni dan pemilik usaha prostitusi di Dolly dan Jarak untuk mengubah haluan pekerjaan dan nafkah hidup mereka. “Semua sarana hukum akan dikerahkan untuk melawan penolakan penutupan lokalisasi tersebut,” ujar dia.

Machmud menyatakan, meski Pemkot memberi batas waktu lima hari, bukan berarti masa toleransi tersebut bisa digunakan PSK dan mucikari untuk tetap mengambil dana kompensasi yang disediakan Pemerintah. “Target pemerintah kan sudah jelas, yakni Dolly harus tetap ditutup. Kita tetap mendukung itu. Silahkan ditindak kalau ada yang bandel masih buka,” ujar Machmud.

Dua hari pascadeklarasi penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu, kondisi Dolly dan Jarak tidak berubah. Pada Jum’at (20/6) malam, wisma-wisma yang menjadi lokasi PSK menjajakan diri masih buka seperti hari-hari biasa. Meskipun jumlah pengunjung berkurang, tapi para mucikari tetap menyiapkan PSK kepada pengunjung yang datang.

Di Gang Dolly, hanya lima dari sekitar 50 wisma PSK yang memilih tutup. Andre, pengurus

wisma PSK Sumber Rejeki dan Putri Ayu mengatakan, tidak semua wisma yang beroperasi merupakan pendukung penutupan Dolly. “Kalau yang di tempat saya memang lagi libur saja. Biasa libur menjelang Ramadhan. Kalau yang lainnya memang ada yang tutup,” kata Andre yang juga anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly.

Andre melanjutkan, para PSK binaannya memang sedang menikmati libur menjelang Ramadhan hingga Lebaran. “Nanti, bahis lebaran, ya buka lagi. Biasanya memang seminggu sebelum puasa mereka pilih pulang kampung,” ujar Andre.

Menurut Andre, pemilik wisma menaati kesepakatan bahwa mulai 25 Juni mereka akan tutup sementara waktu. “Tapi, ini bukan berarti kita mengamini penutupan Dolly dan Jarak. Memang Risma mau kasih makan? *Ndak to?*”

Berdasarkan pantauan *Republika*, ada dua wisma dan bar terbesar di Gang Dolly dan Jarak, yakni Barbara dan New Barbara, yang sudah tak lagi beroperasi. Pada Jum’at (20/6) pagi, tampak sejumlah anggota kepolisian mengawal beberapa pekerja menurunkan pendingin ruangan (AC) serta kursi merah panjang tempat PSK menjajakan diri. Seorang karyawan wisma New Barbara, Amin, mengaku tidak tahu alasan tempat bekerjanya tutup. “Disuruh bos tutup, ya tutup,” kata dia.

Di Jarak, aktivitas prostitusi tetap beroperasi. Para PSK bebas menjajakan diri dibalik bilik-bilik kaca. Di mulut Gang Jarak IV terpampang tulisan dengan spidol hitam “Buka Bos”. “Masuk saja, mas, lihat-lihat,” kata seorang pengurus wisma dan karaoke, Ronggo. Sejak Dolly dan Jarak digembargemborkan ditutup, pengunjung ke gang itu semakin sepi. “Lah ya pengunjung pada takutlah, Mas” kata Ronggo.

Di Gang Lebar yang menjadi pusat prostitusi Jarak, ada beberapa pemilik rumah yang mulai

mengidentifikasi bangunannya dengan tulisan “Rumah Tangga”. Salah satu pemilik rumah mengatakan, identifikasi adalah penegasan bangunan petak itu bukanlah bagian dari sarana prostitusi.

Meski begitu, aktivitas prostitusi di gang itu masih ada. Seorang PSK yang ditemui *Republika* mengatakan, belum ada rencana berhenti menjadi PSK. Perempuan 35 tahun yang mengaku bernama Sri itu mengatakan, tak punya pilihan selain menjadi PSK. “*Ngapain* berhenti? *Toh* Cuma lima juta (uang kompensasinya). Duit saya lebih banyak,” kata Sri.

Analisis sintaksis dari pandangan *Republika* terwujud dalam skema atau bagan berita dengan judul “Deklarasi Penutupan Dolly Dinilai Mandul”. Dalam edisi tersebut berita ini menjadi *headline* sehingga mengandung tingkat kemenonjolan yang tinggi. Perangkat sintaksis lain yaitu berupa latar. Latar yang dipakai dalam berita tersebut ialah tentang penutupan gang Dolly dan Jarak yang dinilai mandul karena setelah keputusan deklarasi penutupan masih ada wisma-wisma dan PSK yang beroperasi. Latar ini memberikan kesan bahwa tidak ada tindak lanjut oleh Pemkot Surabaya paska deklarasi penutupan Dolly.

Dari sisi skrip dapat dilihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta dalam berita tersebut secara keseluruhan. Berita ini mengisahkan tentang tidak adanya lanjutan mengenai penutupan Dolly. Padahal sudah diadakan deklarasi penutupan tersebut, namun realita di lapangan menyatakan bahwa masih ada PSK yang beroperasi di gang Dolly. Dalam

berita tersebut juga terdapat unsur-unsur berita diantaranya: *What* (penutupan dinilai mandul), *why* (tidak ada tindak lanjut oleh Pemkot Surabaya), *where* (gang Dolly)

B. Analisis Framing Pemberitaan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly di Surat Kabar Harian Kompas

1. Pertama, berita dengan judul: Cegah HIV, Penutupan Dolly Dipercepat, terbit edisi Kamis 5 Juni 2014

Adapun berita pertama yaitu sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS-Rencana penutupan Dolly di Surabaya dipercepat satu hari menjadi 18 Juni. Salah satu pertimbangannya untuk memutus penyebaran HIV karena di kawasan lokalisasi yang sudah ditutup pun masih ditemukan pekerja seks komersial yang beroperasi dan mengidap HIV.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, lokalisasi menjadi sumber penyebaran HIV sehingga Dolly harus segera ditutup. Penutupan Dolly dipercepat juga karena Menteri Sosial Salim Al'Jufrie akan hadir langsung. "pak menteri akan mengikuti ikrar penutupan dan memasang papan pengumuman pemberlakuan undang-undang perdagangan manusia," katanya ketika dihubungi pada Rabu (4/6).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rahmanita mengatakan, pada 2014, hingga akhir Mei tercatat ada 254 pengidap HIV di Surabaya. Total pengidap HIV di Surabaya sejak 1998 sebanyak 7.600 orang. "Di Dolly selama 2012 hingga 2014 ada 215 pengidap HIV," katanya.

Sabtu pekan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menggelar operasi yustisi di bekas lokalisasi Moro Seneng, Sememi, Surabaya. Lokalisasi Semenitu itu sudah ditutup akhir 2013.

Namun, mereka menemukan 26 pekerja seks komersial (PSK) di dua wisma. Setelah dilakukan tes kesehatan, dua PSK positif mengidap HIV.

Kepala Satpol PP Surabaya Irfan Widyanto mengatakan, lokasi yang sudah ditutup tidak dibiarkan begitu saja. Pengawasan rutin tetap dilakukan supaya tidak muncul lagi praktik prostitusi.

Direktur Eksekutif Yayasan Hotline Surabaya Esthi Susanti mengemukakan, untuk mengatasi masalah PSK yang akan mencari tempat baru karena lokasi ditutup, perlu ada perubahan strategi pencegahan. Upaya ini tidak bisa dikerjakan pemerintah kota atau kabupaten saja, tetapi sudah menyangkut pemerintah pusat. Strategi yang dahulu fokus pada pemasok PSK, kini harus terfokus pada sisi permintaan, yakni pada pelanggan atau kaum laki-laki. (DEN/ETA)

Dari frame Surat Kabar Harian (SKH) Kompas dengan dianalisis melalui struktur sintaksis, yaitu bagaimana wartawan menyusun fakta yang akan menimbulkan makna tertentu ketika diterima oleh khalayak. Judul yang dipergunakan SKH Kompas ialah “Cegah HIV, Penutupan Dolly di Percepat”. Dalam analisis sintaksis ditemukan pemakaian latar yaitu salah satu alasan mengapa rencana penutupan Dolly di percepat adalah, karena untuk memutus penyebaran HIV di kawasan lokasi. Dengan pertimbangan bahwa masih ditemukan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi dan mengidap HIV, ini bisa diamati dari kutipan berita sebagai berikut:

“Di Dolly selama 2012 hingga 2014 ada 215 pengidap HIV”

Bagian berita ini menggambarkan bahwa PSK yang mengidap HIV dari tahun ke tahun makin meningkat.

Dari analisis skrip yaitu bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Secara umum teks berita Kompas mengisahkan bahwa Walikota Surabaya mengatakan bahwa, lokalisasi menjadi sumber penyebaran HIV sehingga harus segera ditutup. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya yang melakukan tes kesehatan terhadap PSK yang bertempat di bekas lokalisasi Moro Seneng, Sememi, Surabaya.

Dalam teks berita ini terdapat unsur-unsur penting berita yaitu: *who* (Walikota Surabaya), *what* (lokalisasi sumber utama penyebaran HIV), *why* (di Surabaya tercatat 254 pengidap HIV), *where* (Moro Seneng, Sememi, Surabaya). Sedangkan jika dilihat dari struktur tematik yaitu, bagaimana wartawan menulis fakta. Dalam berita ini terdapat dua tema. Pertama, para PSK yang ditemukan mengidap HIV dan masih beroperasi di bekas lokalisasi Moro Seneng, Sememi, Surabaya. Kedua, atas pernyataan Direktur Eksekutif Yayasan Hotline Surabaya, yaitu Esthi Susanti mengatakan untuk mengatasi PSK yang mencari tempat baru karena lokalisasi ditutup, perlu adanya strategi perubahan. Strategi yang dulu fokus pada pemasok PSK kini juga harus terfokus pada sisi permintaan, yaitu pelanggan atau kaum laki-laki.

Kedua tema diatas secara detail dan panjang lebar di jelaskan pada berita tersebut. Sedangkan jika diamati dari struktur retorik, yaitu bagaimana wartawan menekankan fakta. Tidak ada penekanan yang dilakukan oleh wartawan dalam berita tersebut.

2. Kedua, berita dengan judul: Penghuni Dolly Mengadu ke Presiden, terbit edisi Jumat 6 Juni 2014

Adapun berita kedua yaitu sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS- Sekitar 1.000 pekerja seks komersial di lokasi Dolly dan Jarak, Kota Surabaya, Jawa Timur, turun kejalan menolak rencana penutupan kawasan itu karena khawatir penghasilan mereka berkurang, Kamis (5/6). Jika Dolly tetap ditutup, para PSK dan penghuni lokasi mengancam akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Koordinator aksi dari Front Pekerja Lokalisasi, Aveng, mengatakan, jika Dolly tetap ditutup, mereka berencana memboikot pelaksanaan pemilihan presiden meliputi lima RW di Kelurahan Putat Jaya. "Ada 15.000 suara di lima RW ini," kata dia.

Aksi itu merupakan tanggapan atas sikap Pemerintah Kota Surabaya yang tetap akan menutup Dolly dan Jarak pada 18 Juni. Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie telah menyatakan akan hadir dalam penutupan itu.

Angkat Derajat

Menanggapi penolakan penghuni Dolly dengan ancaman mengirim surat ke Presiden dan Komnas HAM, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Jakarta menegaskan, "Silakan saja. Prinsip utama

penutupan lokalisasi untuk mengangkat derajat seluruh penghuni dan menyelamatkan mas depan anak-anak di sekitar kawasan itu.”

Seluruh program sebelum melakukan penutupan lokalisasi juga sudah dilaksanakan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan keterampilan untuk para PSK dan mucikari, termasuk pemilik wisma.

Saat unjuk rasa, sebagian besar dari mereka menghujat Risma yang sampai saat ini konsisten menutup semua lokalisasi di Surabaya. “Kami akan tolak semua bantuan. Buat apa Rp 5 juta. Saya sebulan bisa dapat Rp 15 Juta,” kata Susi, salah satu PSK di Dolly. Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan modal usaha kepada setiap PSK Rp 5 Juta. Selain bantuan modal, PSK juga mendapat pelatihan keterampilan.

Menurut Susi dan PSK lain, mereka sampai saat ini tidak pernah didatangi Pemkot Surabaya mengenai konsep alih profesi yang ditawarkan itu. Padahal, Pemkot Surabaya mengklaim telah memverifikasi sebagian PSK di lokalisasi lainnya.

Pemilik wisma dan mucikari juga keberatan akan kehilangan panghasilan. Johan, salah satu pemilik wisma, mengatakan, sebelum ada isu penutupan Dolly, satu wisma dapat menghasilkan Rp 60 juta per bulan. “Setelah ada isu penutupan, pendapatan wisma turun jadi Rp 30 juta.”

Menurut Johan, di lokalisasi Dolly dan Jarak terdapat sekitar 300 wisma rata-rata mempekerjakan 10 PSK. “Jadi, kami mau saja menutup usaha kami dan pindah jika diberi kompensasi Rp 5 milyar,” kata Linda, pemilik wisma lain. (DEN/ETA)

Frame SKH Kompas bisa diperhatikan dari bagaimana wartawan menyusun kalimat dalam bentuk berita secara keseluruhan. Dari analisis sintaksis judul yang

digunakan Kompas adalah “Penghuni Dolly Mengadu ke Presiden”. Latar yang digunakan Kompas yaitu, mucikari dan PSK yang menolak penutupan lokalisasi Dolly mengancam akan menulis surat untuk dikirim kepada Presiden SBY dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, teks berita tersebut menekankan kepada khalayak bahwa para penghuni Dolly menolak keras penutupan lokalisasi.

Struktur skrip dalam SKH Kompas akan terlihat bahwa berita ini mengisahkan penghuni Dolly seperti mucikari, PSK dan pemilik wisma menolak penutupan lokalisasi dengan mengancam Walikota Surabaya bahwa warga akan mengirimkan surat kepada Presiden dan Komnas HAM. Serta menolak uang kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,- juta yang akan diberika kepada setiap PSK.

Dari berita tersebut di atas maka unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut ialah sebagai berikut: *who* (penghuni Dolly), *where* (gang Dolly), *what* (menulis surat untuk Presiden dan Komnas HAM), *why* (menolak uang kompensasi dan penutupan lokalisasi), *how* (penghasilan PSK menurun). Dari struktur tematik, tema yang mendukung gagasan Kompas dalam berita tersebut yaitu, bahwa ada sekitar 1.000 PSK yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, Jawa Timur turun ke jalan menolak rencana penutupan karena di khawatirkan penghasilan mereka

berkurang. Tema tersebut ditulis secara detail dan lengkap pada berita tersebut.

Struktur retorik yaitu bagaimana wartawan menekankan fakta. Disini fakta diperkuat dengan foto. Foto tersebut menandakan bahwa SKH Kompas mempunyai perhatian khusus terhadap pemberitaan tersebut.

3. Ketiga, berita dengan judul: Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha, terbit edisi Selasa 10 Juni 2014

Adapun berita ketiga yaitu sebagai berikut:

SURABAYA-Sebanyak 79 warga di lokasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, yang terdampak rencana penutupan lokasi tersebut, menerima bantuan peralatan usaha dari Pemerintah Kota Surabaya, Senin (9/6), mereka diharapkan memiliki usaha yang lebih baik dan penghasilan yang lebih banyak setelah Dolly ditutup. “Bagi saya, yang terpenting bagaimana memberi peluang warga Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk warga di sekitar Dolly,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo meminta kelompok masyarakat yang menolak rencana penutupan lokasi Dolly tidak mengatasnamakan kepentingan ekonomi. (DEN/NIK)

Dari struktur sintaksis, SKH Kompas mengambil judul “Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha”. Tidak ada *lead* yang ditampilkan dalam berita tersebut.

Jika dilihat dari sudut bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta (skrip) disini terdapat tema penting yaitu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengharapkan warga

Surabaya memiliki kehidupan sejahtera dan memiliki penghasilan yang lebih setelah penutupan lokalisasi, teks berita tersebut diperkuat dengan kutipan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai berikut:

“Bagi saya, yang terpenting bagaimana memberi peluang warga Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan termasuk warga di sekitar Dolly”

Dilihat dari analisis retorik yakni bagaimana cara wartawan menekankan fakta. Elemen grafis yang muncul dalam pemberitaan ini adalah dalam bentuk ekspresi dengan mencetak tebal judul berita. Namun berita tersebut tidak masuk dalam berita *headline*, yang mana menunjukkan bahwa SKH Kompas tidak ada pebekaan terhadap berita tersebut.

4. Keempat, berita dengan judul: Komnas HAM; Dialog Perlu Ditingkatkan, terbit edisi Jumat 13 Juni 2014

Adapun berita keempat adalah sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS-Jelang penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya, Jawa Timur, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melihat kondisi sosial dilokalisasi itu, Kamis (12/6). Mereka menemukan perlawanan warga terhadap rencana penutupan itu masih besar. Pendekatan lewat dialog harus semakin ditingkatkan.

“Jika masih ada penolakan seperti sekarang ini, artinya masih ada yang belum pas,” kata Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi. Jika penutupan lokalisasi itu tetap dilakukan pada 18 Juni dengan mengabaikan perlawanan dari sebagian warga, konflik lebih besar dapat terjadi.

Ratusan pekerja seks komersial (PSK) dan warga menggelar mimbar bebas di Gang Dolly, Kamis. Mereka mendirikan tenda dan mengadakan diskusi sehingga akses menuju Dolly ditutup. Perwakilan dari PSK, mucikari, pedagang informal, dan Dianto secara bergiliran menyampaikan pendapatnya.

Peserta mimbar bebas umumnya menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini arogan karena akan tetap menutup Dolly. Mereka merasa tak pernah didekati oleh pemerintah Kota Surabaya.

Selama sebulan terakhir, setidaknya ada empat aksi yang dilakukan warga dan PSK di Dolly untuk menyuarakan penolakan rencana penutupan itu. Mereka juga mendatangi Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa, untuk mengadakan rapat dengar pendapat. Namun, rencana itu batal karena wakil Dinas Sosial Kota Surabaya tidak hadir.

Dianto mengatakan, lokalisasi diwarnai pelanggaran HAM, salah satunya karena menjadi pasar perdagangan manusia. “Saya yakin niat Pemkot Surabaya baik. Namun, rencana ini tidak mudah. Pemkot Surabaya harus bisa memastikan kehidupan ekonomi warga tidak hancur karena itu juga termasuk HAM,” kata dia.

Secara terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, penutupan lokalisasi justru untuk menegakkan HAM. “Manusia itu punya hak untuk hidup bermartabat. Jika saya membiarkanya saja, berarti saya melanggar HAM juga,” kata dia.

Menurut Soekarwo, Pemerintah Provinsi Jatim siap memberikan bantuan dana yang dibutuhkan Pemkot Surabaya berapa pun jumlahnya. (DEN)

Struktur sintaksis yang terdapat pada berita keempat di SKH Kompas ini menurunkan berita dengan judul

“Komnas HAM: Dialog Perlu Ditingkatkan”. Latar yang dipakai dalam berita tersebut yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat perlawanan warga terhadap rencana penutupan lokalisasi. Teks menekankan pada khalayak bahwa jika penutupan lokalisasi itu tetap dilakukan pada 18 Juni dengan mengabaikan perlawanan dari sebagian warga maka akan timbul konflik yang lebih besar lagi.

Dalam struktur tematik, SKH Kompas mengamati mengenai bagaimana wartawan menulis fakta. Ada dua tema yang mendukung gagasan Kompas dalam berita tersebut. Pertama, komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi, PSK dan mucikari menggelar mimbar besar di gang Dolly. Dalam teks, tema ini dapat diuraikan dengan keterangan yang diberikan oleh sumber berita yang diwawancarai. Diantaranya yaitu pertama, Komisioner Komnas HAM (Dianto Bachriadi) dan Gubernur Jawa Timur (Soekarwo). Kedua, PSK dan warga menggelar mimbar bebas di Gang Dolly.

Struktur skrip akan melihat bagaimana wartawan mengisahkan fakta dalam berita secara keseluruhan. Berita ini mengisahkan tentang para penghuni Dolly yang menolak penutupan lokalisasi dengan mengadakan rapat dengar pendapat bersama Komisioner Komnas HAM, namun gagal karena Wakil Dinas Sosial Kota Surabaya tidak hadir.

5. Kelima, berita dengan judul: Polisi Jamin Keamanan Penutupan Dolly, terbit pada Rabu 18 juni 2014

Adapun berita kelima yaitu sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS-Meski ada penolakan dari sebagian warga, polisi memastikan rencana penutupan lokalisasi Dolly, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/6), berjalan aman dan lancar. Polisi mengerahkan 986 personel untuk menjaga deklarasi penutupan Dolly yang dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie.

“Masyarakat tidak perlu resah,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Setija Junianta, Selasa, di Surabaya. Polisi juga akan mendapatkan bantuan dari TNI.

Deklarasi penutupan Dolly dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 di gedung Islamic Center Surabaya sekitar 1,5 kilometer dari Dolly. Gubernur Jatim Soekarwo dijadwalkan hadir. Upaya penutupan Dolly merupakan kerja sama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Kemarin pagi, suasana di Dolly memanas karena pemuda berinisial NA (22) nekat masuk ke lokalisasi dan merusak dua wisma. Ia memecahkan kaca wisma-wisma itu dengan batu seukuran buah kelapa. NA kemudian ditangkap warga dan diserahkan kepada polisi.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, Setija mengatakan, “Pelaku ternyata mengalami gangguan jiwa dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.”

Meskipun begitu, akibat kejadian itu, warga meningkatkan pengamanan kampung. Warga berkumpul disetiap mulut gang di kawasan Dolly. Mereka memasang bendera setengah tiang sebagai simbol penolakan penutupan Dolly.

Warga yang menolak dan beberapa aktivis, kemarin, kembali mendatangi DPRD Surabaya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, hingga pertemuan kali ketiga itu, warga tetap kecewa karena pihak Dinas Sosial Kota Surabaya kembali tidak dapat hadir.

Di lokalisasi Dolly, warga yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL) mengadakan jumpa pers. “Kami siap melawan dan membubarkan acara deklarasi,” kata Koordinator FPL Prasetyo. Mereka juga berencana memblokir semua akses ke Dolly mulai Rabu pukul 06.00. (DEN)

Frame SKH Kompas, juga bisa diperhatikan dari bagaimana wartawan menyusun fakta (sintaksis) untuk disusun kedalam teks berita. Judul yang digunakan Kompas adalah “Polisi Jamin Keamanan Penutupan Dolly”, dalam pemberitaan ini tidak didukung dengan *lead*. Latar yang dipakai pemberitaan ini adalah “penutupan lokalisasi Dolly akan dihadiri oleh Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie di Surabaya, Jawa Timur pada hari rabu 18 Juni yang akan berlangsung pukul 19:00 di gedung *Islamic Center*”. Teks berita tersebut di uraikan secara detail. Teks menekankan kepada khalayak bahwa lokalisasi benar-benar akan ditutup pada tanggal yang sudah ditentukan. Dari struktur skrip, bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Disini Kompas mengisahkan bahwa lokalisasi Dolly akan tetap ditutup pada tanggal yang telah ditetapkan, dan akan dilakukan di gedung *Islamic Center* pukul 19:00 yang dihadiri oleh Salim Segaf Al Jufrie.

Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks adalah *who* (Salim Segaf Al Jufrie), *Where* (gedung *Islamic Center*), *what* (deklarasi penutupan Dolly), *when* (Rabu, 18 Juni pukul 19:00). Sedangkan dari struktur tematik, berita itu membawa tema besar yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Tema tersebut ialah penutupan lokalisasi Dolly akan tetap dilakuka sesuai tanggal yang ditetapkan, tema tersebut disusun secara detail dan panjang.

Frame Kompas juga dapat dilihat dalam struktur retorik. Aspek retorik tertentu untuk menekankan makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum. Disini berita ditekankan pada aspek grafis yaitu dengan judul berita yang bercetak tebal, makna yang ingin disampaikan dalam judul berita tersebut ialah untuk mendukung gagasan yang ingin ditonjolkan.

6. Keenam, berita dengan judul: Uang Kompensasi Dibagikan, terbit edisi Jumat 20 Juni 2014

Adapun berita keenam adalah sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS-Kamis (19/6), Pemerintah Kota Surabaya mulai membagikan uang kompensasi kepada mantan pekerja seks komersial dan mucikari dari lokalisasi Dolly dan Jarak. Pembagian uang itu merupakan langkah awal rehabilitasi warga setelah penutupan lokalisasi dilakukan secara bertahap selama lima hari sejak Kamis.

“Jika lima hari tak ambil, uang itu dikembalikan ke pemerintah pusat,” kaa Wali Kota Tri Rismaharini, Kamis, di Surabaya, Jawa Timur.

Uang kompensasi itu diharapkan bisa digunakan mantan pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari sebagai modal beralih profesi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberi bantuan uang kompensasi untuk 1.449 bekas PSK Dolly-Jarak sebesar Rp 7,3 miliar sehingga setiap orang mendapat Rp 5,05 juta. Dana itu terbagi Rp 1,8 juta untuk tunjangan hidup, Rp 3 juta untuk modal usaha, dan Rp 250.000 untuk biaya transportasi pulang ke daerah asal. Sebagian besar PSK di lokalisasi Dolly-Jarak berasal dari luar daerah.

Uang kompensasi untuk 311 mantan mucikari Dolly-Jarak diberikan Pemerintah Provinsi Jatim sebesar Rp 1,5 miliar. Setiap orang mendapat sekitar Rp 5 juta. Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan Rp 16 miliar untuk mengalihfungsikan wisma, tempat PSK dibekas lokalisasi Dolly-Jarak, menjadi sentra industri rumahan dan sentra perdagangan.

Pembagian uang kompensasi dilakukan di Koramil 0832/01 Sawahan, Surabaya, yang terletak didekat bekas lokalisasi. Kamis sore, tercatat 79 mantan PSK dan 23 mantan mucikari yang datang. Mantan PSK mendapat uang dalam rekening di Bank Jatim. Mantan mucikari menerima uang tunai.

Kepala Polresta Surabaya Komisaris Besar Setija Junianta mengatakan, pembagian dana kompensasi dilakukan di Koramil karena dekat dengan bekas lokalisasi. “Kami dan TNI membantu tahapan yang dilakukan Pemkot Surabaya,” kata dia.

Sementara itu, warga yang menolak penutupan lokalisasi dan tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Kamis sore, menyatakan tidak mengakui deklarasi penutupan lokalisasi Dolly-Jarak yang dilakukan Rabu malam dan dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al’jufrie. Mereka menolak menerima uang kompensasi pula.

“Penutupan ini tak ada landasan hukumnya. Dolly tetap buka,” kata juru bicara FPL, Saputro.

Mereka kembali menggelar aksi dengan berjalan kaki di sepanjang Jalan Jarak, Surabaya. Akses ke Dolly kembali diblokade. Namun, Risma menegaskan tidak peduli dengan penentang itu dan tetap merehabilitasi warga. “Biarkan saja. Mereka itu bukan warga Surabaya,” kata dia.

Bebas lokalisasi

Kamis, Risma menyatakan Surabaya sudah bebas lokalisasi. Sejak tahun 2010, satu per satu lokalisasi ditutup. Selain Dolly dan Jarak, lokalisasi lain yang juga ditutup adalah di kawasan Tambak Asri, Klakah Rejo, Moro Seneng, dan Dupak Bangunsari.

Rencana penutupan lokalisasi bermula ketika Risma mengetahui masih banyak kasus perdagangan manusia di Surabaya dan lokalisasi menjadi pasarnya. Dia pun mulai bersosialisasi dengan mengunjungi setiap sekolah yang terdampak lokalisasi. Ia menemui PSK dan warga terdampak dengan memberi tahu ada usaha lain yang lebih baik dan menguntungkan. Tokoh agama diajak mendampingi warga pula.

Bagi Risma menutup lokalisasi bukan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi menyelamatkan generasi muda. Pro dan kontra tidak hanya dari penghuni lokalisasi, tetapi juga dari Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Whisnu meminta penundaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.

Risma mengingatkan pula, lokalisasi menyiptakan lingkungan buruk sehingga warga yang tinggal disekitarnya tidak pernah menikmati hidup tenang dan perkembangan mental kaum mudanya buruk. Tidak ada semangat berprestasi di sekolah. Fenomena ini terjadi karena kondisi tempat tinggal benar-benar bisung hingga kini hari. Selain itu, banyak

PSK juga menderita HIV/AIDS dan tidak terurus.
(DEN/ETA)

Analisis sintaksis dari pandangan Kompas terwujud dengan skema atau bagan berita dengan judul “Uang Kompensasi Dibagikan”. Perangkat sintaksis lain yang digunakan adalah *lead*. *Lead* yang digunakan adalah sebagai berikut:

“Penutupan Dolly Tetap Ditolak”

Sudut pandang dari *lead* diatas menunjukkan bahwa warga Dolly tetap menolak penutupan lokalisasi di gang Dolly-Jarak, serta menolak uang kompensasi. Ini bisa diamati dari kutipan sebagai berikut:

“Juru bicara FPL (Front Pekerja Lokalisasi) Saputro mengatakan, penutupan ini tak ada landasan hukumnya. Dolly tetap buka”.

Dari analisis skrip, berita tersebut mengisahkan mengenai pemerintahan kota Surabaya mulai membagikan uang kompensasi kepada mantan PSK dan mucikari yang ada di lokalisasi Dolly dan Jarak. Dari berita tersebut unsur berita yang terdapat dalam teks berita tersebut ialah: *who* (Pemerintah kota Surabaya), *What* (uang kompensasi), *why* (tidak ada landasan hukum), *where* (Koramil 0832/01 sawahan, Surabaya), *when* (Kamis sore).

Dari sudut tematik (cara wartawan menulis fakta). Disini terdapat dua tema yaitu, pertama, pemerintah kota

Surabaya membagikan uang kompensasi kepada warga Dolly dan Jarak yang diharapkan bisa digunakan oleh mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari sebagai modal beralih profesi. Tema ini didukung dengan latar informasi yang mendetail.

Tema kedua, rencana penutupan lokalisasi yang dilakukan oleh Tri Rismaharini karena dia mengetahui ada banyak kasus perdagangan manusia yang terjadi di Surabaya dan lokalisasi menjadi pasarnya. Dari elemen wacana yang dipakai adalah detail dan bentuk kalimat yang diuraikan dengan detail dan panjang.

Dilihat dari struktur retorik yakni bagaimana cara wartawan menekankan fakta. Elemen grafis yang nampak dalam pemberitaan ialah dalam bentuk ekspresi judul dengan cetak tebal. Ini menunjukkan arti bahwa Kompas mengontrol perhatian dan ketertarikan terhadap berita tersebut sehingga perlu difokuskan.

7. Ketujuh, berita dengan judul: Proses Rehabilitasi Bekas Lokalisasi Butuh Waktu, terbit edisi Sabtu 21 Juni 2014

Adapun berita ketujuh yaitu sebagai berikut:

SURABAYA, KOMPAS- Dengan penutupan Dolly dan Jarak, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, telah menutup enam lokalisasi. Meski sudah ditutup, beberapa tempat hiburan malam dan wisma yang dulu digunakan untuk praktik prostitusi masih beroperasi di beberapa bekas lokalisasi tersebut, Jum'at (20/6). Ini menunjukkan proses rehabilitasi pasca penutupan lokalisasi membutuhkan waktu.

Di bekas lokalisasi di Klakah Rejo dan Moroseneng di Kecamatan Benowo, Dupak Bangunsari di Kecamatan Krembangan, masih ada tempat hiburan malam yang buka.

Penutupan lokalisasi di Surabaya dimulai dengan penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari pada akhir 2012. Kini, lingkungan di bekas lokalisasi itu sudah rapi dan bersih. Jalan yang semula aspal tidak rata sudah berganti dengan *paving block*. Beberapa masjid dan sekolah serta sentra industri rumahan sudah berdiri.

Namun, di sisi selatan kawasan itu masih terdapat beberapa tempat hiburan malam. Rata-rata berupa kafe yang ditemplei spanduk atau reklame merek bir.

“Kami tidak tahu apakah kafe-kafe itu masih digunakan untuk prostitusi, tetapi itu jadi ganjalan kami. Kami sebenarnya ingin kafe-kafe itu tidak ada,” kata Trisno, warga setempat.

Di Klakah Rejo juga masih terdapat rumah musik untuk karaoke dan kafe. “Tetapi, tidak ada lagi prostitusi didalamnya,” kata Muchlis Sadam, Ketua RT 002 RW 002 di Klakah Rejo.

Di Moroseneng juga masih ada wisma-wisma. Akhir Mei lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya merazia tempat itu dan menemukan 26 pekerja seks komersial yang beroperasi disana.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, proses rehabilitasi lokalisasi memang tak mudah dan setiap lokalisasi perlu penanganan berbeda. “Justru setelah penutupan tanggung jawab saya semakin berat untuk memberdayakan warga. Tetapi, kita tidak boleh lelah,” kata dia.

Meski demikian, kata Muchlis, warga dikampungnya berharap ada bantuan program pemberdayaan dari Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot menjanjikan membuka sentra pedagang kaki lima, tetapi belum terlaksana. (DEN)

Analisis sintaksis yakni cara wartawan menyusun fakta, dari pandangan Kompas terwujud dalam skema atau bagan berita dengan judul: “Proses Rehabilitasi Bekas Lokalisasi Butuh Waktu”. Dalam edisi tersebut berita ini tidak menjadi berita *headline* sehingga tidak mengandung tingkat kemenonjolan yang tinggi. Perangkat sintaksis lain ialah berupa latar. Latar yang dipilih yaitu tentang penutupan enam lokalisasi di Dolly dan Jarak oleh pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur. Latar ini memberikan kesan bahwa meskipun lokalisasi Dolly ini ditutup namun ada beberapa tempat hiburan malam dan wisma yang dulu digunakan untuk praktik prostitusi masih beroperasi.

Dalam struktur skrip disini akan dilihat bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta. Berita ini mengisahkan tentang lokalisasi yang sudah ditutup namun masih ada beberapa yang masih membuka praktik prostitusi di tempat hiburan malam dan wisma-wisma bekas lokalisasi. Unsur berita yang ada dalam berita ini adalah *what* (praktik prostitusi masih beroperasi), *where* (Dolly dan Jarak), *when* (Jumat), *why* (proses rehabilitasi butuh waktu dan penanganan berbeda).

Jika dilihat dari bagaimana cara wartawan menulis fakta (tematik) ialah pertama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia di Moroseneng dan menemukan 26 PSK masih beroperasi. Hal ini diuraikan secara detail

dalam berita tersebut. Kedua, warga kampung yang mengharapkan bantuan pemerintah kota Surabaya yang menjanjikan untuk membuka sentra perdagangan kaki lima, namun hingga saat ini belum terealisasi.

C. Frame Perbandingan Pemberitaan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dolly Pada Harian Kompas dan Republika Edisi Juni 2014

Disini penulis ingin menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama dapat dimaknai secara berbeda yang akhirnya menghasilkan berita yang berbeda pula.

Kompas menurunkan tujuh berita yaitu pada tanggal 5 Juni 2014 dengan judul “Cegah HIV, Penutupan Dolly Dipercepat”, tanggal 6 Juni 2014 dengan judul “Penghuni Dolly Mengadu ke Presiden”, tanggal 10 Juni 2014 dengan judul “Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha”, tanggal 13 Juni 2014 dengan judul “Komnas HAM; Dialog Perlu Ditingkatkan”, tanggal 18 Juni 2014 dengan judul “Polisi Jamin Keamanan Penutupan Dolly”, tanggal 20 Juni 2014 dengan judul “Uang Kompensasi Dibagikan”, dan tanggal 21 Juni 2014 dengan judul “Proses Rehabilitasi Bekas Lokalisasi Butuh Waktu”. Dari ketujuh judul berita diatas Kompas ingin menekankan bahwa disini Kompas memaknai pemberitaan itu merupakan suatu kejadian yang *real* terjadi, tetapi didalam pemberitaannya Kompas lebih menekankan pada pro-kontra antara Pemerintah Kota

Surabaya dan PSK beserta mucikarinya dan tidak serius dalam menanggapi kasus tersebut.

Sedangkan Republika menurunkan tujuh berita yaitu berita tersebut yaitu pada tanggal 5 Juni 2014 dengan judul “Warga Asli Sepakat Dolly ditutup”, tanggal 6 Juni 2014 dengan judul “Risma: Mayoritas Warga Dukong Dolly ditutup”, tanggal 10 Juni 2014 dengan judul “Warga Asli Dolly Diintimidasi”, tanggal 13 Juni 2014 dengan judul “Jangan Ada Konflik di Dolly”, tanggal 18 Juni 2014 dengan judul “Lokalisasi Dolly Ditutup”, tanggal 20 Juni 2014 dengan judul “Dolly Ditutup: PSK Tetap Buka Praktik” dan tanggal 21 Juni 2014 dengan judul “Deklarasi Penutupan Dolly Dinilai Mandul”. Dari ketujuh judul diatas SKH Republika ingin menekankan bahwa, disini Republika memaknai kejadian itu *real* dan sekaligus menghimbau pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan menyelesaikan secara tuntas kasus tersebut.

Dalam menyikapi pemberitaan masalah penutupan lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya, Republika memberitakan kasus tersebut secara penuh, dalam bentuk *straight news*, selain itu juga ada tulisan dalam bentuk *features*, artikel dan kolom untuk mendukung gagasan itu, tetapi guna menganalisis framing ini penulis mengambil tujuh berita untuk mewakili. Dalam pandangan Republika masalah tersebut penting untuk diketahui masyarakat karena merupakan masalah yang menyangkut sara dan

bila dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi dikemudian hari.

Dengan mengekspos kasus secara lebih dalam di SKH Republika, setidaknya ada beberapa hal yang ingin ditekankan. Pertama, agar masyarakat mengetahui berita tersebut dengan lebih jelas. Masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan yang terburu-buru dengan cara menghakimi, melakukan kekerasan dan paksaan. Kedua, pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan tegas menyangkut masalah penutupan lokasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap data teks berita Republika dan Kompas. Hasil penelitian kedua surat kabar tersebut terdapat perbedaan dalam memframing berita penutupan lokalisasi Dolly di media massa melalui berita yang ditampilkan kepada khalayak.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama bisa dimaknai secara berbeda. Dalam kasus penutupan lokalisasi prostitusi Dolly di media massa antara Republika dan Kompas mempunyai framing yang berbeda. Adapun frame Republika mengenai peristiwa penutupan lokalisasi prostitusi Dolly jika dilihat dari struktur Sintaksis, Republika selalu menampilkan berita tersebut di halaman *headline* (kepala berita), struktur Skrip (5W+1H) yang terdapat dalam pemberitaan di surat kabar harian Republika selalu lengkap, struktur Tematik menyangkut penyusunan kata dalam paragraf di surat kabar harian Republika seringkali tidak lengkap, sedangkan jika dilihat dari struktur Retoris, Republika gambar yang berupa karikatur atau foto dalam setiap pemberitaannya. Sedangkan dalam surat kabar harian Kompas.

Sebaliknya, frame Kompas tidak menampilkan halaman *headline* dari struktur Sintaksis dalam setiap pemberitaannya,

Struktur Skrip (5W+1H) yang terdapat dalam pemberitaan di surat kabar Kompas tidak lengkap, jika dilihat dari struktur Tematik yang menyangkut penyusunan kata dalam paragraf di surat kabar harian Kompas selalu tersusun dengan lengkap. Sedangkan jika dilihat dari struktur Retoris, Kompas hanya menampilkan satu gambar dari tujuh pemberitaan yang ditampilkan.

Dalam hal ini Republika maupun Kompas mempunyai strategi wacana tersendiri dalam memframing peristiwa tersebut. Frame itu menentukan bagaimana fakta itu diambil, siapa yang diwawancarai, bagaimana hasil wawancara diperlakukan, bagaimana berita ditulis dan ditempatkan dalam halaman surat kabar.

B. Saran

Dalam penulisan sebuah berita, seorang wartawan dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk pemahamannya mengenai suatu masalah. Oleh karenanya sebagai penikmat media massa khususnya koran, harus mampu menyerap informasi yang disebarkan oleh wartawan.

Penyerapan informasi di media massa hendaknya pembaca jangan hanya membaca satu berita dalam satu media massa saja, tetapi beberapa surat kabar. Hal ini bertujuan agar pembaca mempunyai banyak referensi mengenai suatu pemberitaan.

C. Penutup

Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmatNya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Sekali lagi ucapan syukur penulis panjatkan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, karena tanpa hidayah dan inayahNya, penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis berdoa semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam. Amin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya penelitian yang terbaik, namun harus diakui, bahwa karya penelitian (skripsi) ini masih banyak kekurangannya baik menyangkut data atau ketajaman analisis. Maka agar pembahasan terhadap tema penelitian ini menjadi lebih baik, sumbangan saran dari pihak-pihak yang berkompeten sangat penulis harapkan. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ardianto, E dan L. K. Erdinaya. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Assegaff, D. H. 1983. *Jurnalistik Masa Kini Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Bandung.
- Djuroto, T. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- _____. 2005. *Teknik Mencari dan Menulis Berita*. Dahara Prize. Semarang.
- Effendy, O. U. 2006. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Eriyanto, 2004. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Cetakan Kedua. LkiS. Yogyakarta.
- Fisher, B.A. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Kasman, S. 2010. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia: Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*. Balai Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI.
- Kusumaningrat, H, dan P. Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Muhtadi, A.S. 1999. *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktek*. PT. Logos Wacana Ilmu. Jakarta.
- Nurudin, 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rachmadi, F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Gramedia. Jakarta.
- Rahabeat, R. 2004. *Politik Persaudaraan: Membedah Peran Pers*. Buku Baik. Yogyakarta.
- Rakhmat, J. 1998. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Cetakan Kesepuluh. Mizan. Bandung.
- Santana, S. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Sobur, A. 2006. *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suharsimi, A. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Sumadiria, H. 2005. *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Suryabrata, S. 1995. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahyudi, JB. 1991. *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar, Majalah, Radio dan Televisi*. Alumni. Yogyakarta.

Skripsi:

Darmanto. 2005. Pemberitaan Media Massa Tentang Pengakuan Lembaga Internasional Worldhelp yang Membawa 300 Anak Korban Bencana Alam Tsunami di Aceh (Analisis Framing Harian Republika dan Kompas). (Tidak Dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo. Semarang).

Al Basyari, M.M. 2008. Framing Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji 2008/1429 H di Harian Kompas dan Republika Edisi Desember 2008. (Tidak Dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta).

Ngatmin, M. 2007. Analisis Framing Kasus Poligami K.H Gymnastiar Di Media Kompas Dan Republika. (Tidak Dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta).

Risnova, A. 2011. Pembingkai Media Atas Pemberitaan Peristiwa Bentrokan Antara Warga Dengan Jemaah Ahmadiyah Di Cekeusik (Studi Analisis Framing Pemberitaan Peristiwa Bentrokan Antara Warga Dengan Jemaah Ahmadiyah Di Cekeusik Pada Media Televisi Tv One Dan Metro Tv). (Tidak Dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Surabaya).

Zaidah, N. 2006. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Muktamar Ke-31 Nahdlatul Ulama Di Surat Kamar Suara Merdeka Edisi Nopember-Desember 2004. (Tidak Dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo. Semarang).

Surat Kabar:

“Cegah HIV, Penutupan Dolly di Percepat” *Kompas*, 5 Juni 2014.

“Komnas HAM: Dialog Perlu Ditingkatkan” *Kompas*, 13 Juni 2014.

“Penghuni Dolly Mengadu ke Presiden” *Kompas*, 6 Juni 2014.

“Polisi Jamin Keamanan Penutupan Dolly” *Kompas*, 18 Juni 2014.

“Proses Rehabilitasi Bekas Lokalisasi Butuh Waktu” *Kompas*, 21 Juni 2014.

“Uang Kompensasi Dibagikan Penutupan Dolly Tetap Ditolak” *Kompas*, 20 Juni 2014.

“Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha” *Kompas*, 10 Juni 2014.

Surat Kabar Harian Kompas, Edisi 6 Maret 2015

Surat Kabar Harian Republika, Edisi 10 Maret 2015

Internet:

Akbar, A. 2012. <http://adexshare.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-media-massa-beserta-contoh.html>, diakses 16 April 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Republika> (Surat kabar), diakses pada 9 Maret 2015.

Irwanto, I. 2012. <http://www.hidupkatolik.com/2012/01/11/jakob-oetama-dalam-lintasan-sejarah-pers>, diakses 27 Maret 2015.

<http://www.mosco.or.id/sejarah-harian-kompas-sebagai-pers-partai-katolik/> diakses 27 Maret 2015.

Koran Republika. 2014. *Ormas Dukung Risma Tutup Dolly*, dalam http://www.scraperone.com/koran/republika_20140605.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

———. 2014. *Tajuk: Dukung Penuh Penutupan Dolly*, dalam

http://www.scrapone.com/koran/republika_20140605.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

_____. 2014. *Risma: Mayoritas Warga Dukung Dolly di Tutup*, dalam http://www.scrapone.com/koran/republika_20140606.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

_____. 2014. *Warga Asli Dolly di Intimidasi*, dalam http://www.scrapone.com/koran/republika_20140610.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

_____. 2014. *Jangan Ada Konflik di Dolly*, dalam http://www.scrapone.com/koran/republika_20140613.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

_____. 2014. *Lokalisasi Dolly di tutup*, dalam http://www.scrapone.com/koran/republika_20140618.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

_____. 2014. *Dolly di tutup, PSK Tetap Buka Praktik*, dalam http://www.scrapone.com/koran/republika_20140620.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

_____. 2014. *Deklarasi Penutupan Dolly di Nilai Mandul*, dalam http://www.scrapone.com/koran/republika_20140621.pdf., diakses pada 24 Mei 2014.

Wuryanto, E.W. 2006. *Priming- Framing- Agenda Setting?* <http://ekawenats.blogspot.com/2006/12/priming-framing-agenda-setting.html#links>., diakses pada 22 Oktober 2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Republika, Kamis 5 Juni 2014

Warga Asli Sepakat Dolly Ditutup

■ Rr Lenny Sulistyawati,
Wahyu Syahputra

SURABAYA — Warga asli sekitar lokasi prostitusi Dolly Surabaya, Jawa Timur, sepakat apabila lokasi tersebut ditutup secara permanen. Lilik Rumiya, warga di lokasi Dolly yang tinggal di Patat Jaya Barat, mengatakan, warga asli di sekitar lokasi tersebut sepakat meminta Pemerintah Kota Surabaya menutup Dolly pada 18 Juni 2014.

"Sudah tidak setuju Dolly ditutup justru datang dari pekerja seks komersial (PSK) dan mencikanya," kata Lilik saat ditemui di lokasi Dolly Surabaya, Rabu (4/6).

Menurut Lilik, PSK dan pekerja itu berasal, jika prostitusi Dolly ditutup, tidak ada penghasilan yang masuk ke kantong mereka. Warga menilai, para PSK dan pekerja itu orang malas yang hanya berpikir bisa memperoleh uang dengan keberadaan Dolly. "Padahal, keberadaan maupun aktivitas prostitusi Dolly sangat merugikan masyarakat sekitar."

Adanya Dolly membuat kawasan setempat tidak aman. Tak hanya itu, para istri yang memiliki suami dan tinggal di sana merasa takut kalau suaminya terlibat keberadaan PSK. Hal lain yang membuat khawatir kaum ibu adalah anak-anak kecil bisa melihat aktivitas mereka. Anak-anak yang

Warga Asli Sepakat Dolly Ditutup

dari hlm 1

terbiasa melihat pentas hiburan di sekitar mereka akhirnya mulai berani merokok, minum minuman keras, sampai melakukan seks bebas ketika beranjak dewasa. "Kami juga khawatir PSK yang terkena virus HIV/AIDS menularkan penyakitnya kepada warga. Karena, sudah ada beberapa warga yang tertular virus HIV/AIDS," kata Lilik.

Lilik sebenarnya ingin segera pindah dari kawasan tersebut. Namun, rumah yang tidak kunjung dibeli orang. Mau tidak mau, Lilik harus hidup di kawasan itu selama 42 tahun dan memandang perasaan keberadaannya terakut eksistensi Dolly. Untuk itu, warga asli mendukung penuh rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang memberi keputusan penutupan Dolly pada 18 Juni 2014.

Hingga kemarin, aktivitas di lokasi Dolly-Jarak tidak ada yang berubah dari hari-hari sebelumnya. Pada malam hari, suasana Dolly dipenuhi lampu dan adanya genjring yang menerangi para pengunjung bertandanan motor. Para PSK tetap bekerja dan memamerkan keseksan tubuhnya dengan duduk-duduk di balik

jendela transparan wisma.

Sebagian PSK ada yang duduk di luar wisma sambil merokok dengan menggunakan pakaian minim, seperti tank top dan celana pendek. Beberapa laki-laki berdiri belang belang melingkari wisma. Genjring dan musik juga terdengar dari dalam wisma.

Pada waktu yang sama, banyak anak-anak pelajar (SD, SMP, SMA) dan remaja yang lalu-lalang melewati lokasi Dolly-Jarak. Di beberapa wisma terpasang spanduk merah yang berisi penolakan penutupan Dolly. Umumnya, spanduk bertuliskan kalimat "Hanya Mati Toak Penutupan Lokasi".

Humas Front Pekerja Lokalisasi (FFPL) Dolly Siamet Sugiono mengatakan, para pekerja Dolly tetap mematuhi rencana penutupan lokasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu. Penutupan lokasi merupakan urusan pemerintah dan bisa membahayakan pekerjaan pekerja. Dia mengklaim, dampak penutupan Dolly bisa meluas dan tidak hanya menimpa PSK dan pekerja, tapi

juga berimbas kepada warga sekitar. "Kalau Pemkot Surabaya tetap menutup Dolly, kami siap bertahan habis-habisan, menolak penutupan," ujar Siamet.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Awi Setijono mengatakan, kepolisian akan melakukan pengendalian terhadap rencana Pemkot Surabaya menutup Dolly.

"Pencapaian akan dicapai dari Polarisasi Surabaya melalui dan Polda Jawa Timur. Polisatues Surabaya sedang mengawal kegiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Pihak Jatim tentunya akan look up kewilayahan," terang Awi.

Wali Kota Surabaya, kata Awi, sudah melakukan audiensi dengan Kapolrebas Surabaya tentang rencana penutupan Dolly. Kepolisian pun berjanji akan mengamankan dan menyiapkan pasukan tambahan untuk menjaga hama hama.

Saat penutupan nanti, kata Awi, pada hari-hari pertama akan dilakukan pentas aksi. Saat itu, kepolisian dan Pemkot Surabaya sudah merencanakan upaya persuasif terhadap warga yang masih menolak penutupan Dolly. "Kita ingin jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan terjadi," ujar Awi.

■ edo-an.com

Risma: Mayoritas Warga Dukung Dolly Ditutup

● Esthi Maharani, Rr Laeny Sulistawati

JAKARTA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakini mayoritas masyarakat Surabaya mendukung kebijakannya untuk menutup kawasan lokalisasi prostitusi Dolly. Risma mengatakan, tak akan mundur dari kemennya menutup lokalisasi itu pada 18 Juni mendatang.

"Warga di Surabaya banyak yang support, bukan warga di sekitarnya," kata Risma, di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (5/6). Menurutnya, penutupan lokalisasi itu memang bukan perkara mudah. Namun, ia yakin langkah itu bukan hal yang mustahil dilakukan.

Risma berisani, tujuan penutupan ini tak lain menyelamatkan masa depan para pekerja seks komersial (PSK) dan anak-anak yang ada di sekitar lokalisasi. Secara aturan, pemerintah bisa saja sepihak menutup kawasan itu. Namun, akan lebih baik jika kebijakan pemerintah mendapat dukungan tanpa melalui jalan kekerasan. "Nggak apa-apa, saya kan harus menyelamatkan yang lebih besar lagi. Masa depan bangsa ini harus diselamatkan," katanya.

Bersambung ke hlm 7 ket 46

Risma: Mayoritas Warga Dukung Dolly Ditutup

dari hlm 1

Sejumlah PSK lokalisasi prostitusi Dolly Jark. Kota Surabaya, pada Kamis (5/6), menulis surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno mengatakan, para PSK sebenarnya berencana ke Jakarta guna bertemu SBY.

Mereka ingin menyampaikan langsung kepada SBY selaku pemimpin negara supaya tidak menutup lokalisasi prostitusi Dolly pada 18 Juni 2014. Para PSK Dolly, kata Suyitno, hanyalah rakyat kecil yang ingin menghidupi anak dan keluarganya. "Tetapi, kalau ribuan PSK ke Jakarta, berapa biaya yang harus kami siapkan?" kata Suyitno, kepada *Republika*.

Suyitno mengklaim ada 1.400 PSK yang menulis surat untuk SBY. Sebagian besar isi surat PSK berisi ciuman hati mereka menjelang penutupan Dolly. "Isi suratnya belasan, ada yang menjadi urek-urek para PSK, termasuk penakikan penutupan Dolly," ujarnya.

Surat-surat itu semuanya akan diantar langsung oleh

pengurus FPL ke Istana Negara, pada Senin (9/6). Jika isi surat itu diterima tak digubris SBY, FPL memastikan akan tetap menolak penutupan salah satu lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu.

Bahkan, kalau Dolly benar-benar ditutup, FPL berniat menempuh jalur hukum. "Kami akan menuntut pelajaran pemerintah yang mendukung penutupan Dolly, seperti Risma dan Gubernur Jatim Soekarwo se neja hujat. Ini negara hukum dan kami sudah siapkan kuasa hukum," kata Suyitno.

Pantauan *Republika*, aksi menulis surat untuk SBY dilakukan para PSK sekitar pukul 10.00 WIB di jalan gang Dolly. Ribuan PSK dengan mengenakan masker, penutup wajah, dan kaca mata duduk berbaris menulis surat di atas kertas putih KVS ukuran A4. Aksi tulis surat berakhir sekitar pukul 11.00.

Sosilog dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsu) Surabaya Husnul Muttaqin mengatak, keberadaan lokalisasi prostitusi Dolly telah menghasilkan banyak pihak, yaitu warga di

Dolly masyarakat luas, hingga PSK Dolly itu sendiri.

Sebelumnya, kata Husnul, anggota pemerintah menutup Dolly tidak dapat dilakukan. Dia ingat, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memang ingin menutup bisnis haram itu sejak 2010. Saat itu, pemerintah berupaya melakukan penutupan dengan cara memusnahkan. Hasilnya, beberapa warganya di Dolly berhasil ditutup.

Bahkan, ada menkari yang berbohok dan kemudian bergabung dalam Ikatan Doli Area Lokalisasi (Idali). Tak hanya itu, beberapa PSK dengan sukarela berhenti dari pekerjaannya dan memilih pulang ke kampung halamannya. "Artinya, semua penutupan itu ada proses sosialisasinya dan sudah ada hasilnya. Jadi, bukan mendadak," kata Husnul, kemarin.

Keeksistensi prostitusi Dolly dinilainya mengancamkan banyak pihak. Husnul mengatakan, anak-anak sekitar Dolly bisa terpengaruh dengan perilaku Dolly karena berdekatan melihat aktivitas seksual di tempat itu. Masyarakat juga mungkin korban karena diantar sekitarnya memiliki jasa prostitusi Dolly. ■ *ed. esthi maharani*

Warga Asli Dolly Diintimidasi

■ Rr Laeny Sulistyawati

Wali Kota Surabaya tetap menutup Dolly pada 18 Juni 2014.

SURABAYA — Kokerasan berupa pemukulan dan intimidasi kini dialami warga asli Dolly. Hal tersebut terjadi karena warga asli dan anak-anak yang tinggal di kompleks lokalitas prostitusi Dolly-Joralek, Surabaya, mendukung tempat itu ditutup. Wali Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini (Risma) mengungkap, warga asli yang mendukung penutupan kerap diintimidasi dan bahkan dipukul.

Menurutnya Dolly akan tetap ditutup sesuai jadwal, yaitu 18 Juni 2014. Dia menjelaskan, ada dua landasan hukum yang kuat mengapa Dolly harus ditutup. Pertama, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1999 mengenai larangan bangunan atau rumah tinggal difungsikan sebagai tempat asusila dan sebagai tempat penitikan melaksanakn tindak asusila.

Kedua, yaitu Undang-Undang Perdagangan Manusia (*human trafficking*). Sebagai aparat pemerintah,

Anggaran Penutupan Dolly	
Kementerian Sosial	Rp 8 miliar (untuk dana kompensasi)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Rp 1,5 miliar (untuk kompensasi mucikari)
Pemerintah Kota Surabaya	Rp 16 miliar (untuk pembebasan lahan)
Total :	Rp 25,5 miliar
Sumber : Wali Kota Surabaya	

Risma menegaskan harus menegakkan aturan tersebut. Risma mengaku mendapatkan banyak dukungan untuk menutup Dolly. Mayoritas warga asli Dolly pun mendukung agar kompleks prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu ditutup secara permanen.

Namun, dia menyayangkan adanya pihak yang kerap mengintimidasi bahkan main aksi pukul terhadap warga Dolly. "Kau tidak adil seperti itu, karena warga bisa saja berubah pikiran dan mendukung penutupan namun diintimidasi," kata Risma, Senin (9/6).

Sayangnya, Risma tidak menyebut siapa pihak yang mengintimidasi warga. Risma mengaku sudah menyampaikan fakta adanya intimidasi warga itu kepada pihak keamanan. Kini, pihak keamanan siap memberikan pengamanan.

Tak hanya warga, Risma juga

menceritakan bahwa ia banyak mendapat kiriman surat dari anak-anak yang tinggal di lokalitas. Anak-anak tidak beres itu mengucapkn terimakasih kepada Risma karena pada akhirnya tempat prostitusi itu ditutup. Anak-anak itu juga berterima kasih karena akhirnya bisa belajar setelah Dolly benar-benar ditutup.

Terkait aksi tulis surat yang dilakukan para pekerja seks komersial (PSK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Risma tidak mempersalahkannya.

Menurutnya, tidak hanya muncikan dan pemilik wisma yang memiliki hak. "Anak-anak yang tinggal di Dolly itu juga punya hak dan saya bisa juga bisa laporkan ke Komnas HAM," ujarnya.

Untuk menutup Dolly, Pemkot

Surabaya menyiapkan anggaran yang tidak main-main. Sebetulnya, Rp 25,5 miliar anggaran disiapkan untuk penutupan Dolly. Dana tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurutnya, wisma-wisma yang ada di Dolly akan dibeli Pemkot Surabaya dan segera dialihfungsikan. Kalau tempatnya luas, kata Risma, akan dibuat menjadi taman sentra pedagang kaki lima (PKL). Sehingga, para PKL yang berjualan di Dolly tetap bisa berjualan di kawasan tersebut. "Jika luas wisma kecil, akan dijadikan perpustakaan dan pusat pembelajaran teknologi informasi," katanya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya Zayin Chudlori membenarkan bahwa para warga maupun PSK Dolly yang mendukung penutupan mendapat tekanan. Hal itu terungkap saat pihaknya mengumpulkan 16 warga dan PSK. Abad (8/6) lalu. Hasilnya, kata dia, mereka semua ingin berubah.

Namun, para PSK maupun warga yang ingin bertobat itu mendapat tekanan. "Mereka diintimidasi, bahkan ada yang diancam tidak boleh menerima bantuan," ujarnya.

■ ada and not a man

Jangan Ada Konflik di Dolly

■ Rr Laeny Sulistyawati

Komnas HAM meminta penutupan Dolly dikaji ulang.

SURABAYA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pemerintah Kota Surabaya mengkaji ulang rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni mendatang. Hal tersebut karena masih adanya warga yang menolak.

"Kalau sampai ada kekerasan, pihak kepolisian juga terlibat dalam pelanggaran HAM itu. Makanya, kalau ada konflik kita tidak mau," kata Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi saat menghadiri mubarak bebas di Gang Dolly Surabaya, Kamis (12/6).

Menurutnya, Komnas HAM menemukan berbagai indikasi adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah. Namun, hasil investigasi tersebut masih belum final.

Intinya, lanjut dia, Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM, yang lebih menyudutkan kondisi perekonomian bagi perempuan PSK maupun warga terdampak. Sebab, hingga kini juga pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga belum dissolution warga.

Dianto mengatakan, akan menemui Wali Kota Surabaya untuk mengonfirmasi terkait beberapa

data temuan investigasi. Seluruh laporan tersebut akan disampaikan ke pemerintah. Dia mengatakan, setidaknya ada sebuah fakta yang harus diketahui jika penutupan dilakukan.

Rencana pembangunan, misalnya, tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah meskipun tujuannya baik. Dia khawatir jika penutupan Dolly tetap dipaksakan, akan terjadi kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM.

Lebih jauh, dia menyebut masalah prostitusi yang terjadi di suatu

sampai ada saling menghujat, tidak ada pemaksaan. Di negeri ini HAM harus ditegakkan," tegasnya.

Dianto mengatakan, Pemkot Surabaya harusnya mencontoh penutupan lokalisasi prostitusi di Bandung, Jawa Barat, yang berjalan lancar tanpa adanya gejolak. Dia menilai, jika penutupan lokalisasi Dolly bermasalah, artinya Pemkot tidak memiliki manajemen penutupan yang baik. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya dialog antara pemerintah dengan warga di Dolly.

"Padahal, pemerintah seharusnya memiliki manajemen yang baik dan terencana. Sehingga, Dolly dapat ditutup dengan bijaksana," katanya.

Sementara itu, berbagai aspirasi dan bentuk kekecewaan juga disuarakan oleh perwakilan PSK maupun pengurus PKK di dua lokalisasi. Meski pihak panitia telah menyediakan kursi bagi Gubernur, Wali Kota, maupun Kepala Dinas Kota Surabaya, namun kursi tersebut kosong.

"Diundang seperti ini tidak mau hadir. Tapi, penutupan terus diwujudkan, tolong sampaikan ke Wali Kota jangan sekenanya sendiri," kata Novi, salah seorang pekerja seks komersial (PSK).

PSK lainnya, Santi mengatakan, keberadaannya di Dolly tidak main-main yaitu mencari nafkah untuk diri sendiri, anak, dan keluarganya. Untuk itu, ia menolak keras rencana penutupan Dolly meski diberi janji kompensasi.

■ [antard](#) and [na](#) aminah

“
Ada dugaan pelanggaran HAM di Dolly oleh pemerintah.

daerah sebenarnya hanya permasalahan hiltir bukan hulu. Menurutnya, jika negara mampu memberikan kehidupan yang layak bagi warganya, prostitusi itu akan hilang dengan sendirinya.

Karena itu, Dianto berharap pemerintah tidak bersikap semena-mena tanpa menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. "Saya menghormati semua pendapat karena negara ini adalah negara demokrasi. Yang terpenting, jangan

Dolly Ditutup, PSK Tetap Buka Praktik

■ Bambang Noroyono

SURABAYA – Sehari pasca deklarasi penutupan lokasi Dolly dan Jarak di Kota Surabaya, Jawa Timur, aktivitas prostitusi di dua daerah itu masih terlihat. Para pekerja seks komersial (PSK), mucikari, dan pemilik wisma mengabaikan konferensi Permerintan Kota Surabaya yang secara formal sudah menutup lokasi penutupan terbesar di Asia Tenggara itu.

Mereka melakukan kegiatan seperti biasa seakan tak pernah ada keputusan penutupan lokasi. Amin, pengurus wisma dan bar terbesar di

Gang Dolly, mengatakan, kesepakatan warga dan para pekerja tetap membolehkan kegiatan menjual diri para PSK. Penghuni dan PSK Dolly akan tetap menolak segala macam upaya Pemkot Surabaya menghilangkan mata pencarian mereka.

"Kita tetap buka saja. Wisma-wisma yang lain lihat saja, pada buka semua toh," kata Amin kepada *Republika*. Kamis (19/6) malam. Upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menutup Dolly dan Jarak akan berakhir pada kesia-siaan. Apalagi, se-



Wali Kota tak
Boleh Fasilitas
Prostitusi

Hlm- 7

Anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly-Jarak, Andre, menyatakan penghuni tetap akan melawan apa pun kebijakan pemerintah untuk menutup lokasi Dolly dan Jarak. Andre yang juga pengurus lima wisma di Dolly mengaku tak jera jika ada pengusiran wisma.

Berdasarkan pantauan *Republika*, Kamis (19/6) malam, aktivitas di Dolly dan Jarak memang masih normal

dan Jarak bersama Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, tidak ada razia atau upaya penertiban hukuman terhadap PSK yang praktik di Dolly dan Jarak.

Anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly-Jarak,

Meski tak seramai hari biasanya, aktivitas PSK tetap mencolok di sepanjang Jalan Giriwara hingga Jalan Jarak dan juga Gang Dolly.

Kondisi itu berbeda dibandingkan pada Rabu (18/6) malam. Saat pengumuman penutupan Dolly dan Jarak itu, tak satu pun pemilik wisma dan PSK mengoperasikan bisnis prostitusinya. Bahkan, pemilik warung kopi dan rokok (gaul) pun tidak buka.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, Pemkot memberi batas waktu lima hari bagi para penghuni dan pemilik usaha prostitusi di Dolly-Jarak untuk mengubah haluan nafkah hidup mereka. ■ *edn:enm*

Deklarasi Penutupan Dolly Dinilai Mandul

■ Bambang Noroyono

SURABAYA — Deklarasi penutupan lokasi prostitusi Dolly dan Jarak di Surabaya, Jawa Timur, dinilai mandul. Ketua DPRD Kota Surabaya Muhammad Machmud mengatakan, deklarasi terbukti tak mampu menghentikan aktivitas prostitusi di Gang Dolly dan Jarak.

Para pekerja seks komersial (PSK) dan muckiri tetap menjalankan praktik bisnis pelacuran bersama para pemilik wisma. "Mesinya sudah tidak boleh ada lagi praktik prostitusi di Dolly dan Jarak. Itu kon sudah deklarasi-kon bersama penutupannya. Kalau masih ada, ya berarti deklarasi-manya mancul dong," kata Machmud kepada *Republika*, Jumat (20/6).

Machmud yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, DPRD akan terus memantau langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pasca deklarasi penutupan Dolly yang dihadiri langsung Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Wali Kota Surabaya menegaskan, riwayat Dolly dan Jarak sebenarnya sudah tamat. Dengan deklarasi penutupan lokasi Dolly dan Jarak pada Rabu (18/6) malam, Surabaya sudah bebas dari

Deklarasi Penutupan Dolly Dinilai Mandul

dari hlm 1

lokalisasi.

Pemkot Surabaya, kata Risma, memberi batas waktu lima hari bagi penghuni dan pemilik usaha prostitusi di Dolly dan Jarak untuk mengubah haliuan pekerjaan dan nafkah hidup mereka. "Semua sarana hukum akan dikerahkan untuk melawan penolakan penutupan lokasi ini," ujar dia.

Machmud menyatakan, meski pemkot memberi batas waktu lima hari, bukan berarti masa toleransi tersebut bisa digunakan PSK dan muckiri untuk tetap membuka praktik prostitusi di Dolly. Waktu lima hari hendaknya digunakan PSK dan muckiri untuk mengambil dana kompensasi yang disediakan pemerintah. "Tapi pemerintah sudah jelas, yakni Dolly harus tetap ditutup. Kita tetap mendukung itu. Silakan ditindak kalau ada yang bandel masih buka," ujar Machmud.

Dua hari pasca deklarasi penutupan lokasi terbesar di Asia Tenggara itu, kondisi Dolly dan Jarak tidak berubah. Pada Jumat (20/6) malam, wisma-wisma yang menjadi lokasi PSK menjajakan diri masih buka seperti hari-hari biasa. Meskipun jumlah pengunjung berkurang, tapi para muckiri tetap menyiapkan PSK kepada pengunjung yang datang.

Di Gang Dolly, hanya lima dari sekitar 50 wisma PSK yang memilih tutup. Andre, pengurus Wisma PSK Sumber Rejeki dan Putri Ayu mengatakan, tidak semua wisma yang tak bersedia merupakan pendukung penutupan Dolly. "Kalau yang di tempat saya memang lagi libur saja. Biasanya libur menjelang Ramadhan. Kalau yang lainnya memang ada yang tutup," kata Andre yang juga anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPLA) Dolly.

Andre melanjutkan, para PSK biasanya memang sedang menikmati liburan menjelang Ramadhan hitago Lebaran. "Nanti, habis Lebaran, ya buka lagi. Biasanya memang seminggu sebelum puasa mereka pilih pulang kampung," ujar Andre.

Menurut Andre, pemilik wisma menanti kesepakatan bahwa mulai 25 Juni mereka akan tutup sementara waktu. "Tapi, ini bukan berarti kita mengizinkan penutupan Dolly dan Jarak. Memang Risma mau kush makan? Nggak tuh?"

Berdasarkan pantauan *Republika*, ada dua wisma dan bar terbesar di Gang Dolly dan Jarak, yakni Barbara dan New Barbara, yang sudah tak lagi beroperasi. Pada Jumat (20/6) pagi, tampak sejumlah anggota kepolisian mengawal beberapa pekerja menuruni

serta kursi merah panjang tempat PSK menjajakan diri. Seorang karyawan Wisma New Barbara, Amin, mengaku tidak tahu alasan tempat bekerja ditutup. "Disuruh bos tutup, ya tutup," kata dia.

Di Jarak, aktivitas prostitusi tetap beroperasi. Para PSK bebas menjajakan diri di baliq-baliq kano. Di muat Gang Jarak IV terpancip tulisan dengan apidol hitam "Buka Bos". "Masuk saja Mas, lihat-lihat," kata seorang pengurus wisma dan karaoke Ronnggo. Sejak Dolly dan Jarak digenbar gembarkan ditutup, pengunjung ker gang itu semakin spt. "Lada ya pengunjung pada takutlah, Mas," kata Ronnggo.

Di Gang Lebar yang menjadi pusat prostitusi Jarak, ada beberapa pemilik rumah yang mulai mengidentifikasi bangunan-bangunan dengan tulisan "Rumah Tangga". Salah satu pemilik rumah mengatakan, identifikasi adalah pengesahan bangunan petak itu bukanlah bagian dari sarana prostitusi.

Meski begitu, aktivitas prostitusi di gang itu masih ada. Seorang PSK yang ditemui *Republika* mengatakan, belum ada rencana berhenti menjadi PSK. Penipuan 25 tahun yang mengaku bernama Sri itu mengatakan, tak punya pilihan selain menjadi PSK. "Ngapain berhenti? Toh cuma lima juta (uang kompensasi)nya. Duit saya lebih banyak," kata Sri. ■ *edi ch e-mail*

LOKALISASI

Cegah HIV, Penutupan Dolly Dipercepat

SURABAYA, KOMPAS — Rencana penutupan Dolly di Surabaya dipercepat satu hari menjadi 18 Juni. Salah satu pertimbangan untuk memutus penyebaran HIV karena di kawasan lokalisasi yang sudah ditutup pun masih ditemukan pekerja seks komersial yang beroperasi dan mengidap HIV.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, lokalisasi menjadi sumber penyebaran HIV sehingga Dolly harus segera ditutup. Penutupan Dolly dipercepat juga karena Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie akan hadir langsung. "Pak Menteri akan mengikuti ikrar penutupan dan memasang papan pengumuman pemberlakuan undang-undang perdagangan manusia," katanya

ketika dihubungi pada Rabu (4/6).

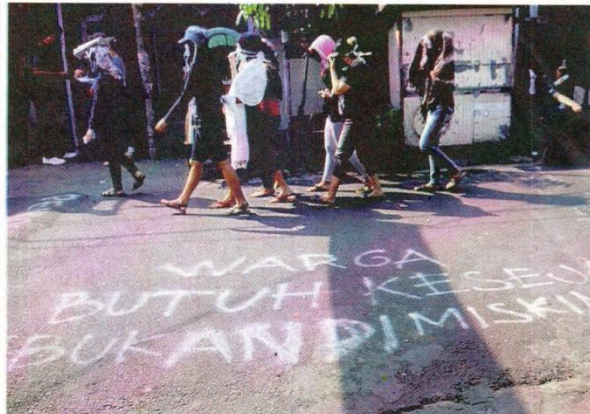
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rahmanita mengatakan, pada 2014, hingga akhir Mei, tercatat ada 254 pengidap HIV di Surabaya. Total pengidap HIV di Surabaya sejak 1998 sebanyak 7.600 orang. "Di Dolly selama 2012 hingga 2014 ada 215 pengidap HIV," katanya.

Sabtu pekan lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menggelar operasi yustisi di bekas lokalisasi Moro Seneng, Sememi, Surabaya. Lokalisasi Sememi itu sudah ditutup akhir 2013. Namun, mereka menemukan 26 pekerja seks komersial (PSK) di dua wisma. Setelah dilakukan tes kesehatan, dua PSK positif mengidap HIV.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, lokalisasi yang sudah ditutup tidak dibiarkan begitu saja. Pengawasan rutin tetap dilakukan supaya tidak muncul lagi praktik prostitusi.

Direktur Eksekutif Yayasan Hotline Surabaya Esthi Susanti mengemukakan, untuk mengatasi masalah PSK yang akan mencari tempat baru karena lokalisasi ditutup, perlu ada perubahan strategi pencegahan. Upaya ini tidak bisa dikerjakan pemerintah kota atau kabupaten saja, tetapi sudah menyangkut pemerintah pusat. Strategi yang dahulu fokus pada pemasok PSK, kini harus terfokus pada sisi permintaan, yakni pada pelanggan atau kaum laki-laki. (DEN/ETA)

Lampiran 9. Kompas, Jum'at 6 Juni 2014



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pekerja yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi berunjuk rasa menolak rencana penutupan lokalisasi Dolly, di Gang Dolly, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/6). Salah satu tuntutan mereka adalah pengusutan adanya indikasi penyimpangan dana kompensasi untuk penutupan lokalisasi karena sampai hari ini banyak korban penutupan yang belum mendapatkan kompensasi dan bantuan untuk pemulihan ekonomi.

LOKALISASI

Penghuni Dolly Mengadu ke Presiden

SURABAYA, KOMPAS — Sekitar 1.000 pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly dan Jarak, Kota Surabaya, Jawa Timur, turun ke jalan menolak rencana penutupan kawasan itu karena khawatir penghasilan mereka berkurang, Kamis (5/6). Jika Dolly tetap ditutup, para PSK dan penghuni lokalisasi mengancam akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Aksi penolakan penutupan lokalisasi dilakukan dengan duduk di sepanjang jalan gang Dolly dengan beralaskan kertas koran. Mereka juga menulis keluhan terhadap rencana penutupan lokalisasi di selembar kertas. Semua keluhan itu akan dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Koordinator aksi dari Front Pekerja Lokalisasi, Aveng, mengatakan, jika Dolly tetap ditutup, mereka berencana memboikot pelaksanaan pemilihan presiden meliputi lima RW di Kelurahan Putat Jaya. "Ada 15.000 suara di lima RW ini," kata dia.

Aksi itu merupakan tanggapan

atas sikap Pemerintah Kota Surabaya yang tetap akan menutup Dolly dan Jarak pada 18 Juni. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie telah menyatakan akan hadir dalam penutupan itu.

Angkat derajat

Menanggapi penolakan penghuni Dolly dengan ancaman mengirim surat ke Presiden dan Komnas HAM, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Jakarta, menegaskan, "Silakan saja. Prinsip utama penutupan lokalisasi untuk mengangkat derajat seluruh penghuni dan menyelamatkan masa depan anak-anak di sekitar kawasan itu."

Seluruh program sebelum melakukan penutupan lokalisasi juga sudah dilaksanakan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan keterampilan untuk para PSK dan mucikari, termasuk pemilik wisma.

Saat unjuk rasa, sebagian besar dari mereka menghujat Risma yang sampai saat ini konsisten menutup semua lokalisasi di Surabaya. "Kami akan tolak semua bantuan. Buat apa Rp 5 juta. Saya sebulan bisa dapat Rp 15 juta," kata Susi, salah satu PSK di

Dolly. Pemkot Surabaya akan memberikan bantuan modal usaha kepada setiap PSK Rp 5 juta. Selain bantuan modal, PSK juga mendapat pelatihan keterampilan.

Menurut Susi dan PSK lain, mereka sampai saat ini tidak pernah didatangi Pemkot Surabaya mengenai konsep alih profesi yang ditawarkan itu. Padahal, Pemkot Surabaya mengklaim telah memverifikasi sebagian PSK di Dolly dan Jarak serta memberdayakan mantan PSK di lokalisasi lainnya.

Pemilik wisma dan mucikari juga keberatan akan kehilangan penghasilan. Johan, salah satu pemilik wisma, mengatakan, sebelum ada isu penutupan Dolly, satu wisma dapat menghasilkan Rp 60 juta per bulan. "Setelah ada isu penutupan, pendapatan wisma menurun jadi Rp 30 juta."

Menurut Johan, di lokalisasi Dolly dan Jarak terdapat sekitar 300 wisma. Selama ini, wisma rata-rata mempekerjakan 10 PSK. "Jadi, kami mau saja menutup usaha kami dan pindah jika diberi kompensasi Rp 5 miliar," kata Linda, pemilik wisma lain. (DEN/ETA)

Lampiran 10. Kompas, Selasa 10 Juni 2014

KILAS DAERAH

Warga Dolly Menerima Bantuan Peralatan Usaha

SURABAYA — Sebanyak 79 warga di lokalisasi Dolly, Surabaya, Jawa Timur, yang terdampak rencana penutupan lokalisasi tersebut, menerima bantuan peralatan usaha dari Pemerintah Kota Surabaya, Senin (9/6). Mereka diharapkan memiliki usaha yang lebih baik dan penghasilan yang lebih banyak setelah Dolly ditutup. "Bagi saya, yang terpenting bagaimana memberi peluang warga Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk warga di sekitar Dolly," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo meminta kelompok masyarakat yang menolak rencana penutupan lokalisasi Dolly tidak mengatasnamakan kepentingan ekonomi. (DEN/NIK)

ENUTUPAN DOLLY

Komnas HAM: Dialog Perlu Ditingkatkan

SURABAYA, KOMPAS — Je-
lang penutupan lokalisasi Dolly
di Kota Surabaya, Jawa Timur,
Komisi Nasional Hak Asasi Ma-
nusia melihat kondisi sosial di
lokalisasi itu, Kamis (12/6). Me-
reka menemukan perlawanan
warga terhadap rencana penu-
tupan itu masih besar. Pendek-
katan lewat dialog harus semakin
ditingkatkan.

"Jika masih ada penolakan se-
perti sekarang ini, artinya masih
ada yang belum pas," kata Ko-

misioner Komnas HAM Dianto
Bechrudi. Jika penutupan loka-
lisasi itu tetap dilakukan pada 18
Juni dengan mengabaikan per-
lawanan dari sebagian warga,
konflik lebih besar dapat terjadi.
Ratusan pekerja seks komer-
sial (PSKO) dan warga menggelar
mimbar bebas di Gang Dolly, Ka-
mis. Mereka mendirikan tenda
dan mengadakan diskusi sehin-
ga akses menuju Dolly ditutup.
Pewakilan dari PSK, mucklari,
pedagang informal, dan Dianto

secara bergiliran menyampaikan
pendapatnya.

Peserta mimbar bebas umum-
nya menilai Wali Kota Surabaya
Tri Rismaharini arogan karena
tetap akan menutup Dolly. Me-
reka merasa tak pernah didekati
oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Selama sebulan terakhir, se-
tidaknya ada empat aksi yang
dilakukan warga dan PSK di
Dolly untuk menyorakan pe-
nolakan rencana penutupan itu.
Mereka juga mendatangi Komisi

D DPRD Kota Surabaya, Selasa,
untuk mengadakan rapat dengar
pendapat. Namun, rencana itu
hatal karena wakil Dinas Sosial
Kota Surabaya tidak hadir.

Dianto mengatakan lokalisasi
diwarnai pelanggaran HAM, sa-
lah satunya karena menjadi pasar
perdagangan manusia. "Saya ya-
kin niat Pemkot Surabaya baik.
Namun rencana ini tidak mudah.
Pemkot Surabaya harus bisa me-
astikan kehidupan ekonomi
warga tidak hancur karena itu

juga termasuk HAM," kata dia.
Secara terpisah, Gubernur Ja-
tim Soekarwo mengatakan, pe-
nutupan lokalisasi justru untuk
menegakkan HAM. "Manusia itu
punya hak untuk hidup bermar-
tabat. Jika saya membiarkan saja,
berarti saya melanggar HAM ju-
ga," kata dia.

Menurut Soekarwo, Penerima-
tah Provinsi Jatim siap men-
berikan bantuan dana yang di-
butuhkan Pemkot Surabaya be-
rapa pun jumlahnya. (DEN)

Lampiran 12. Kompas, Rabu 18 Juni 2014

LOKALISASI

Polisi Jamin Keamanan Penutupan Dolly

SURABAYA, KOMPAS — Meski masih ada penolakan dari sebagian warga, polisi memastikan rencana penutupan lokalisasi Dolly, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/6), berjalan aman dan lancar. Polisi mengerahkan 986 personel untuk menjaga deklarasi penutupan Dolly yang dihadiri Menteri Sosial Saiful Hamid Al-Jufrie.

"Masyarakat tidak perlu resah," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Setija Junianta, Selasa, di Surabaya. Polisi juga akan mendapatkan bantuan dari TNI.

Deklarasi penutupan Dolly dijadwalkan berlangsung pukul 1900 di gedung Islamic Center Surabaya sekitar 1,5 kilometer dari Dolly. Gubernur Jatim Soekarwo dijadwalkan hadir. Upaya penutupan Dolly merupakan kerja sama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Kemarin pagi, suasana di Dolly memanas karena seorang pemuda berinisial NA (22) nekat masuk ke lokalisasi dan merusak dua wisma. Ia memecahkan kaca wisma-wisma itu dengan batu berukuran buah kelapa. NA kemudian ditangkap warga dan diserahkan kepada polisi.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, Setija mengatakan, "Pelaku ternyata mengalami gangguan jiwa dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya."

Meskipun begitu, akibat kejadian itu, warga meningkatkan pengamanan kampung. Warga berkumpul di setiap mulut gang di kawasan Dolly. Mereka memasang bendera setengah tiang sebagai simbol penolakan penutupan Dolly.

Warga yang menolak dan beberapa aktivis, kemarin, kembali mendatangi DPRD Surabaya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, hingga pertemuan kali ketiga itu, warga tetap kecewa karena pihak Dinas Sosial Kota Surabaya kembali tidak dapat hadir.

Di lokalisasi Dolly, warga yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL) mengadakan jumpa pers. "Kami siap melawan dan membubarkan acara deklarasi," kata Koordinator FPL Prasetyo. Mereka juga berencana

Uang Kompensasi Dibagikan

Penutupan Dolly Tetap Ditolak

SURABAYA, KOMPAS — Kamis (19/6), Pemerintah Kota Surabaya mulai membagikan uang kompensasi kepada mantan pekerja seks komersial dan mucikari dari lokalisasi Dolly dan Jarak. Pembagian uang itu merupakan langkah awal rehabilitasi warga setelah penutupan lokalisasi dilakukan secara bertahap selama lima hari sejak Kamis.

"Jika lima hari tak ambil, uang itu dikembalikan ke pemerintah pusat," kata Wali Kota Tri Rismaharini, Kamis, di Surabaya, Jawa Timur. Uang kompensasi itu diharapkan bisa digunakan mantan pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari sebagai modal beralih profesi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memberi bantuan uang kompensasi untuk 1.449 bekas PSK Dolly-Jarak sebesar Rp 7,3 miliar sehingga setiap orang mendapat Rp 5,05 juta. Dana itu terbagi Rp 1,8 juta untuk tunjangan hidup, Rp 3 juta untuk modal usaha, dan Rp 250.000 untuk biaya transportasi pulang ke daerah asal. Sebagian besar PSK di lokalisasi Dolly-Jarak berasal dari luar daerah.

Uang kompensasi untuk 311 mantan mucikari Dolly-Jarak diberikan Pemerintah Provinsi Jatim sebesar Rp 1,5 miliar. Setiap orang mendapat sekitar Rp 5 juta. Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan Rp 16 miliar untuk mengalihfungsikan wisma, tempat PSK di bekas lokalisasi Dolly-Jarak, menjadi sentra industri rumahan dan sentra perdagangan.

Pembagian uang kompensasi dilakukan di Koramil 0832/01 Sawahan, Surabaya, yang terletak di dekat bekas lokalisasi. Kamis sore, tercatat 79 mantan PSK dan 23 mantan mucikari yang datang. Mantan PSK mendapatkan uang dalam rekening di Bank Jatim. Mantan mucikari menerima uang tunai.

Kepala Polresta Surabaya Komisaris Besar Setija Junianta mengatakan, pembagian dana kompensasi dilakukan di Koramil karena dekat dengan bekas lokalisasi. "Kami dan TNI membuat tahapan yang dilakukan Pemkot Surabaya," kata dia.

Sementara itu, sekelompok warga yang menolak penutupan lokalisasi dan tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Kamis sore, menyatakan tidak mengakui deklarasi penutupan lokalisasi Dolly-Jarak yang dilakukan Rabu malam dan dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf

Al'Jufrie. Mereka menolak menerima uang kompensasi pula. "Penutupan ini tak ada landasan hukumnya. Dolly tetap buka," kata juru bicara FPL, Saputro.

Mereka kembali menggelar aksi dengan berjalan kaki di sepanjang Jalan Jarak, Surabaya. Akses ke Dolly kembali diblokade. Namun, Risma menegaskan tidak peduli dengan penentangan itu dan tetap merehabilitasi warga. "Bicarakan saja. Mereka itu bukan warga Surabaya," kata dia.

Bebas lokalisasi

Kamis, Risma menyatakan Surabaya sudah bebas lokalisasi. Sejak tahun 2010, satu per satu lokalisasi ditutup. Selain Dolly dan Jarak, lokalisasi lain yang juga ditutup adalah di kawasan Tambak Asri, Klokah Rejo, Moro Seneng, dan Dupak Bangsari.

Rencana penutupan lokalisasi bermula ketika Risma mengetahui masih banyak kasus perdagangan manusia di Surabaya dan lokalisasi menjadi pasarnya. Dia pun mulai bersosialisasi dengan mengunjungi setiap sekolah yang terdampak lokalisasi. Ia menemui PSK dan warga terdampak dengan memberi tahu ada usaha lain yang lebih baik dan menguntungkan. Tokoh agama diajak mendampingi warga pula.

Bagi Risma, menutup lokalisasi bukan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi menyelamatkan generasi muda. Pro dan kontra tidak hanya dari penghuni lokalisasi, tetapi juga dari Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Whisnu meminta penundaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak.

Risma mengingatkan pula, lokalisasi menciptakan lingkungan buruk sehingga warga yang tinggal di sekitarnya tidak pernah menikmati hidup tenang dan perkembangan mental kaum mudanya buruk. Tidak ada semangat berprestasi di sekolah. Fenomena ini terjadi karena kondisi tempat tinggal benar-benar bising hingga dini hari. Selain itu, banyak PSK juga menderita HIV/AIDS dan tidak terurus.

(DEN/ETA)

PENUTUPAN LOKALISASI

Proses Rehabilitasi Bekas Lokalisasi Butuh Waktu

SURABAYA, KOMPAS — Dengan penutupan Dolly dan Jarak, Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, telah menutup enam lokalisasi. Meski sudah ditutup, beberapa tempat hiburan malam dan wisma yang dulu digunakan untuk praktik prostitusi masih beroperasi di beberapa bekas lokalisasi tersebut, Jumat (20/6). Ini menunjukkan proses rehabilitasi pasca penutupan lokalisasi membutuhkan waktu.

Di bekas lokalisasi di Klakah Rejo dan Moroseneng di Kecamatan Benowo, Dupak Bangursari di Kecamatan Krembangan, serta Tambak Asri di Kecamatan Krembangan, masih ada tempat hiburan malam yang buka.

Penutupan lokalisasi di Surabaya dimulai dengan penutupan lokalisasi Dupak Bangursari pada akhir 2012. Kini, lingkungan di bekas lokalisasi itu sudah rapi dan bersih. Jalan yang semula aspal tidak rata sudah berganti dengan *paving block*. Beberapa masjid dan sekolah serta sentra industri rumahan sudah berdiri.

Namun, di sisi selatan kawasan itu masih terdapat beberapa tempat hiburan malam. Rata-rata berupa kafe yang ditempelinya spanduk atau reklame merek bir.

"Kami tidak tahu apakah kafe-kafe itu masih digunakan untuk prostitusi, tetapi itu jadi gan-

jalan kami. Kami sebenarnya ingin kafe-kafe itu tidak ada," kata Trisno, warga setempat.

Di Klakah Rejo juga masih terdapat rumah musik untuk karaoke dan kafe. "Tetapi, tidak ada lagi prostitusi di dalamnya," kata Muchlis Sadam, Ketua RT 002 RW 002 di Klakah Rejo.

Di Moroseneng juga masih ada wisma-wisma. Akhir Mei lalu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya merazia tempat itu dan menemukan 26 pekerja seks komersial yang beroperasi di sana.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, proses rehabilitasi lokalisasi memang tak mudah dan setiap lokalisasi perlu penanganan berbeda. "Justru setelah penutupan tanggung jawab saya semakin berat untuk memdayakan warga. Tetapi, kita tidak boleh lelah," kata dia.

Muchlis lebih senang lokalisasi ditutup meski dia harus menjadi tukang parkir karena usaha warungnya juga ikut tutup. "Lebih baik begini karena lingkungan lebih tenang," kata dia.

Meski demikian, kata Muchlis, warga di kampungnya berharap ada bantuan program pemberdayaan dari Pemerintah Kota Surabaya. Pemkot menjanjikan membuka sentra pedagang kaki lima, tetapi belum terlaksana.

(DEN)



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

Nama : **Amelia Lukman Nikmah**

NIM : **101211003**

Fak./Jur./Prodi : **Dakwah dan Komunikasi / KPI / S-1**

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema
"MENEGUHKAN KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"

yang diselenggarakan oleh

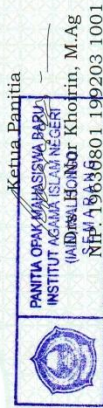
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2010

An. Rektor
Pembantu Rektor III
Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA.
NIP. 19560624 198703 1002





Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2010

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS DAKWAH IAIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat : Gedung PKM Tridita JCLN Wadisono Semarang Jl. Prof. Dr. Hamka, Km.2 Ngaliyan Semarang Rp. 085641089/20

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06. 1/Pan-OPAK/BEM-F/08/2010

Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada :

Amelia Lutfiatin Nikmah

Atas partisipasinya dalam acara Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2010
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang pada hari Rabu dan Kamis, 25-26 Agustus 2010, bertempat di Laboratorium
Dakwah (Lab Da) Fakultas Dakwah sebagai :

PESERTA

Semarang, 26 Agustus 2010

Panitia pelaksana OPAK 2010

Fak. Dakwah IAIN Walisongo PELAKSANA

OPAK
FAKULTAS DAKWAH IAIN WALISONGO SEMARANG

Usifatul Mar'ah

Ketua

Hasan As'ari Syaikh

Sekretaris



BEM-FD Mengetahui,
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fak. Dakwah IAIN Walisongo

Ma'rifin

Ketua



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

N a m a : **AMELIA LUTFIATIN NIKMAH**

N I M : 101211003

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,



Dr. M. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

BIODATA

NAMA : Amelia Lutfiatin Nikmah
NIM : 101211003
TTL : Jepara, 06 Juni 1992
ALAMAT : Desa Bandungharjo RT 03 RW 05, Donorojo, Jepara
E-Mail : amelcemil80@gmail.com
No HP : 085726766462

Pendidikan :

1. SDN 03 Bandungharjo Jepara (1998-2004)
2. MTs. Darul Ulum Jepara (2004-2007)
3. MA. Darul Ulum Jepara (2007-2010)
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan KPI